



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



WASTRA- LANGKARA

Literasi Busana Bangsawan Yogyakarta

Fajar Wijanarko

WASTRA - LANGKARA

Literasi Busana Bangsawan Yogyakarta

Fajar Wijanarko



PERPUSNAS
PRESS

WASTRA-LANGKARA

Literasi Busana Bangsawan Yogyakarta

©2021 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Fajar Wijanarko

ISBN : 978-623-313-353-1

ISBN PDF : 978-623-313-354-8

xiv + 118

14,8 cm x 21 cm

Pengarah

Kepala Perpustakaan Nasional RI

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca

Pembimbing

Drs. Supriyanto, M.Si.

Editor

Endy Santoso

Suryadi, S.T.

Desain Cover

Aly ibnu Husein

Layouter

Gatot Santoso

Penerbit

Perpusnas Press

Anggota IKAPI

Jalan Salemba Raya No. 28A – Jakarta Pusat

Surel : press@perpusnas.go.id

Laman : <https://press.perpusnas.go.id>

SAMBUTAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dengan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Sebagaimana telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan perpustakaan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Buku Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal dengan berbagai subjek yang kini ada dalam genggaman Anda, merupakan karya terbaik untuk dipersembahkan pada bangsa ini. Melalui buku yang ditulis terjadi proses eksternalisasi pengetahuan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat telah hidup, tumbuh dan berkembang pada kehidupan keseharian masyarakat. Proses penyusunan pengetahuan kemudian dilakukan dalam media buku untuk dapat menjadi pengetahuan bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Pengetahuan tersebut kembali menjadi milik masyarakat untuk diterapkan sebagai penerapan literasi masyarakat yang berdasar pada pengetahuan berbasis konten lokal.

Literasi dipahami sebagai kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Tingkatan literasi yang pertama adalah kemampuan baca dan tulis. Selanjutnya adalah kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan

terpercaya, terlengkap, terkini. Kemampuan selanjutnya adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Dalam konteks ini pemahaman apa yang tersirat didapat melalui proses membaca. Keempat, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, kreativitas baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi. Sedangkan kemampuan kelima adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Berbagai tingkatan literasi ini menjadikan perpustakaan sebagai pusat transformasi bagi masyarakat. Koleksi perpustakaan tidak hanya menjadi benda sakral yang selalu tersimpan rapat dalam rak perpustakaan, namun diperlukan upaya masif melalui proses (*transfer knowledge*) untuk menciptakan siklus pengetahuan (*knowledge circle*) dalam penciptaan pengetahuan baru. Penciptaan pengetahuan, dapat berupa hasil Kajian Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal ini sebagai salah satu usaha menumbuhkan pengembangan pengetahuan berbasis pengetahuan berbasis budaya masyarakat.

Melalui tingkatan literasi, strategi mencerdaskan masyarakat disusun berdasarkan tingkat literasi tersebut. Hal ini untuk menjadikan strategi tersebut menjadi tepat guna dan menjadi tujuan untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas sebagai tingkatan literasi yang paling tinggi. Penciptaan literasi dalam tingkatan mencipta barang dan jasa tidak dapat dicapai semata – mata pada proses penciptaan barang dan jasa, namun melalui pembangunan berkelanjutan dari tingkatan membaca dan menulis, kemampuan akses, kemampuan memahami, dan kemampuan mengungkapkan ide.

Melalui pelaksanaan kegiatan Kajian Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal ini, Perpustakaan Nasional RI ingin menerapkan berbagai tingkatan literasi sebagai usaha nyata penerapan nilai literasi melalui penulisan buku. Buku menjadi hasil literasi sebagai wujud mampu

akses, mampu memahami, mampu mengungkapkan ide hingga mampu menghasil produk barang dan jasa. Melalui kegiatan ini, lahir penulis – penulis muda yang memiliki talenta serta diharapkan menjadi upaya pelestarian kearifan lokal sebagai simbol peradaban dan literasi di Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI berterima kasih kepada Dewan Juri Bapak **Drs. Supriyanto, M.Si.** (Tenaga Ahli Perpustakaan), Ibu **Nelwaty, S.S.,M.Si.** (Pustakawan Ahli Utama), **Dr. Ir. Achmad Fajhroji, M.M.** (Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero)), **Dr. Nina Mayesti, S.S., S.Kom., M.Hum.** (Akademisi Bidang Perpustakaan), **Gol A Gong** (Duta Baca Indonesia). Dewan Juri telah mendampingi melalui proses seleksi, pendampingan penulisan maupun finalisasi naskah – naskah Kajian Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal sehingga dapat tersaji dan menjadi pelopor dalam praktik nyata peningkatan literasi masyarakat. Demi mewujudkan peningkatan literasi masyarakat, Perpustakaan Nasional RI akan terus menjadi pelopor pengembangan pengetahuan berbasis pengetahuan lokal di masyarakat.

Kami percaya, melalui masyarakat yang berkemampuan literasi berbasis pada konten lokal, Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju dengan berpegang pada nilai budaya dan konten lokal. Selamat menikmati buku ini, selamat berliterasi, semoga Indonesia Semakin Maju dengan Literasi.

Kepala Perpustakaan Nasional RI

Muhammad Syarif Bando

PRAKATA

Istilah busana dalam arti sempit sering diterjemahkan sebagai pakaian. Kompendium inilah yang ditemukan pula dalam kebudayaan Jawa dewasa ini. Padahal jika merujuk pada terminologi 'bhūšana' dalam Bahasa Sansekerta, arti yang dihasilkan justru merujuk pada hiasan. Perihal ini tidak terbatas pada pakaian saja, tetapi juga hiasan untuk seni dan sastra. Busana dalam arti hiasan selanjutnya memiliki kaitan dengan simbol-simbol yang menyertainya. Greetz membaca konteks ini sebagai tidak hanya sebagai manifestasi budaya material, melainkan sebagai dokumen yang tidak terbatas. Busana memiliki fungsi dasar sebagai pelindung tubuh, sekaligus sebagai perwujudan dari ide-ide yang mempengaruhi psikologis dan sosiologis (Greetz, 1973: 91).

Pembacaan Greetz atas simbol dari budaya material ini membawa narasi utuh mengenai catatan busana para bangsawan Yogyakarta. Busana tidak terbatas simbol kebesaran tetapi berkaitan dengan kuasa dan estetika. Berdasarkan deskripsi penulis, busana dari suatu daerah dan komunitas hadir secara original, tetapi tumbuh dan berkembang bersama kultur dan akulturasi yang terjadi di dalamnya. Kondisi ini secara tidak langsung ditemukan dalam menelusuri sumber-sumber busana. Pada mulanya, Pulau Jawa sebagai kawasan terbuka sekaligus jalur perdagangan dunia menangkap peluang terhadap budaya asing. Berbagai budaya material diadopsi secara ekologis, dan dikemas sebagai budaya baru. Di kemudian hari, Yogyakarta sebagai kota kerajaan merespon perihal akulturasi ini dan mewujudkannya sebagai bagian dari kemungkinan diplomasi antara 2 elit besar, yakni keraton dan kolonial.

Di dalam penelusuran lebih lanjut mengenai arsip busana di Yogyakarta, rupanya terdapat catatan yang rumpang. Periode ini muncul akibat peristiwa "Geger Sepehi" tahun 1812 yang menghabiskan seluruh arsip sehingga keraton harus menelusuri kembali memori

kolektif dari leluhurnya dahulu. Peristiwa tersebut memutus pembacaan sejarah busana yang rupanya telah ditulis sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I. Peradaban busana yang selalu diulas berulang hanya berasal dari periode Sri Sultan Hamengku Buwono VII, sedangkan pada periode sebelumnya banyak diabaikan. Di dalam buku ini, ulasan mengenai busana dan kecenderungan dari perhatian setiap Sultan terhadap aturan busana turut dihadirkan sebagai uraian dari peta busana pada setiap pemerintahan. Pembahasan mengenai kelengkapan busana kebesaran, seperti payung dan batik secara khusus dihadirkan dalam buku ini. Melalui karya ini kisah wastra-langkara, busana dan perhiasan mampu disampaikan sebagai literasi busana Bangsawan di Yogyakarta sejak 20 dasawarsa silam hingga sekarang.

Penulis berharap, karya ini dapat menjadi bagian dalam menelusuri kekayaan busana dan peradaban dari Keraton Yogyakarta. Terlebih, perhatian busana pada beberapa dekade terakhir cukup tinggi, melihat busana menjadi bagian dari tolok ukur kemapan sebuah budaya. Akhirnya, semoga karya ini dapat dibaca dan mampu memberi sumbangsih kepada para pemerhati busana adat sekaligus masyarakat yang membutuhkan. Rasa terima kasih yang tidak terkira pada kesempatan ini penulis persembahkan kepada Gusti Kanjeng Ratu Hayu dan Gusti Kanjeng Ratu Bendara yang telah memberi izin, jalan terbuka, serta keleluasaan untuk menelusuri arsip-arsip busana di Keraton Yogyakarta, termasuk berkesempatan terlibat langsung sebagai kurator pameran pada tahun 2020 dengan tema busana dan peradaban. Momentum itulah yang memicu penulis untuk terus menggali arsip busana dan menuliskannya sebagai jalan keabadian. Rahayu.

Yogyakarta, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	iii
PRAKATA	vi
TRADISI BUSANA DI JAWA.....	1
LITERASI BUSANA	13
KERATON YANG HILANG	13
PERADABAN BUSANA AWAL DI YOGYAKARTA.....	26
ATURAN BUSANA PARA BANGSAWAN.....	46
TEDHAK LOJI: SEBUAH PARADE BUSANA PARA BANGSAWAN.....	68
PAYUNG SEBAGAI KELENGKAPAN	78
BUSANA KEBESARAN	78
MENULIS KEMBALI	87
PATRON BUSANA ABAD KE-20.....	87
DAFTAR PUSTAKA	109
INDEKS	115
TENTANG PENULIS	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Corak motif kawung terdapat pada kain tapih bagian kanan yang dikenakan oleh Maharaja Kertarajasa sebagai Harihara. (Sumber: heritage.asean.org).....	4
Gambar 2.	Peta kekuasaan VOC di Jawa tahun 1677, meliputi daerah Pesisir yang menjadi pintu gerbang dari perniagaan maritim. (Sumber: <i>Repro Atlas Mataram</i> , hal 108).	7
Gambar 3.	Litografi Rampogan Macan di Alun-alun Keraton Yogyakarta Tahun 1876 karya L.H.W.M de Stuers. Sumber: Koleksi Tropen Museum melalui wikimedia.org	10
Gambar 4.	Litografi Turnamen Senenan karya L.H.W.M de Stuers. Sumber: Koleksi Tropen Museum melalui wikimedia.org	10
Gambar 5.	Ilustrasi peta Jawa yang menunjukkan kekuasaan Pangeran Mangkubumi setelah disepakatinya Perjanjian Giyanti, tahun 1755. (Sumber: <i>Repro Houben</i> , 1994: 11).....	16
Gambar 6.	Ilustrasi Keraton Yogyakarta karya Johannes Rach tahun 1771. (Sumber: kratonjogja.id).....	18
Gambar 7.	Javaanse edelman begeleidt door bediende met pajoeng 'Bangsawan Jawa didampingi oleh abdi dengan payung' karya Clercq, J.H.W.Ie. tahun 1845 (Sumber: KITLV).....	29
Gambar 8.	Litografi model pakaian atau seragam perang Jawa tempo dulu menurut Raffles dalam <i>History of Java</i> . (Sumber: Wikimedia.org)	31

Gambar 9.	Litografi pakaian kebesaran adat Jawa di lingkup pengadilan menurut Raffles dalam History of Java. (Sumber: Wikimedia.org).....	32
Gambar 10.	Dokumentasi busana prajuritan yang dikenakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VI (Sumber: KITLV).....	36
Gambar 11.	Sultan saat berada di stasiun kereta Yogyakarta bersama pejabat tinggi Belanda, antara tahun 1935. (Sumber: KITLV).....	38
Gambar 12.	Kunjungan sultan ke kantor residen didampingi oleh asisten residen Christiaan Abbenhuis, antara tahun 1938. (Sumber: KITLV).....	38
Gambar 13.	Busana resmi dari Keraton Jawa yang menunjukkan pangkat sekaligus status bangsawan dalam penggambaran orang Eropa pada saat itu. (Sumber: Rijksmuseum.nl)	39
Gambar 14.	Busana resmi pejabat istana di Jawa antara tahun 1820-1870 dalam penggambaran orang Eropa pada paruh abad ke-19. (Sumber: Rijksmuseum.nl).....	39
Gambar 15.	Javanese Officer 'Perwira Jawa' Dilukis oleh John Newman antara tahun 1811-1813, British Library. (repro: Gallop, 1995: 82).....	51
Gambar 16.	Javanese Pike Bearers 'Angkatan Tombak' Dilukis oleh John Newman antara tahun 1811-1813, British Library. (repro: Gallop, 1995: 83).....	52
Gambar 17.	Lukisan Sultan Hamengku Buwono IV dengan Busana Pesiyan (Besiyaran). Busana yang mendapat pengaruh dari corak busana-busana Eropa dengan hiasan bulu kasuari pada bagian topi dan tanda pangkat pada bagian bahu.....	55

Gambar 18. Busana harian yang dikenakan oleh Sultan. (Sumber: KITLV).....	64
Gambar 19. Busana yang dikenakan Sultan dalam upacara besar. (Sumber: KITLV).	64
Gambar 20. Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro, putra mahkota pertama Sri Sultan Hamengku Buwono VII (Sumber: KITLV).....	65
Gambar 21. Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, saudara Sri Sultan Hamengku Buwono VII (Sumber: KITLV).....	65
Gambar 22. Penggambaran motif batik parang rusak dengan berbagai corak dan varian, yang dikenakan sebagai kampuh dalam busana para pangeran serta para pembesar di Keraton Yogyakarta saat peristiwa Garebeg. (Sumber: KITLV)	67
Gambar 23. Iring-iringan abdi dalem dan kereta Putra Mahkota Pangeran Adipati Anom Amengkunegoro dalam prosesi tedhak loji tahun 1895. (Sumber: KITLV).	72
Gambar 24. Kereta Kyai Garudayeksa yang ditarik dengan 8 kuda melewati tengah Alun-alun. Di sisi kanan-kirinya terlihat masyarakat yang menyaksikan lajunya kereta pusaka tersebut, tahun 1925. (Sumber: KITLV)...	72
Gambar 25. Kelompok abdi dalem Priyantaka, Mertalulut, serta Mantri Keparak Kiwa serta Dampar Sultan yang dibawa oleh kelompok Narakarya. Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo.....	73
Gambar 26. Kereta Kanjeng Kyai Garudayeksa yang dikendarai oleh Sultan Hamengku Buwono VII, dikawal oleh para bupati. Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo.	73

Gambar 27. Kelompok Bupati dan Panji Distrik, Bupati Anom dan Riyo, serta Bupati Politik dan Nayaka. Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo.	74
Gambar 29. Payung-payung yang terbuka di Alun-alun Utara saat peristiwa Garebeg 1910 (Sumber: KITLV).....	84
Gambar 30. Litografi aturan payung bagi Sultan dan kerabat keraton yang diterbitkan kira-kira tahun 1900. (Sumber: KITLV).....	86
Gambar 31. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dengan Gubernur J. Bijlvelde (dan Gubernur Jenderal A.W.L. van Starckenborgh Stachouwer di rumah dinas gubernur Yogyakarta, tahun 1937. (Sumber: KITLV).	89
Gambar 32. Busana Mayor Jendral putih yang dikenakan oleh Sultan Hamengku Buwono VIII saat menjemput asisten residen Christiaan Abbenhuis di Stasiun Tugu tahun 1938. Terdapat perbedaan penggunaan slempang pada busana Sultan. (Sumber: KITLV).....	90
Gambar 33. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII bersama Gubernur Yogyakarta P.R.W. van Gesseler Verschuur pada upacara Garebeg, tahun 1930. (Sumber: KITLV)	91
Gambar 34. Potret rasukan sutra panjang dengan peniti susun tiga serta selop bagi perempuan. Foto tersebut merupakan putri-putri dari Sri Sultan Hamengku Buwono VI yang didokumentasikan tahun 1865. Raden Ajeng Moetokina (kiri), Raden Ajeng Soepiah (tengah), dan Raden Ajeng Saripa. (Sumber: KITLV)....	93
Gambar 35. Potret Raden Ajeng Soepiah dengan busana sutra panjang, perhiasan pada busana serta cincin yang melingkar di beberapa jari ditambah dengan rantai kipas serta selop. Raden Ajeng Soepiah merupakan	

	putri pertama dari Sri Sultan Hamengku Buwono VI. (Sumber: KITLV).....	93
Gambar 36.	Busana yang dikenakan dalam upacara peringatan Tingalan-Dalem di Bangsal Kencana oleh Sultan Hamengku Buwono VIII. (Sumber: Majalah Hoedyana-wara, 1941).....	95
Gambar 37.	Sultan Hamengku Buwono IX sedang memantau jalannya gladi resik upacara Garebeg Siyam 1872 Jawa didampingi oleh KPA Cakraningrat. (Sumber: Majalah Hoedyana-wara, 1941).	96
Gambar 38.	Busana Pasowanan Ngabekten yang dikenakan oleh Bendara Pangeran (paman, kakak, dan adik sultan) di Bangsal Kencana. Terlihat pada gambar para pangeran berkain kampuh tetapi lukar busana atau tidak mengenakan busana di bagian atas. (Sumber: Majalah Hoedyana-wara, 1941).	97
Gambar 39.	Momentum saat gunungan keluar dari Bangsal Pagelaran. Terlihat abdi dalem berbusana merah dengan kain biru tua sedang menggotong gunungan bersama-sama. (Sumber: kratonjogja.id). .	106
Gambar 40.	Momentum gunungan saat berada di pelataran Masjid Gedhe. Di sinilah gunungan akan diperebutkan oleh masyarakat. (Sumber: kratonjogja.id).....	106
Gambar 41.	Busana yang dikenakan masing-masing kelompok kesatuan prajurit di Keraton Yogyakarta	107
Gambar 42.	Sultan mengenakan busana bernama ksatriyan saat upacara sungkem atau ngabekten putri di keraton. Penutup kepala yang dikenakan disebut blangkon. (Sumber: kratonjogja.id).....	107

Gambar 43. Sultan mengenakan busana bernama ksatriyan ageng saat upacara Garebeg Mulud Dal. Terlihat perbedaan penutup kepala yang dikenakan sultan. Penutup kepala seperti ini disebut kuluk. (Sumber: kratonjogja.id) 108

TRADISI BUSANA DI JAWA

The biggest challenge on research of early textiles—or any organic object—is the dearth of surviving materials. Despite this absence, however, evidences of textiles abound in the carvings and engravings on stone and metal. These depictions have been discussed by many scholars, but they have never been studied in depth or in a systematic way (Sardjono, 2020).

Jauh sebelum Kerajaan Mataram berkuasa, Penduduk Jawa telah mengenal peradaban berbusana. Tradisi tenun lebih dahulu dikenal sejak masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya pola hias tenun pada sejumlah pecahan gerabah (Soekmono, 1973: 55-56). Sementara tradisi kain sutra dan kain katun muncul kemudian seiring dengan perkembangan perdagangan di Jawa. Sejak abad ke-7 M, Jawa rupanya menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan Jawa banyak didatangi oleh pedagang-pedagang dari seluruh dunia, terutama India, Cina, Arab, dan Eropa. Semakin lama perdagangan di lautan Nusantara menjadi ramai sehingga munculnya interaksi antara pedagang dari mancanegara dengan pedagang pribumi. Hall (2011) mengidentifikasi bahwa siklus perdagangan di Asia Tenggara terbagi menjadi 5 zona penting, meliputi 1) Laut Cina Selatan, 2) Laut Jawa, 3) Selat Malaka, 4) Laut Sulu dan Borneo, dan 5) Kepulauan Bengal (Hall, 2011: 30). Keberadaan Laut Jawa sebagai bagian dari zonasi perdagangan memberi dampak besar dalam pertukaran budaya, terutama budaya material busana. Catatan Dinasti Sung (960-1279), menyebutkan bahwa Penduduk Jawa memiliki pola produksi busana yang begitu istimewa. Mereka memelihara dan menenun kain sutra halus, sutra kuning, dan kain dari katun. Groeneveldt (1960) menyebutkan pula bahwa pada tahun 992 sutra dengan hiasan benang emas dan beberapa jenis kain lainnya telah ditemukan.

“Penduduk Jawa telah memelihara ulat sutra dan membuat/menenun kain sutra halus, sutra kuning, dan kain dari katun. Tahun 992 raja Maharaja mengirimkan utusan ke Cina dengan membawa persembahan berupa permata, mutiara, sutra disulam dengan hiasan bunga-bunga, sutra disulam dengan benang emas, sutra beraneka warna, kayu cendana, kain dari kapas beraneka warna, emas, tikar rotan berhias dan kakak tua putih. Raja Jawa rambutnya terurai dan memakai kain yang menutupi dada sampai ke bawah lutut” (Groeneveldt, 1960: 16-17).

Dari catatan Groeneveldt tersebut, pada beberapa prasasti menuliskan bahwa kain sebagai busana secara sederhana disebut dengan istilah *wedhihan*¹ dan *ken*². *Wedhihan* merujuk kain sebagai busana yang digunakan oleh laki-laki, sementara *ken* merupakan kain bagi busana perempuan. Dibandingkan dengan istilah pada prasasti, naskah Jawa lebih banyak merekam istilah kain dengan nama *wastra*, *sinjang*, *kampuh*, dan *tapih*. Adapula istilah *singhel*³, *kalambi*, *salimut*, *dodot*, hingga sabuk yang mengacu pada pakaian dan kelengkapannya⁴. Kidung Harsawijaya yang berangka tahun 1294, menjadi salah satu dokumen sastra tertua yang telah mencatat busana dengan istilah *wastra*, *sinjang*, *kampuh*, *sabuk*, dan *lancingan*. Kidung ini menyebutkan pula berbagai motif kain yang di kemudian hari dikenal sebagai motif batik, seperti gringsing, gringsing-kawung, cepuk bunga, limaran, dan sitaresmi⁵. Pada abad ke-13, kawung sepertinya menjadi motif yang banyak digunakan sebagai corak dalam busana. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukan motif-motif kawung dalam arca dengan periode yang sejaman. Arca Siwa Mahakala yang tersimpan di Museum Volkenkunde, menunjukkan visual yang begitu tajam mengenai motif kawung pada kain penutup bagian bawahnya. Sementara itu, arca

1 Istilah *wedhihan* selalu diberikan kepada pejabat laki-laki sebagai pasek-pasek atau hadiah saat upacara penetapan suatu daerah menjadi daerah perdikan atau *sima*. Stutterheim menyebut pula bahwa *wedhihan* sama dengan *bebed* dalam Bahasa Jawa Baru (Wurjantoro, 1995: 6).

2 Sementara untuk istilah *Ken*, Stutterheim di dalam kutipan Wurjantoro (1995) mengartikan sebagai kain panjang untuk wanita yang serupa dengan *tapih* 'garment worn around the lower part of the body, always of women' (Wurjantoro, 1995: 6)

3 Di dalam teks Bowakawya, istilah *singhel* merujuk pada perhiasan berupa gelang, kalung, jamang atau hiasan kepala (Wurjantoro, 1995: 11).

4 *Wastra* memiliki berbagai ragam corak hias, seperti tumpal, kawung, gringsing, bunga bakung dengan warna merah, biru, hijau tua, jingga, ungu, dan kuning emas (Wurjantoro, 1995: 2-6).

5 *Wastra sinjang gringsing alus* 'mengenakan kain bermotif gringsing halus' (Wurjantoro, 1995: 34).

Maharaja Kertarajasa sebagai Harihara di Museum Nasional Indonesia juga memperlihatkan motif yang serupa dengan kawung pada kain penutup tubuh bagian bawahnya (Sardjono, 2020:19-22).



Gambar 1. Corak motif kawung terdapat pada kain tapih bagian kanan yang dikenakan oleh Maharaja Kertarajasa sebagai Harihara. (Sumber: heritage.asean.org)

Berkaitan dengan motif kawung, Green (2007) dalam penelitiannya terhadap relief dinding candi di Angkor serta kain sutra Cina dan katun India menyimpulkan bahwa kedua jenis kain mewah tersebut digunakan di Khmer. Motif kawung tersebut kemudian ditransformasikan dalam bentuk hiasan dinding candi yang dianggap sebagai rumah para dewa. Motif inilah yang kemudian dikenal dengan nama kawung pada kebudayaan Jawa dan direpresentasikan pada benda-benda budaya. Motif ini kemudian berkembang pesat seiring dengan adanya perniagaan antara Nusantara dengan Cina dan India. Pada abad ke-12 itu, corak kawung yang semula berkembang di Khmer bermigrasi ke Nusantara dengan media kain yang diperdagangkan (Green, 2017). Kawung nampaknya juga berkembang di India dengan nama Gujarati hingga ke Mesir. Diperkirakan Mesir menjadi penerima kain Gujarati sebagai komoditi dagang antara tahun 1260 hingga tahun 1330 (Muziyah, 2020: 26-27).

Pengaruh India dalam tata busana di Nusantara tidak sebatas motif pada kain. Patut diduga para pedagang Indonesia memberi pengaruh lebih banyak pada saat itu, seperti cara menggunakan busana hingga kelengkapan perhiasan yang dikenakan. Sthapati (2002) dalam

bukunya *“Indian Sculture & Iconography”* menyebutkan arca dewa-dewi di India menggunakan sutra yang menutup tubuh bagian bawah dengan pola bersusun *‘drape of silk cloth’*. Ada pula gaya *drape of cotton fabric* atau pola bersusun dari kain (Sthapati, 2002: 158-159).

“Sculpture images normally have only the lower half of the bodies draped in garments. The torso is left bare so as to focus on the natural beauty and attractive lines of the upper body” (Sthapati, 2002: 159).

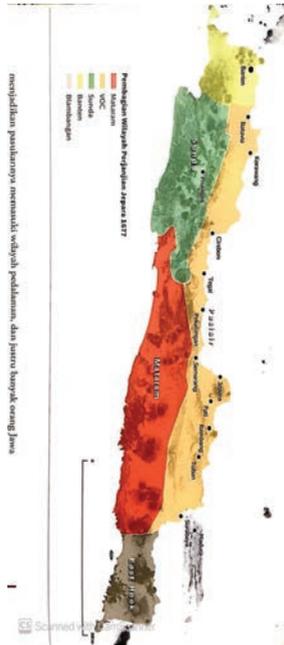
Perihal cara menggunakan kain dengan model bersusun tersebut, ditemukan kemudian dalam kebudayaan yang lebih muda. Lombard (2008) mencatat hasil penelitiannya dalam buku *Nusa Jawa Silang Budaya* mengenai relief kaki Hindu-Jawa, termasuk relief zaman Majapahit. Visual yang didapatinya cukup membuktikan bahwa pada zaman itu busana tidak lebih dari kain lipat atau selubung tanpa jahitan. Perkembangan busana selanjutnya berubah lebih kompleks pada kurun abad yang lebih muda. Peran Cina dalam mengenalkan busana dengan teknik jahit di Jawa nampaknya perlu mendapat perhatian. Munculnya pakaian yang pas, terutama jenis pantalon untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan, lambat laun menyebar luas sejak abad ke-15 sampai abad ke-16. Hal ini terjadi seiring dengan transformasi sosial-budaya besar-besaran pada zaman itu. Periode tersebut kemudian menandai kebangkitan masyarakat perkotaan. Bangsa Cina nampaknya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan busana pada waktu tersebut, hingga memunculkan tradisi menjahit dengan jarum dan benang yang diimpor pula dari negara ini⁶.

6 Tentang pengaruh Cina dalam tradisi berbusana di Jawa diawali dengan penjajak Cina menjual benang dan jarum, serta mengenalkan adat menyetrika pakaian jauh sebelum nona-nona Belanda mengenalkan busana Eropa. Bangsa Arab dan Budaya Islam agaknya juga memberi pengaruh dalam busana-busana di Jawa yang banyak ditemui tradisi berbusananya pada tokoh-tokoh silat dan petani Sunda dan Madura (Lombard, 2008: 318).

Berbicara mengenai pengaruh budaya Cina dalam berbusana, pada abad selanjutnya ditemukan catatan mengenai perniagaan kain yang terjadi antara Eropa, Cina, dan India. Pada abad ke-16 dan ke-17, orang Eropa memasuki arena perdagangan yang sudah aktif antara Cina dan India. Penduduk Nusantara pun telah menjadi bagian dari siklus perdagangan ini selama bertahun-tahun. Perdagangan biasanya melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal besar dan beberapa perahu kecil milik orang Melayu. Di luar orang Eropa, Cina, dan India, rupanya orang Bugis (penduduk *Calebes*) menjadi salah satu pemeran dalam siklus perdagangan sekala internasional ini. Raffles (2014) menyebutkan bahwa Jawa mendapat impor dari Bugis berupa kain sarung yang bermutu tinggi, butiran emas, kain chintz (sejenis kain katun) dari Eropa, dan kain lebar. Barang-barang tersebut selalu memiliki pasar di Jawa (Raffles, 2014: 126).

Pendirian Perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1602 bernama *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* memberi pengaruh besar dalam dinamika perniagaan di Jawa. Pihak Belanda berhasil menjadi kekuatan komersial terpenting di Nusantara saat itu. Langkah VOC begitu cerdas dalam melihat pasar dagang di Jawa tidak pernah padam. Pada periode tersebut, tekstil India, termasuk patola ikat ganda yang mahal dan tekstil blok yang lebih murah atau tekstil tanpa warna, menjadi komoditi bernilai tinggi yang diatur peredarannya oleh VOC. Pada tahun 1600an kain-kain ini rupanya memiliki posisi yang begitu penting hingga menjadi mata uang pertukaran dominan untuk rempah-rempah Melayu dan barang-barang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut Jawa juga terus meminta pasokan kain dari Eropa seperti kain bercorak dari Inggris, kain katun putih halus, serta bahan wol. VOC rupanya juga mengimpor kain dalam jumlah besar dari Eropa dengan pola meniru kain Jawa dan Melayu (Raffles, 2014: 131). Pada abad ke-17, Belanda kemudian mendapatkan monopoli atas kain patola yang sangat terkenal (Stephenson, 1993: 108). Permintaan yang besar di Nusantara untuk perdagangan tekstil India sebagai busana seremonial

sungguh menggembirakan. Industri batik sebagai bagian dari busana kebesaran dan keseharian masyarakat Jawa juga turut digenjut agar mendapat posisi yang sama dalam komoditi perdagangan kain nusantara⁷.



Gambar 2. Peta kekuasaan VOC di Jawa tahun 1677, meliputi daerah Pesisir yang menjadi pintu gerbang dari perniagaan maritim.
(Sumber: Repro Atlas Mataram, hal 108).

7 Tidak dimungkiri bahwa perdagangan tekstil ini akhirnya melibatkan Orang-orang Eropa dalam politik lokal, yang menyebabkan periode kolonial Belanda yang panjang. Belanda mempertahankan minat pada tekstil dan berusaha menggairahkan industri batik dalam negeri dengan berbagai cara. Selain itu, pengusaha Belanda-Indonesia menjalankan studio batik yang sukses yang memperkenalkan desain dan kegunaan baru untuk batik, terutama di Pantai Utara. Rezim kolonial Belanda diinterupsi sebentar oleh Inggris pada awal abad ke-19 dan runtuh dengan invasi Jepang pada tahun 1942 (Stephenson, 1993: 108).

Langkah strategis dari VOC dalam memonopoli perdagangan kain bukan tanpa sebab. Reid (2014) dalam bukunya *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680* menyebutkan bahwa kurun waktu abad ke-17 pakaian menjadi budaya material yang bernilai tinggi. Keindahan dari busana orang-orang di kawasan Asia Tenggara, terlihat dari sulaman-sulaman emas atau permata yang ditenun di atas kain tekstil. Tekstil yang ditenun dan kain sutera ini kemudian berperan sebagai pakaian penghias diri hingga penanda status sosial. Kaum bangsawan dan saudagar-saudagar bahkan menggunakan kain-kain tekstil mahal sebagai dekorasi dinding⁸ (Reid, 2014: xxi). Tekstil-tekstil ini tanpa disadari merambah menjadi industri besar, merajai Nusantara, terutama Jawa. Parameter kemapanan dalam berbusana kemudian disandingkan dengan cara berbusana orang-orang Jawa, hingga muncul istilah cara Orang Jawa. Istilah ini lahir dari kronik Istana Banjarmasin abad ke-17, yang berusaha memaksakan rakyatnya agar berpakaian sebagaimana model Jawa yang murni.

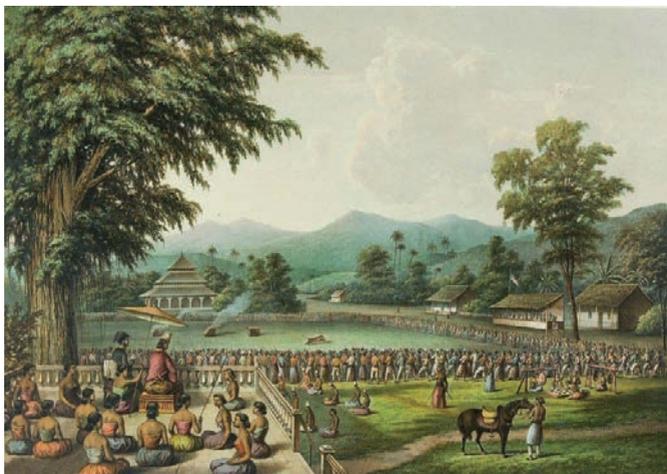
“Djangan lagi angkau sakaliannja itu mamakai saparti pakaian orang Malaju, atawa pakaian orang Walanda, atawa pakaian orang Tjina, atawa pakaian orang Siam, atawa orang Atjih, atawa orang Makasar, atawa pakaian tjara Bugis. Sakaliannja itu djangan diturut; maksi pakaian tjara adat kita lagi dinagri Kaling itupun djangan lagi diturut karena kita sudah berlain nagri. Sudah kita berbuat nagri sandiri, manurut tahtaastilah tjara nagri Madjapabit. Maka kita samuanja pakaian tjara orang Djawa. Maka babar tjarita orang tuha-tuha dahulu-dahulu kala; manakala orang nagri itu manurut pakaian orang nagri lain nistjaja datanglah sangsara pada nagri yang manurut pakaian orang nagri lain itu” (Hikayat Banjar 264; Reid, 2014: 100)

-
- 8 Orang Jawa dalam catatan Reid begitu konsen pada penggunaan pakaian. Menurut pengamatan Reid, kebanyakan Orang Jawa pada tahun 1600-an telah menggunakan batik, sebuah tekstil yang prosesnya bermula dengan meneteskan lilin penolak warna pada pakaian. Lilin ini dipandang sebagai pengganti tato dan jimat sekaligus penunjuk status. Rupanya kata batik sendiri merupakan istilah yang paling umum digunakan untuk tato dalam bahasa-bahasa Indonesia Timur dan Filipina (Reid, 2014: 88).

Melihat Jawa pada waktu itu, komoditi tekstilnya banyak didominasi oleh kalangan elit kerajaan. Para bangsawan begitu memiliki selera yang tinggi tentang penggunaan busana. Di dalam arsip litografi Hindia Belanda, masyarakat Jawa digambarkan begitu beragam terutama dalam seni berbusana. Seorang litograf bernama L.H.W.M. de Stuers dari Batavia Stad, mencoba menggambarkan peristiwa rampogan macan di Jawa. Litografinya begitu menunjukkan warna-warni busana yang dikenakan oleh masyarakat dengan berbagai lapisan level sosial tahun 1876⁹. Karya litografi *Stuers dimuat dalam Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia* (1979), *Tekenen op Zee* (1999), *De Indische Archipel*. Di samping rampogan macan, Stuers juga membuat litografi *Het Tournooispel Senennan op Java* yang melukiskan kemeriahan turnamen Senenan¹⁰. Pada litografi keduanya, Stuers kembali menggambarkan kemegahan busana yang dikenakan oleh para bangsawan Jawa (Indrawati, 2020: 121-123). Kain kampuh yang terlihat digunakan hampir semua kalangan menandai masyarakat Jawa, dalam hal ini Yogyakarta telah menempatkan pakaian sebagai bagian dari kelengkapan penting dalam interaksi sosial. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan bangsawan saja, tetapi juga di kalangan masyarakat kelas menengah. Dokumentasi tata busana ini dibuktikan dari arsip litografi karya Stuers.

9 Litografi yang digambar oleh Stuers dengan latar peristiwa rampogan macan rupanya peristiwa sakral yang dilakukan oleh Sultan di Alun-alun Keraton Yogyakarta. Peristiwa ini merupakan tindakan ritual yang menjadi bagian dari serangkaian upacara di kraton yang menandai perayaan akhir puasa Ramadhan dan awal tahun baru Muslim. Menurut Wessing, rampogan juga dipertunjukkan kraton ketika menerima tamu Eropa. Hal senada pernah diungkapkan Ricklefs (2002: 425) saat Residen van Rhijn mengunjungi Kraton Yogyakarta untuk mempererat hubungan kedua belah pihak yang sempat terganggu oleh insiden penusukan seorang kapten dari kompi Dragoon VOC di Yogyakarta oleh salah satu perwira Sultan saat perayaan Grebeg Mulud pada tahun 1783.

10 Penamaan turnamen ini agaknya mengacu pada hari pelaksanaan acara, yaitu pada hari Senin.



Gambar 3. Litografi Rampogan Macan di Alun-alun Keraton Yogyakarta Tahun 1876 karya L.H.W.M de Stuers.
Sumber: Koleksi Tropen Museum melalui wikimedia.org



Gambar 4. Litografi Turnamen Senenan karya L.H.W.M de Stuers.
Sumber: Koleksi Tropen Museum melalui wikimedia.org

Stuers dengan jelas menggambarkan kelas sosial dari masyarakat Jawa melalui busana dan kelengkapan yang menyertainya. Pada peristiwa rampogan macan, terlihat bahwa seorang raja duduk di kursi, berada di atas panggung yang tinggi serta terdapat payung yang melindunginya dari matahari. Di belakang sang raja terdapat abdi perempuan yang setia. Sementara itu, di dalam litografi kedua, terlihat seorang raja yang dikawal dengan berbagai prajurit. Sang raja yang duduk di atas kuda terlihat mengenakan payung sebagai penanda dari kelas sosial sekaligus kekuasaannya. Kedua litografi tersebut memberi gambaran yang begitu nyata tentang penggunaan busana terutama kain oleh masyarakat Jawa dalam jumlah besar.

Di Keraton Yogyakarta, kebutuhan kain yang digunakan para bangsawan dalam berbagai jenis begitu tinggi. Kain-kain inilah yang berfungsi sebagai kelengkapan tata busana dalam berbagai acara. Pada abad ke-18, di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I, keraton menaruh perhatian pada busana para kerabat dan punggawa dengan berbagai kelengkapannya. Payung dan keris merupakan dua hal yang begitu ketara menandai kelas sosial hingga jabatan selain busana. Aturan mengenai tata busana bagi para seluruh elemen kerajaan pun disusun sebagai sesuatu yang baku dan mengikat. Aturan busana ini disusun secara hierarki dan berfungsi sebagai bagian dari keabsahan diri sekaligus legitimasi jabatan. Penggunaan busana tersebut tentunya didukung dengan perhiasan pelengkap busana. Di dalam tradisi Jawa, istilah busana dan perhiasan kemudian disebut sebagai "*wastra-langkāra*". *Wastra-langkāra* sendiri berarti busana dan perhiasan dalam Bahasa Jawa Kuna dan diadaptasi pada kebudayaan Jawa Baru (Mardiwarsito, dkk., 1992: 107). Istilah *wastra* yang merujuk pada busana (kain) telah digunakan oleh masyarakat Jawa berabad-abad silam. Kidung Harsawijaya (1294), telah dikenal peradaban busana dengan istilah *wastra* seperti halnya *awastra pik alus ginatreng rukmi* yang berarti *wastra* yang halus indah, dihiasi dengan emas (Wurjantoro, 1995: 33). Perpaduan busana dan perhiasan

ini di kemudian hari memberi gambaran tentang kemapanan tata pemerintahan dari negara baru yang lahir setelah disepakatinya Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755, di Desa Giyanti, di kaki Gunung Lawu.

Meski telah memiliki tatanan pemerintahan yang mapan, pada tahun 1810-1812 terjadi pasang surut politik di Keraton Yogyakarta. Akibat gejolak tersebut, Yogyakarta yang berada di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II mengalami gejolak yang cukup besar. Puncaknya, pada 1812 Yogyakarta diserang oleh Thomas Stamford Raffles beserta koloni Inggris dan Sepoy. Yogyakarta, terutama keraton sebagai pusat pemerintahan kota kerajaan harus mengalami kehilangan harta benda akibat dijarah secara besar-besaran. Penjarahan inilah yang menjadi alasan keberadaan arsip-arsip awal Yogyakarta berada di Inggris. Parahnya dari keadaan tersebut, Yogyakarta tidak benar-benar tahu seberapa banyak harta dan arsip yang hilang dari keraton.

Alasan sederhana inilah yang menjadi semangat untuk menelusuri arsip busana di Yogyakarta sejak Pangeran Mangkubumi hingga potretnya saat ini. Bab demi bab dari buku ini kemudian akan mengungkap kekayaan arsip busana sebagai potret legitimasi seorang bangsawan hingga aturan yang menunjukkan status sosial. Pada proses pelestariannya saat ini, begitu banyak perubahan yang terjadi. Dinamika politik dan perubahan pola pemerintahan dari setiap sultan ternyata juga memberi dampak pada penggunaan busana bagi berbagai kalangan di kemudian hari.

LITERASI BUSANA KERATON YANG HILANG

[...] *praja wutah ing rah sinawung kakawin/ mahambêk
widayaka// yeku adêging kraton kêkalih/ Surakarta lan
Ngayogyakarta/ Adiningrat pinangkane [...]*

(kisah) tentang negara tumpah darah dibingkai dalam tembang, seperti karya pujangga. Yaitu tentang berdirinya, dua kerajaan, asal mulanya Surakarta dan Ngayogyakarta Adiningrat. (Babad Giyanti) (R. Ng. Yasadipura I, 1937)

Pada kompendium pembagian kekuasaan Jawa, Raden Ngabehi Yasadipura I seorang pujangga dari Keraton Surakarta menandai tahun-tahun krusial sebagai masa penting. Penanda-penanda tahun ini kemudian dituliskan dalam karya sastra berjudul Babad Giyanti. Babad Giyanti sebagai babad mayor pada paruh abad ke-18 mencatat runtuhnya Keraton Kartasura yang diduduki oleh pemberontak pada Juni 1742 yang mengakibatkan Sunan Paku Buwono II harus melarikan diri dari keratonnya¹¹. Babad Giyanti juga merekam jelas kekecewaan Pangeran Mangkubumi atas kebijakan Sunan Paku Buwono II dalam menjaga martabat Keraton Surakarta yang terus-menerus didesak oleh pihak Belanda. Dalam hal ini, rupanya Patih Pringgalaya berperan penting atas kekecewaan Mangkubumi. Pada akhirnya terjadilah perang saudara yang didahului dengan kepergian sang pangeran dari keraton. Dari sinilah titik perang suksesi Jawa ketiga tahun 1746-1755 dimulai (Ricklefs, 2002: 61; 67).

Dari rentetan peristiwa sejarah tersebut, klimaks dalam Babad Giyanti nampaknya ditunjukkan pada cerita perang suksesi Jawa ke-3. Episode tersebut diawali dengan kepergian Pangeran Mangkubumi pada 19 Mei 1746 dari keraton menuju tanah Sukawati hingga menjadi raja di Dusun Kabanaran. Pangeran Mangkubumi selanjutnya bergelar Sunan Kabanaran dan membangun pesanggrahan di Giyantipura¹². Di kemudian hari, Mangkubumi nyatanya justru menjadi ancaman besar bagi Keraton Surakarta dan pihak Belanda sendiri.

11 Pemberontakan ini menempatkan Belanda sebagai juru selamat bagi Sunan Sunan Paku Buwono II yang dimintai bantuan untuk mengembalikan takhtanya. Akan tetapi, konsekuensi yang harus dipatuhi Sunan adalah Kompeni berhak menentukan pejabat patih dan menguasai daerah Pesisir (Ricklef, 2002: 61).

12 *"Punika Serat Babad Pagiyanti: lolosipun Pangeran Mangkubumi dhateng tanah Sukawati ngantos saged Jumeneng Sultan wonten ing dhusun Kabanaran lajeng damel pesanggrahan wonten ing Giyantipura"* (Babad Giyanti, S90/ PBA. 83).

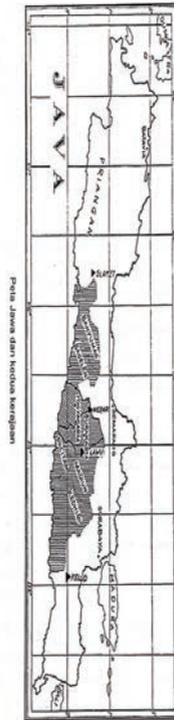
Di dalam upaya meredam sepak terjang sang pangeran, Nicholas Hartingh (saat itu menjabat sebagai Gubernur Semarang) dalam Babad Giyanti (S91/SB.75) mengajukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi guna membentuk kesepakatan atas pembagian kerajaan Jawa dengan Pakubuwono III, pada tahun 1755. Pakta yang disepakati di Desa Giyanti, di kaki Gunung Lawu sebelah tenggara Surakarta kemudian dikenal dengan Perjanjian Giyanti (*Palihan Nagari*). Perlu dipahami bahwa Perjanjian Giyanti dilakukan antara Pangeran Mangkubumi sebagai raja dengan VOC. Fakta ini diperkuat dalam catatan sejarah Prajanjianipun Para Nata Kartasura Tuwin Surakarta Kaliyan Kumpeni (H12/PBC.38) (Behrend, 1990), yang mencatat bahwa sang pangeran lebih dahulu dinobatkan menjadi raja, atau setidaknya mendapat pengakuan resmi oleh Kumpeni di Desa Giyanti, pada Tahun Jimakir, 1682 (1755)¹³.

Wilayah yang kini dikenal dengan Yogyakartaan wonten ing dhusun Kabanaran lajeng damel pesanggrahan wonten ing Giyantipura” dan sPeristiwa *Palihan Nagari* kemudian menjadi titik nadir Nagari Mataram, yang harus terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta¹⁴. Pangeran Mangkubumi, bergelar Sultan Hamengku Buwono I dengan sah memperoleh wilayah Mataram, Kedu, dan Bagelen yang masuk dalam wilayah Negara Agung. Sementara itu,

13 'Kajeng Pangeran Mangkubumi kajumenengaken Sultan dening Kumpeni, wonten ing dhusun ing Giyanti, sawetan praja Surakarta nalika nuju taun Jimakir angkanipun warsa 1682, taun ongka 1755' (Teks Prajanjianipun Para Nata Kartasura Tuwin Surakarta Kalitan Kumpeni, h.137). Sementara dalam Babad Giyanti (S93a/SB.81) disebutkan bahwa proklamasi Pangeran Mangkubumi sebagai raja dilakukan pada hari Ruwah, 1 Sura, Alip 1675 dengan sengkalan berbunyi Tata Pandhita Rasaning Bumi atau 11 Desember 1749 (Babad Giyanti, h.418).

14 Wilayah Ibukota Kerajaan Yogyakarta berada di barat Negara Surakarta, sejauh 64 km. Di dalam catatan Lombard (2008), Pangeran Mangkubumi mendapat 9000 cacah, sementara Sunan Pakubuwono III mendapat 87.000 cacah. Akan tetapi, jumlah cacah Sunan harus dibagi lagi dengan Raden Mas Said (kelak Mangku Negara) sebanyak 4.000 cacah akibat dari Perjanjian Salatiga 1757 (Lombard, 2008).

wilayah Mancanegara-nya meliputi Madiun (Kota Madiun, Magetan, Caruban, dan sebagian Pacitan), Kediri (Kertasana, Kalangbret, Ngrawa/Tulung Agung), Surabaya (Japen/Majakerta), Rembang (Jipang, Teras Karas), Semarang (Sela, Kuwu, dan sebagian Grobogan). Selain itu, Pangeran Mangkubumi juga mendapat wilayah Pantai Utara Jawa yang disewakan kepada VOC. Keseluruhan wilayah yang menjadi milik Pangeran Mangkubumi seluas 53.100 cacah untuk Negara Agung dan 33.950 cacah untuk Mancanegara (Ricklefs, 2002: 114).



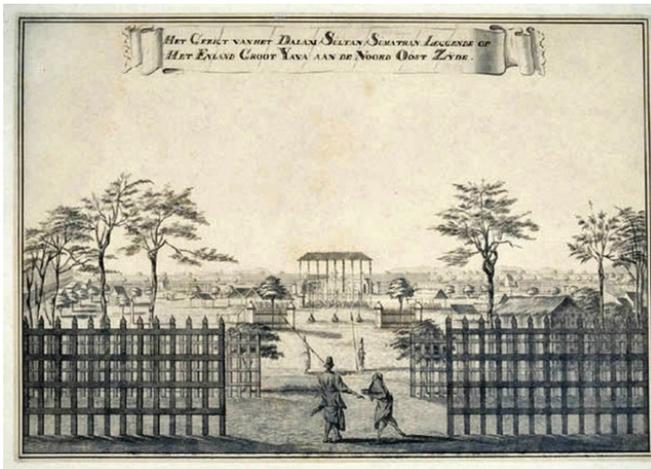
Gambar 5. Ilustrasi peta Jawa yang menunjukkan kekuasaan Pangeran Mangkubumi setelah disepakatinya Perjanjian Giyanti, tahun 1755. (Sumber: Repro Houben, 1994: 11).

Mengenai Yogyakarta sebagai kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan baru di Jawa, agaknya tidak benar-benar baru. Sebelum tahun 1755, daerah yang dikenal sebagai Yogyakarta dahulu bernama Garjitawati. Noorduyn (2015) dalam artikel yang berjudul "Etimologi Nama Yogyakarta" mengungkapkan beberapa pendapat mengenai asal kata "yogyakarta". Pendapat pertama menyebut bahwa "yogyakarta" merupakan hasil penerjemahan dari nama Ayodya, ibukota Rama dalam cerita Ramayana (Noorduyn, 2015: 45-46). Ricklefs merasa adanya kejanggalan jika memaksakan bahwa "yogyakarta" merupakan transformasi dari Ayodhyapura yang disebutkan dalam Desawarnana, Negarakertagama abad ke-14. Menurutnya, sebutan Ayodhyapura dimaksudkan lebih dekat dengan kota Ayutthaya di Muang Thai (Ricklefs, 2015: 88). Pendapat kedua yang dirujuk oleh Noorduyn adalah tulisan J.L.A. Brandes yang menyebutkan bahwa "yogyakarta" sudah dicatat dalam arsip perjalanan Baron van Imhoff.

"Bahwa telah ada sebuah tempat bernama Yogya atau Ayogya di distrik Mataram di dekat lokasi Yogyakarta berada beberapa waktu sebelum pembagian Kerajaan Jawa pada tahun 1755, dibuktikan oleh berbagai cuplikan dalam dokumen-dokumen awal Belanda. Sejauh ini, dokumen tersebut telah dipulikasi mulai tahun 1743. Baron G.W. van Imhoff saat melakukan perjalanan pulang pada tahun 1746 sempat singgah di sini (Yogyakarta), yang disebutnya dengan Ayogya. Rupaya Kawasan ini sudah menjadi lokasi berbagai insiden sebelum tahun 1755" (Noorduyn, 2015:49).

Di samping itu, 1743 rupanya Mas Garendie yang bergelar Sunan Kuning pernah mendiami Yogyakarta saat terjadi pemberontakan di Kartasura. Informasi ini diperoleh dari surat Gubernur Jenderal Johannes Theddens kepada Heeren XVII, tanggal 5 April 1743 yang dimuat dalam *De Jonge van Deventer* 1862-1909. Sementara itu catatan harian perjalanan Elzo Sterrenberg ke Keraton Kartasura antara 7-29 September 1744 menyebutkan bahwa ia berjalan melalui Randoe

lawing hingga sampailah di Djokjo (Yogya). Catatan perjalanan dari Sterrenberg ini dimuat pula dalam De Jonge van Deventer 1862-1909 (Noorduyn, 2015: 50; 75). Sejak menjadi kota kerajaan, litografi awal yang mendokumentasikan lanskap Yogyakarta adalah gambar sketsa karya Johannes Rach tahun 1771. Pada saat itu, Rach menggambar Keraton Yogyakarta dari arah Alun-alun Utara dengan berbagai visual tangkapan mata. Bentang alun-alun yang luas dengan pohon di sekeliling serta ilustrasi bangunan tinggi yang berada di bagian tengah belakang (Siti Hinggil) begitu tampak jelas.



Gambar 6. Ilustrasi Keraton Yogyakarta karya Johannes Rach tahun 1771.

(Sumber: kratonjogja.id)

Pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I terkonsentrasi pada pembangunan dan persoalan politik. Meski demikian, sultan juga menaruh perhatian pada bidang seni sebagai warisan pengetahuan kolektif seperti halnya seni tari dan seni sastra. Perihal kegemarannya dalam bidang seni juga diwariskan pada putra mahkota Raden Mas Sundoro. Pada satu sumber berjudul “Babad Karaton Ngayogyakarta” disebutkan bahwa sultan menari berpasangan dengan putranya, Pangeran Adipati Anom. Tarian tersebut sampai saat

ini dikenal dengan nama tari Jebeng (Pramutomo, 2009: 16). Pada tahun 1792, Sri Sultan Hamengku Buwono I mangkat dan digantikan oleh putranya Raden Mas Sundoro yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono II. Kenaikan takhta putra mahkota sebagai raja baru banyak menuai ketegangan. Kebijakan dari Sultan banyak yang tidak sesuai dengan pemerintah VOC pada saat itu hingga kekuasaannya sempat dibekukan pada 1810 oleh Daendels (Marihandono, 2008: 131). Namun, pada tahun Oktober 1811, Sri Sultan Hamengku Buwono II kembali naik takhta setelah digantinya pemerintahan Belanda di Jawa oleh Inggris. Takhta Sultan rupanya tidak bertahan lama, sebab pada Juni 1812, Inggris menggempur keraton dalam peristiwa Geger Sepehi.

Pasukan gabungan yang terdiri dari 500 orang prajurit Sepoy, 400 prajurit Kesusnan, dan 500 orang anggota Legiun Prangwedanan menakhlukan Ngayogyakarta. Pada pukul 12 siang, tanggal 20 Juni 1812 Yogyakarta berhasil diduduki sepenuhnya oleh Inggris. Peristiwa berdarah inilah yang membuat Yogyakarta tidak hanya kehilangan banyak prajurit dan punggawa-punggawa keraton karena gugur, tetapi juga kekayaan material, termasuk arsip-arsip kerajaan (Marihandono, 2008: 155). Tidak benar-benar diketahui berapa banyak arsip yang dibawa sebagai barang jarahan. Arsip-arsip inilah yang menjadi dokumen sejarah awal pembangunan Keraton Yogyakarta dalam berbagai bidang.

Geger Sepehi: Rompangnya Arsip Busana

Selama 37 tahun, Pangeran Mangkubumi bertakhta di Yogyakarta. Di samping membangun keraton secara fisik sebagai pusat pemerintahan, Pangeran Mangkubumi yang kemudian dikenal sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono membangun pula kebudayaan yang sebelumnya telah disepakati dalam Perjanjian Jatisari, 15 Februari

1755¹⁵. Memasuki masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II (1792-1812), keraton mengalami berbagai transisi yang bertubi-tubi sebagai konsekuensi konstelasi politik yang terjadi di dataran Eropa pada penghujung abad ke-18.

Bagian ini memberi gambaran singkat yang lebih terperinci mengenai perseteruan Sri Sultan Hamengku Buwono II dengan Pemerintah Kolonial. Di mulai dengan perseteruan politik Sultan terkait dengan protokoler penyambutan para pejabat VOC yang berakhir dengan penolakan tegas dari pihak keraton. Klimaksnya, pada 31 Desember 1810, Daendels menuju Keraton Yogyakarta untuk mereduksi kekuasaan dari Sultan Hamengku Buwono II dan melimpahkannya pada Raden Mas Surojo, putra mahkota yang berperan sebagai pangeran wali atau wakil raja¹⁶. Tidak ada pilihan lain bagi Sultan Hamengku Buwono II selain menyerahkan takhtanya kepada putra mahkota, Raden Mas Surojo. Jika sultan tidak bersedia maka konsekuensi pahit harus diterimanya, yaitu pengasingan ke luar dari Yogyakarta¹⁷. Kurang

15 Ricklefs tidak membenarkan adanya pembagian kebudayaan secara terperinci di dalam Perjanjian Jatisari yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Sunan Paku Buwono III. Hanya saja, sumber-sumber tradisi lisan serta sumber arsip yang dirujuk oleh Ricklefs menyebutkan bahwa kedua raja tersebut memang bertemu dengan mediator Hartingh. Perihal protokoler antar kerajaan nampaknya yang lebih menjadi perhatian sehingga formalitas terkait pemisahan wilayah sudah berhasil dilengkapi (Ricklefs, 2002: 120-121).

16 Tidak hanya persoalan protokoler, berbagai rentetan peristiwa yang ditimbulkan dari kehadiran Daendels di Tanah Jawa seperti halnya pemaksaan perjanjian-perjanjian baru yang berkaitan dengan pengambil-alihan kekuasaan atas tanah pesisir kerajaan, monopoli kayu di wilayah mancanegara, krisis ekonomi di kalangan elit istana dan masyarakat kelas bawah, hingga pemberontakan Ranga Prawiradirja yang menyeret Pangeran Natakusuma dan putranya Natadiningrat sehingga harus mengalami pengasingan (Margana, 2010: 46).

17 Pada kenyataannya, Raden Mas Surojo tidak pernah dinobatkan oleh Daendels sebagai Sultan Hamengku Buwono III pada tahun 1810. Hanya saja, secara formal, putra mahkota ini menjadi estafet dari tampuk pemerintahan Keraton

dari setahun, pada November 1811, Sultan Hamengku Buwono II telah diakui kembali kekuasaannya sebagai raja oleh Raffles melalui John Crawfurd yang bertindak sebagai residen di Yogyakarta¹⁸. Akan tetapi hal ini justru menjadi awal mula dari kondisi yang semakin tidak stabil di Yogyakarta. Tidak perlu menunggu lama, pada Juni 1812 Yogyakarta mengalami carut-marut yang begitu besar. Peristiwa Geger Sepahi tidak bisa dielakkan. Penjarahan luar biasa dilakukan oleh pasukan Kolonel R.R. Gillespie dan pasukan Sepoy. Nampaknya peristiwa ini merupakan hal biasa di India. Bagi mereka, barang jarahan merupakan salah satu imbalan besar untuk perwira-perwira Perusahaan Dagang India-Inggris atau *English East Indian Company* (EIC)¹⁹. Pukulan yang menyakitkan bagi sejarah Yogyakarta yang runtuh di tangan Inggris dalam peristiwa Geger Sepahi. Gillespie sempat diperingatkan oleh Raffles tentang harta jarahannya dan terus melakukan pembagian langsung atas sekitar 800.000 dolar Spanyol yang dirampasnya dari Yogyakarta²⁰.

Penjarahan keraton berlanjut meski telah terjadi selama 4 hari penuh. Berbagai barang rampasan terus diangkut ke kediaman

Yogyakarta, sehingga segala bentuk perjanjian kenegaraan dilakukan oleh Raden Mas Surojo dengan Daendels (Marihandono, 2008: 132).

- 18 Meski Raden Mas Surojo sudah diturunkan kembali sebagai putra mahkota dan mengalami ancaman dari pengikut Sultan Hamengku Buwono II, namun pemerintah Inggris menjamin agar sultan tidak mengganggu kedudukan dan keselamatan putra mahkota (Marihandono, 2008: 143).
- 19 Di dalam salinan surat-surat antara Raffles dan Lord Minto, tertulis dalam sebuah kutipan langsung yang menyebutkan bahwa "semua barang berharga milik Djocjakarta [Yogyakarta] jatuh ke tangan para penakluk, tetapi dalam pembagian langsung di tempat, mereka mengambil untuk diri sendiri lebih banyak daripada sepatutnya. Sudah merupakan pendapat umum bahwa di tempat-tempat yang direbut dengan penyerbuan, tentara berhak membagi langsung harta dan perhiasan (Carey, 2012: 401).
- 20 Setidaknya dari 800.000 dolar Spanyol, Gillespie mengambil untuk dirinya sendiri sebesar 74.000 dolar Spanyol atau sekitar 15.000 pound-sterling. Sementara harta sisanya dibagi-bagi pada rekan-rekannya sesama perwira (Carey, 2012: 402)

residen dengan pedati dan para kuli panggul. Bahkan hal yang sangat menyakitkan adalah dipaksanya para perwira keraton untuk mengangkut barang-barang jarahan menggunakan peti besar yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang pusaka keraton. Dari catatan sejarawan Peter Carey, yang paling banyak diangkut adalah alat persenjataan, satuan-satuan wayang, semua gamelan keraton, dan arsip serta naskah-naskah²¹. Sementara untuk dokumen-dokumen dari keraton yang sudah diboyong ke kediaman residen kemudian dibongkar dan disortir oleh Crawford dan C.F. Krijgsman, penerjemah resmi bahasa Jawa (*Gezwoeren Translateur voor het Javaansch*) yang sengaja didatangkan bersama Raffles dari Semarang. Jumlah dokumen dan naskah ini sangat banyak, namun di tengah bara api kemenangan atas segala harta karun keraton, pasukan Inggris justru sibuk membagikan uang dan benda bernilai ekonomi tinggi kepada prajurit yang nampak kelelahan.

Di sisi lain Raffles justru menaruh perhatian sendiri atas begitu banyaknya babad yang sangat berharga. Konon kabarnya, Raffles banyak mengambil kitab yang paling berharga dan paling indah untuk koleksi pribadinya sendiri, dan mengizinkan sisanya untuk dibagikan antara Crawford dan Kolonel Colin Mackenzie (sekitar 1754-1821), perwira kepala insinyur pada ekspedisi itu, yang sangat tertarik dengan segala aspek budaya Jawa. Pangeran Notokusumo (Paku Alam I. 1764-

21 Naskah-naskah ini mencakup karya sastra babad dan juga surat pendaftaran tanah berisi rincian tanah-jabatan yang diberikan kepada anggota keluarga sultan dan para pejabat di wilayah negaragung (Carey, 2012: 405). Banyaknya naskah yang menjadi harta rampasan tidak terlepas dari perhatian Sultan Hamengku Buwono II sebagai pemerhati karya sastra. Pada tahun 1774, R.M. Sundoro (saat menjadi putra mahkota) telah menyusun karya sastra pertamanya, berjudul Babad Mangkubumi. Sastra babad ini oleh R.M. Sundoro dimaksudkan untuk menopang keabsahan kekuasaan Sultan HB I. Sastra kedua yang ditulis oleh R.M. Sundoro adalah Serat Suryaraja yang mengisahkan perang raja-raja Jawa dengan penguasa sebrang. Barulah setelah naik takhta, R.M. Sundoro kembali menulis Serat Baron Sekonder (Sekender) antara tahun 1808-1812 (Marihadono, 2008).

1829; bertakhta 1812-1829) juga hadir di kediaman Residen untuk memberi penjelasan kepada Raffles tentang naskah-naskah tersebut dan berhasil membawa pulang sebuah naskah keturunan para penguasa Jawa yang dihias dengan indah buatan tangan sang pangeran itu sendiri dan telah diambil oleh sultan kedua dari perpustakaan pribadinya ketika dia diasingkan dari Yogyakarta selama setahun (17 Desember 1810-18 Desember 1811). Naskah ini pun dikembalikan oleh Raffles secara pribadi, dan sebuah naskah lainnya, sebuah salinan Serat Ambiya yang menceritakan tentang kehidupan para Nabi yang ditulis dalam huruf pegon, diberikan oleh Crawfurd untuk Pangeran Mangkudiningrat (sekitar 1778-1824), salah satu putra dari sultan kedua, yang menemaninya ke pengasingan, pertama-tama ke Pulau Pinang (1812-1815) dan kemudian Ambon (1817-1824) di mana Mangkudiningrat meninggal setelah menjadi seorang dukun yang dalam ahli obat dan ramuan, dengan nama Panji Angon Asmoro (13 Maret 1824)²².

Tidak jelas jumlah keseluruhan naskah yang diambil dari keraton pada saat itu. Namun, terdapat sebuah rujukan dalam sepucuk surat yang ditulis oleh Crawfurd untuk Pemerintah Inggris pada tahun 1814 yang mengatakan bahwa sekitar 57 naskah dirampas dari perpustakaan keraton pada tahun 1812 dan telah diserahkan kepada penggantinya, Kapten Robert Clement Garnham yang menjabat antara tahun 1814-1815), dan kemudian dikirimnya ke Sekretariat Pemerintah (pasca 1816, Algemeen Secretarie) ke Bogor. Garnham sendiri mengatakan bahwa tumpukan itu merupakan keseluruhan koleksi naskah yang diambil dari keraton²³ tetapi kemungkinan sudah banyak naskah yang

22 Di dalam tulisan Carey tentang koleksi naskah-naskah Jawa John Crawfurd di British Library disebutkan bahwa terdapat naskah berhiaskan daun emas dengan sampul kulit yang bertabur berlian. Hanya saja, tradisi oral tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan naskah yang saat ini ada di Royal Asiatic Society (Carey, tt: 6).

23 Ketiga perwira tinggi Inggris nampaknya benar-benar tergilagila dengan Jawa. Di samping harta yang bersifat ekonomi, kekayaan intelektual dari keraton juga menjadi bagian dari perhatiannya. Raffles, Crawfurd, dan

diambil oleh Raffles, Crawford, dan Mackenzie sebelumnya, sementara sejumlah lainnya kemungkinan hancur di tengah penjarahan keraton. Jika kesaksian Garnham ini benar, maka sumber dari catatan Carey yang menyebutkan bahwa naskah keraton paling banyak berada di tangan perwira Inggris bernama Kolonel Colin Mackenzie tidak perlu diperdebatkan. Sekurang-kurangnya terdapat 66 naskah berbahasa Jawa yang dibawanya pulang ke Benggala pada Juli 1813. Koleksi tersebut kemudian hari dikenal sebagai The Mackenzie Privat Collection yang tersimpan di London. Selain itu, John Crawford disebut-sebut sebagai residen yang turut menjarah perpustakaan keraton. Sedikitnya 45 naskah berbahasa Jawa dibawa olehnya. Kemudian pada 1842, naskah-naskah tersebut dijual kepada British Museum. Sementara Raffles sebagai Gubernur Jendral saat peristiwa Geger Sepahi, turut membawa naskah keraton dengan jumlah lebih banyak yaitu 55 naskah. Dapat dipastikan bahwa perpustakaan keraton dan arsip-arsip di Gedhong Pecarikan dijarah habis-habisan. Selain sebuah kitab Al-Quran (1797) yang ditulis dengan kaligrafi dan dihias dengan indah, hanya dua buah naskah yang masih tersisa di keraton setelah tahun 1812 dari keseluruhan koleksi yang ditulis pada masa kekuasaan sultan pertama yaitu Serat Suryaraja (1744), Arjuna Wiwaha (1788). Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengorganisir ulang arsip di sekretariat keraton. Pada tahun 1830, pasca Raffles meninggal, istrinya yang bernama Lady Shopia Raffles menyerahkan koleksi naskah-naskah tersebut kepada Royal Asiatic Society²⁴.

Mackenzie nyatanya menjadi personal yang selalu disebut-sebut dari carut-marutnya arsip di Yogyakarta pada 1812-1814 (Carey, tt: 7).

- 24 Kangjeng Kyai Al Quran yang ditulis pada tahun 1797 selamat tidak dibawa oleh Raffles saat itu. Ia beranggapan bahwa Al-Quran tidak termasuk bagian dari warisan adiluhung Hindu-Buddha Jawa, sehingga tidak turut dibawa (Lindsay, 1994, Carey, 2012). Tidak jelas alasannya mengapa Serat Suryaraja dan Arjuna Wiwaha turut ditinggalkan, namun dalam catatan Mudjanattistomo kedua naskah tersebut masih di keraton dan menjadi pusaka saat ini (Mudjanattistomo, 1971: 7-8, 63).

Berdasarkan kertas kerja dari Ricklefs dan Voorhoeve, diketahui terdapat 75 naskah yang merupakan bagian dari harta rampasan Raffles dan beberapa perwira Inggris saat peristiwa Geger Sepahi. Ketujuhpuluhlima naskah tersebut telah dikatalogisasi dalam katalog naskah *Indonesian Manuscript in Great Britain*. Pada katalog tersebut tercatat Arsip-arsip Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono II yang merekam catatan mengenai aturan busana bagi para bangsawan di Keraton Yogyakarta. Arsip-arsip tersebut dikeluarkan oleh keraton antara tahun 1780 hingga 1812²⁵. Secara khusus, arsip busana yang terdapat dalam ke-75 naskah tersebut termasuk dalam kategori Archive of Yogyakarta vol 1 (Add MS 12303) dan Archive of Yogyakarta vol. 2 (Add MS 12341). Meski demikian dalam menelusuri catatan busana dari masa sultan yang bertakhta tidak terbatas pada arsip yang berada di Perpustakaan Nasional Inggris, tetapi juga dokumen serat dan babad yang ditulis pasca 1812.

25 Di dalam kertas kerjanya, Ricklefs dan Annabel mengidentifikasi 75 naskah yang berasal dari Keraton Yogyakarta sebagai peninggalan Raffles. Di antara naskah-naskah yang mengandung piwulang, terdapat pula arsip-arsip Yogyakarta yang mengatur urusan internal keraton seperti hukum dan aturan adat, hubungan dengan Pemerintah Kolonial, urusan agama, hingga hukum perdagangan (Ricklefs, dkk. 2014: 45-84).

PERADABAN BUSANA AWAL DI YOGYAKARTA

“Ajining raga gumantung saka ing busana, ajining diri gumantung saka ing lathi” Demikian pepatah Jawa yang mengindikasikan bahwa busana memiliki peran penting terhadap tubuh kita. Bukan hanya melindungi jasmani, dalam perjalannya, busana juga menjadi media identifikasi terhadap gender, profesi, kekuasaan, dan tata nilai yang menguatkan identitas (GKR Hayu, 2020).

Gambaran sederhana mengenai peradaban busana di Keraton Yogyakarta dapat diketahui melalui artefak arkeologis, relief, maupun arca di candi-candi. Tidak jarang arsip litografi menjadi data dukung dalam memberi gambaran busana yang dikenakan oleh masyarakat Jawa di Yogyakarta pada saat itu. Tidak benar-benar ada yang mengetahui tentang peradaban busana di Yogyakarta pada paruh abad ke-18. Peristiwa Geger Sepehi pada 18-20 Juni 1812 benar-benar merenggut memori masyarakat Yogyakarta mengenai kemegahan budaya saat itu. Sejarah pun seolah-olah tercerabut pada periode tersebut, hingga kembali ditulis pada periode Sri Sultan Hamengku Buwono IV (1814-1822). Meski demikian, para sarjana Barat banyak melakukan pencatatan mengenai Yogyakarta melalui pengamatan antropologis. Di tahap ini hampir semua budaya material yang tertangkap pandangan mata ditulis, termasuk cara berbusana. John Crawfurd saat menjadi residen di Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi tidak disangka mencatat berbagai kebiasaan bangsawan Jawa dalam berbusana. Menurut Crawfurd, para bangsawan keraton merupakan pelopor dalam hal busana.

“Orang Jawa sebagaimana dalam hal-hal lainnya, menjadi pelopor dalam hal pakaian, dan oleh mereka kehalusan dan keroyalan diadopsi bahkan sampai berlebihan. Di samping yang mereka kenakan sehari-hari, mereka membagi pakaian pria ke dalam tiga gambaran, yang secara berturut-turut mereka namai rajaputran atau pakaian kerajaan, pisowanan atau pakaian istana, dan prajuritan atau pakaian perang. Yang pertama di pakai oleh sang raja pada kegiatan perayaan, namun bagi mereka dari kelompok rendahan, hanya ketika menjadi pengantin laki-laki. Yang kedua dipakai oleh orang-orang istana dalam acara istana, yang ketiga dipakai oleh mereka ketika mereka pergi ke luar negeri atau dalam perlajanan (Crawfurd, 2017: 141).

Crawfurd menambahkan bahwa dalam pakaian kerajaan atau istana, bagian atas tubuh mereka terbuka, dan dibaluri oleh sebuah

kosmetik berwarna kuning, dan ornamen-ornamen emas yang sangat banyak dikenakan di lengan, pergelangan tangan, dada, dan kepala. Rambut panjang mereka kemudian digeraikan ke bawah, di atas punggung, digulung dengan longgar, dan menggunakan sebuah tutup kepala yang khas. Mereka (orang Jawa) tidak pernah memakai mutiara atau batu permata, kecuali sebagai cincin di jari tangan. Ornamen-ornamen perak dikenakan dengan sedikit penghargaan. Sementara emas dipakai dalam bentuk cincin di jari, gelang, subang, dan plat untuk dada dan dahi, namun sebagian besar dari perhiasan ini hanya dipakai saat perayaan. Perihal bagian-bagian ekstrinsik pakaian seperti keris tidak boleh diabaikan. Senjata ini selalu dikenakan oleh semua pria, apapun pangkatnya, baik yang berpakaian maupun yang bajunya dilepas. Pada pakaian pesta 2 buah keris terkadang dikenakan bersamaan, dan ada kalanya 3 bahkan 4 buah keris sekaligus. Ada akalanya sarung kayu keris tersebut tidak memiliki penutup, dan semakin meningkat pangkat serta kekayaan si pemilik, maka ia akan terbuat dari tembaga, perak, suasa, emas murni, dan dari set logam dengan berlian. Di antara benda-benda yang berkaitan dengan pakaian, terdapat pula kotak sirih, dan payung yang disesuaikan dengan kualitas atau warnanya. Rupanya warna dan kualitas payung²⁶ bagian dari tanda utama atau tingkat jabatan kebangsawanan²⁷.

26 Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II, payung yang digunakan oleh sultan disebut payung kemasan atau seluruh bagian payung berwarna emas. Sementara permaisuri, anggota keluarga kerajaan, keluarga permaisuri, dan selir dari kerabat kerajaan menggunakan payung berwarna putih. Para pejabat setingkat bupati dan tumenggung menggunakan payung berwarna hijau dengan diberi pinggiran warna emas. Sedangkan pejabat bergelar (h)anggabei, ranga, mantri, dan setingkatnya menggunakan payung berwarna merah. Pada hirarki pejabat setingkat kepala desa dan para pemimpin golongan rendah menggunakan payung berwarna gelap (Raffles, 2014: 212).

27 Di antara orang-orang Jawa, baik laki-laki maupun perempuan senang menumbuhkan rambutnya. Ini bahkan menjadi pusat perhatian utama di antara kaum perempuan, yang mengikatnya dalam sebuah buhul di belakang kepala, disebut galung (gelung). Dalam baju pesta, rambut dijalin dengan bunga-bunga, yang digembungkan sehingga ukurannya besar. Rangkaian



Gambar 7. Javaanse edelman begeleidt door bediende met pajoeng 'Bangsawan Jawa didampingi oleh abdi dengan payung' karya Clercq, J.H.W.le. tahun 1845 (Sumber: KITLV).

Dari berbagai sumber, kerap disebutkan bahwa kebudayaan Jawa banyak mengadopsi tradisi India, begitu pula dengan tata dan corak busananya. Perihal ini justru ditepis tegas oleh Raffles. Di dalam tulisannya berjudul *History of Java*, dinyatakan bahwa penduduk Jawa berpakaian lebih baik dibanding penduduk di India barat. Para penguasa biasanya membutuhkan banyak kain kemeja²⁸, beludru, dan kain jenis lain untuk membuat jaket, celana pantalon, dan pakaian lain meniru gaya Eropa. Para penduduk Jawa pun memiliki kebiasaan untuk berbusana rapi, sebab pakaian yang kotor merupakan suatu

bunga bundar, dalam kesempatan tersebut, digantungkan dari telinga dan bagian-bagian lain di kepala. Bunga yang dipakai dalam memen tersebut dialah melati dan cempaka, yang mana keduanya ini, di Jawa, di daerah sekitar kota-kota besar ditanam secara luas untuk tujuan itu Crawford, 2017: 141-143).

- 28 Raffles memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi busana daerah di Keraton-keraton Jawa. Kemeja yang dimaksud dalam hal ini adalah surjan atau busana dengan potongan sejenis dan berbahan lebih tipis. Sementara jaket merupakan identifikasi untuk busana kebesaran berbahan beludru dengan sulaman benang emas di setiap pinggirnya.

aib. Banyak penduduk Jawa yang berlomba-lomba membuat pakaian mewah untuk digunakan dalam upacara tertentu. Meskipun sebagian besar pakaian penduduk tergolong sederhana, namun mereka tampak menyukai gaya orang Eropa. Hal ini dibuktikan ketika beberapa pegawai Kolonial berkunjung ke propinsi pedalaman, mereka disambut oleh para pejabat lokal yang mengenakan topi berbulu dan stoking ala orang Eropa (Raffles, 2014: 52).

Raffles dalam pengamatannya juga menyebutkan bahwa di kalangan bangsawan terdapat tingkatan kelas sosial yang membuat adanya perbedaan dalam cara berpakaian. Beberapa pakaian hanya diperbolehkan untuk keluarga bangsawan, sementara beberapa pakaian lain dapat digunakan oleh pekerja istana maupun penduduk local. Selain pakaian yang dikenakan sehari-hari, ada dua pakaian khusus bagi orang-orang Jawa yaitu pakaian perang dan pakaian upacara. Pakaian perang terdiri dari celana yang terkancing dari pinggang sampai mata kaki. Sementara itu terdapat istilah "katok" yang berupa celana pendek sampai bawah lutut, terbuat dari kain halus atau sutra. Ada pula "amben" atau sabuk yang diikat mengelilingi tubuh sebanyak 7-8 kali putaran untuk melindungi tubuh dari lengan sampai pinggang. Sabuk ini terbuat dari sutra atau kain dengan kualitas yang sangat baik. Pakaian perang ini dilengkapi dengan rompi ketat tanpa kancing yang disebut *sangsang*. Di atasnya ada rompi dengan kancing yang dimulai dari leher sampai perut dan ditutup dengan siku atau sikepan yang mirip seperti jaket panjang penutup tubuh. Penutup muka atau tudung dipakai beserta sandal atau sepatu. Tali pedang atau *angger* diikat dipinggang, dan pedang ditaruh di sisi kiri sabuk. Tiga bilah keris diletakkan di kanan dan kiri pinggang dan satu di belakang (Raffles, 2014: 52; 58). Raffles benar-benar mencatat dengan detil terhadap busana para punggawa keraton. Dia menempatkan dirinya sebagai pengamat yang lugu sehingga mendeskripsikan bagian demi bagian secara rinci. Secara antropologis, Raffles pun mengetahui bahwa deskripsi pakaian tersebut sebagai pakaian perang merupakan representasi dari superioritas dari

pemakainya. Menurut Raffles, terkadang ada cincin dan perhiasan yang digunakan pula sebagai pelengkap.

Berbeda lagi busana yang dikenakan dalam upacara resmi atau upacara pernikahan. Biasanya para bangsawan atau pembesar di Jawa tidak menutup tubuh bagian atas mereka. Lengan, tangan, tubuh atas sampai pertengahan perut dibiarkan terbuka begitu saja. Lilitan kain dimulai dari pinggang ke bawah. Celana dan hiasan kepala nampaknya difungsikan sebagai pakaian tambahan. Terdapat satu aturan busana bagi para punggawa keraton yang dituliskan oleh Raffles. Jika hendak bertemu pangeran, mereka harus mengenakan celana dari sutra atau kain halus tanpa kancing yang dibalut dengan "dodot". Sabuk berenda emas serta kuluk penutup kepala menjadi kelengkapan penting yang harus dikenakan. Keris serta wedung, semacam pisau kecil yang dikenakan bersamaan dengan cara diselipkan pada sisi luar kain (Raffles, 2014: 58). Dari uraian Raffles, penduduk Jawa tidak dimungkirkan memiliki peradaban busana yang begitu kompleks. Tata aturan dan penggunaan busana pun sudah diatur sedemikian rupa. Narasi ini memberi gambaran jelas tentang kemapanan budaya berbusana yang ditunjukkan oleh orang Jawa dan Yogyakarta pada abad ke-19 awal.



Gambar 8. Litografi model pakaian atau seragam perang Jawa tempo dulu menurut Raffles dalam *History of Java*.
(Sumber: Wikimedia.org)



Gambar 9. Litografi pakaian kebesaran adat Jawa di lingkup pengadilan menurut Raffles dalam History of Java. (Sumber: Wikimedia.org)

Catatan Crawford dan Raffles selanjutnya memicu dalam menelusuri arsip busana dari sumber-sumber primer keraton. Data dari Perpustakaan Nasional Inggris mengenai 75 naskah koleksi Keraton Yogyakarta yang sempat dijarah saat peristiwa Geger Sepahi membuka satu per satu cakrawala busana akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pembacaan data-data tersebut seperti halnya kunci-gembok dari ulasan yang ditulis oleh Raffles. Pada periode tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I telah menuliskan arsip busananya secara rinci. Aturan-aturan busana ini kemudian dilengkapi dengan protokol khusus dalam setiap jamuan.

Mengenai aturan busana, di dalam arsip keraton tahun 1788²⁹ tercatat dokumentasi busana yang menyebutkan bahwa sultan dan

29 The order list the clothes (prajuritan-fighting dress) which are to be worn by Sultan Hamengku Buwana I and the Yogya Crown Prince (the future HB II), the uniform of court officials and members of the royal family, the placing of court regiment and the order of carriages occupied by Yogya princes who are to go out meet the Governor (Archieve of Yogyakarta, (BL Add. MS. 12303), (Carey, 1980: 159).

putra mahkota mengenakan busana prajuritan saat menjemput Tuan Ideler Jan Grefe³⁰ menuju ke Pesanggrahan Resanegaranwilayah yang kini dikenal dengan Yogyakarta wonten ing dhusun Kabanaran lajeng damel pesanggrahan wonten ing Giyantipura” dan s pada hari . Arsip ini merujuk pada tokoh Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Raden Mas Sundoro sebagai tuan rumah di Yogyakarta dalam jamuan yang digelar pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 1788³¹.

Kanjeng Sinuhun angagem prajuritan, alancingan baludru cemeng lugas, pinasih ing kencana, tinaretas ing inten, boten mawi mojah, angagem rasukan baludru cemeng lugas, angagem songkok cemeng geherusan, baten mawi renda, apanunggul kencana, tinaretas ing inten, mawi garudha mungkur kencana, angagem curigan sabet// wondening Kanjeng Gusti, inggih ngagem prajuritan, alancingan baludru wungu lugas, pinasih ing kencana, tinaretas ing inten, boten mawi mojah, angagem rasukan baludru wungu lugas, angagem songkok cemeng geherusan, mawi renda, apanunggul kencana, tinaretas ing inten, inggih angagem curiga sabet’ (Archive of Yogyakarta 1788, f. 125r)³².

-
- 30 Jan Greeve (1787-1791) menggantikan Johannes Siberg (1780-1787) sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, di Semarang, sejak September 1787. Greeve dinilai lebih perseptif dan lebih andal, meski belum tentu lebih jujur. Saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta pada 5 Agustus 1788, Greeve mendapatkan penerimaan yang kurang menyenangkan dibandingkan kunjungannya ke Surakarta dan Mangkunegaran. Dua barisan prajurit Yogyakarta dalam upacara penerimaan Gubernur tersebut, melepaskan tembakan penghormatan yang seharusnya diarahkan ke udara tetapi justru diarahkan ke kereta orang-orang Belanda tersebut. Tentunya di dalam setiap senapan prajurit tersebut tidak terdapat peluru, sebab Gubernur pastinya akan mati (Ricklefs, 2002: 466; 476).
- 31 Punika pemut saweg tindak-Dalem amethuk Tuwan Ideler Jan Grefe, dhateng ing pasanggrahan Resanegaran, amarengi ing dinten Selasa tanggal ping kalih, sasi Dulkangidah wanci pukul pitu, ing taun Jimakir angkaning warsa 1714 (Selasa, 5 Agustus 1788) (Carey, 1980: 160).
- 32 Pada tradisi berbusana di keraton terdapat konvensi yang disepakati terkait dengan hiasan pada busana bagian atas bagi laki-laki. Apabila semakin tinggi golongan atau strata kebangsawanannya, maka busana yang dikenakan

Terjemahan:

Kanjeng Sinuhun mengenakan (busana) prajuritan, bercelana beludru hitam polos, dihias emas, bertakhta berlian, tanpa mengenakan kaos kaki, mengenakan busana beludru hitam polos. Mengenakan (pula) songkok hitam halus, tanpa renda, dengan penunggul emas bertakhta intan, lengkap dengan hiasan garudha mungkur emas, mengenakan keris berjenis sabet. Begitu pula Kanjeng Gusti (putra mahkota) juga mengenakan busana prajuritan, bercelana beludru ungu polos, berhiaskan emas dengan intan, tanpa mengenakan kaos kaki, mengenakan busana beludru ungu polos. Mengenakan songkok hitam halus dengan renda dan penunggul emas bertakhta intan, mengenakan keris berjenis sabet.

Di dalam Babad Ngayogyakarta (S110/SK.113) koleksi Museum Sonobudoyo, disebutkan pula busana prajuritan yang dikenakan oleh putra mahkota, calon Sultan Hamengku Buwono II saat melakukan kunjungan kerajaan ke Surakarta pada tahun 1763 dan 1765. Pada kunjungan tersebut, Sultan Hamengku Buwono I bermaksud menjodohkan putra mahkota dengan putri Sunan Paku Buwono III sebagai bagian dari perkawinan politik kerajaan³³. Pada kunjungan tersebut, penggambaran busana putra mahkota begitu mengagumkan, dengan deskripsi busana yang begitu mewah.

semakin polos. Aturan tersebut secara oral turun-temurun hingga saat ini, namun pada arsip Yogyakarta tahun 1788 justru telah dibuktikan bahwa putra mahkota Kanjeng Gusti mengenakan busana berhias renda, sementara sultan berkebalikan.

- 33 Tujuan utama dalam kunjungan tersebut adalah untuk menjalin hubungan baik antar kerajaan di Jawa, sekaligus menyatukan kembali keraton Mataram yang terpisah sebagai konsekuensi dari Perjanjian Giyanti. Namun, upaya tersebut gagal karena adanya campur tangan Adipati Mangkunegoro I sebab menginginkan putri yang sama (Marihandono, 2008: 28).

Dhestar sawat cumengkiran, atudhung bludru muksyani, grudha marep sisihnnya, garudha mungkur ing wuri, samya emas rinujit, tinatrap inten her mancur, utah-utah garudha, kencana retina rinukmi, pan sinoty ing inten gegaja abra. [...] sampun ngagem cenela sinulam retina (Babad Ngayogyakarta, Sinom II: 4-6)³⁴.

Terjemahan:

Dhestar penutup kepala bermotif sawat cumengkiran, ditumpuk dengan topi beludru gelap, hiasan garuda menghadap sisinya, garudha mungkur di belakang yang dihias dengan emas bertakhta berlian yang berkilau. (Sang Pangeran) sudah mengenakan selop yang disulam dengan emas.

Merujuk dari arsip busana berangka tahun 1788, masyarakat meyakini Yogyakarta pada saat itu telah memiliki budaya yang tinggi. Meski demikian, tidak ada banyangan mengenai rerupa busana tahun-tahun tersebut. Arsip litografi pun tidak cukup jelas merekap detail-detail busana. Kemudian sejak masuknya teknologi fotografi di Yogyakarta, busana yang disebut dengan istilah “prajuritan” ini mulai terdokumentasikan secara visual. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono VI (1855-1877) memberi kepercayaan Simon Willem Cemerik untuk memotret para bangsawan keraton. Ia merupakan seorang pelukis sekaligus fotografer yang tinggal di Yogyakarta sejak tahun 1861. Cemerik kemudian meninggalkan Yogyakarta sekitar tahun 1871. Semasa di Yogyakarta, ia melatih seorang pribumi yang kemudian menjadi sangat terkenal, Kassian Cephas.

34 “lubang kancing bersulam emas yang indah, besar, ketat, indah, dijalin permata yang menyala, semua intan mutiara. Cincinnya dua, masing-masing bermutiara kembar semua. (Pangeran mengenakan) penutup kepala bermotif sawat cemukiran, bersongkok beludru muksyani dengan hiasan burung garuda menghadao salah satu sisinya, ya garudha mungkur di belakang yang ditatah intan bagai air mancur tumpah. Garuda ditatah emas (dengan) intan yang ditata. Ditatah intan gegaja yang menyala. [...] Pangeran mengenakan selop bersulam emas” (Babad Ngayogyakarta, Sinom II: 4-6), koleksi Museum Sonobudoyo, kode SK 113.



Gambar 10. Dokumentasi busana prajuritan yang dikenakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VI (Sumber: KITLV).

Mengenai aturan busana prajuritan, ditemukan kembali arsip yang mencantumkan busana tersebut pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Arsip dengan angka tahun lebih muda ini mempertegas adanya kesinambungan budaya, terutama perihal busana yang menjadi penanda dalam berbagai aspek. J.L. Moens, seorang insinyur yang menaruh perhatian khusus terhadap Budaya Jawa menulis catatan mengenai busana tersebut dalam arsip berjudul *Platenalbum Yogyakarta, No. 26-29: Kleding en Staatsie*. Moens menjelaskan bahwa busana prajuritan merupakan busana seremonial yang dikenakan oleh Sultan sekaligus putra mahkota ketika menjamu residen atau gubernur jenderal Belanda saat kunjungan ke Yogyakarta³⁵.

35 Merujuk pada arsip *Platenalbum Yogyakarta, No. 26-29: Kleding en Staatsie* yang dibuat atas nama Ir. J.L. Moens, koleksi Museum Sonobudoyo (T15/ PBE 38) (Behrend, 1990: 626).

Wonten ugi pangageming wangkingan wujud kalih, sarta pangagemipun ugi warnikalih, inggih punika, sanajan panjenengan dalem Nata, manawi pinuju busana kapraban prajuritan, dalah dumugi para bendara pangeran, sarta para Bupati, inggih punika ingkang dipunwastani prajuritan wau manawi methuk rawuhipun kangjeng Tuwan Gupernur, sarta manawi miyos kirap dalem (Platenalbum Yogyakarta, hal 2)³⁶.

Terjemahan:

Ada lagi dua busana yang mengenakan keris, serta dua busana lain yang dikenakan Sultan. (Sultan) mengenakan busana kebesaran 'keprabon' prajuritan, demikian juga para bendara pangeran, serta para Bupati. Itulah yang dimaksud dengan (busana) prajuritan tadi digunakan jika menjemput kedatangan Tuan Gubernur serta saat Sultan keluar dan melakukan prosesi kirab.

Berdasarkan arsip Moens, berikut dokumentasi busana prajuritan yang dikenakan oleh sultan kedelapan saat melakukan kunjungan ke kantor Residen Yogyakarta maupun saat menjemput residen Belanda di stasiun kereta Yogyakarta³⁷.

36 *Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, punapa dene kirap dalem, ingkang sinuwun ingkang kawastanan prajuritan wau, agem dalem, ngangem makuta berci cemeng, awangun songkok, rasukan sikepan cemeng, agem dalem kamus dhawah sakjawining rasukan, nyampingan sapit urang, lancingan panji-panji, baludru cemeng, ngagem mojah cemeng, sepatu cemeng, punika agem dalem wangkingan (dhuwung) 2 iji, ingkang kasengkelit satunggal wangun warangka branggah, ingkang dipunagem anggar satunggal wangun warangka gayaman, karonyok panggenan sarungan ingkang sasisih, ingkang dipunwastani nganggar wau gumandhul dhawah sairingan asta kiwa, ingkang dipunsangkelit dhawah sairingan asta tengen*lain yang dikenakan Sultan. (Sultan)rosesi kirab.(busana) prajuritan tadi digunakan jika menjemput kedatangan Tuan Gubernur sertlain yang dikenakan Sultan. (Sultan)rosesi kirab.(busana) prajuritan tadi digunakan jika menjemput kedatangan Tuan Gubernur sert

37 Dokumentasi digital Perpustakaan Universitas Leiden juga merekam visual Sultan Hamengku Buwono VI dengan busana prajuritan diperkirakan tahun



Gambar 11. Sultan saat berada di stasiun kereta Yogyakarta bersama pejabat tinggi Belanda, antara tahun 1935. (Sumber: KITLV).



Gambar 12. Kunjungan sultan ke kantor residen didampingi oleh asisten residen Christiaan Abbenhuis, antara tahun 1938. (Sumber: KITLV).

Melihat perjalanan pengarsipan busana di Keraton Yogyakarta, secara diakronis menandai bahwa Yogyakarta sebagai negara baru pada tahun 1755 telah memiliki peradaban yang begitu mapan. Pangeran Mangkubumi yang memboyong berbagai kebudayaan Mataram Islam dari leluhurnya menjadi cikal-bakal dari kebudayaan baru di tanah Mentaok. Raffles mengamini perihal peradaban ini, terutama pada tata busana yang begitu beragam. Pada sebuah acara resmi, kebiasaan menggunakan sarong atau jarit berubah menjadi kain dodot, sebuah kain yang kedua sisinya disatukan, namun dalam kelengkapan busananya tidak menggunakan pakaian. Kain dodot menurut Raffles terbuat dari sutra atau katun dengan ukuran lebih besar (Raffles, 2014: 53-54).

1865. Pada keterangan visual foto yang diabadikan oleh Camerik, busana prajuritan disebut pula sebagai busana gala (pesta) yang selalu digunakan oleh sultan yang menghadiri undangan perayaan di istana residen.

Busana dodot kemudian banyak dijumpai sebagai bagian dari busana para putra sentana dan bupati mantri. Di dalam arsip tahun 1788, tertulis bahwa putra dari kerabat istana dan abdi dalem berpangkat bupati mengenakan busana *bebasahan* berkampuh dan busana sikepan³⁸. Busana kampuh agaknya menempati posisi khusus dalam tata busana di keraton. Pada beberapa arsip busana, penyebutan kampuh sebagai gaya penggunaan kain penutup tubuh bagian bawah kerap ditemukan. Kampuh merupakan kain dodot 'kain bermotif batik' yang terbuat dari sutra atau katun dengan ukuran 3 sampai 4 kali dari jarik. Potret bupati dan pejabat istana di Jawa tahun 1800an dengan kampuh dan jarik divisualkan seperti halnya lukisan koleksi Rijks Museum di Belanda.



Gambar 13. Busana resmi dari Keraton Jawa yang menunjukkan pangkat sekaligus status bangsawan dalam penggambaran orang Eropa pada saat itu. (Sumber: Rijksmuseum.nl)



Gambar 14. Busana resmi pejabat istana di Jawa antara tahun 1820-1870 dalam penggambaran orang Eropa pada paruh abad ke-19. (Sumber: Rijksmuseum.nl)

38 'wondening putra-putra sentana, punapa dening Bupati Mantri, sami bebasahan sedaya, sami rasukan sikepan' (Carey, 1980: 160). Istilah bebasahan merujuk pada busana kebesaran 'panganggo keprabon' dengan kain dodot atau kampuh serta kuluk (Poerwadarminta, 1939: 32).

Pengarsipan busana, baik dari segi arsip tertulis maupun arsip visual membawa narasi tentang upaya pelestarian kebudayaan yang terjadi selama 20 dasawarsa terakhir. Di samping tata busana, rupanya kebiasaan-kebiasaan yang menyertai para bangsawan ini tidak bisa dilepaskan dari narasi utuh tata rias. Para pria Jawa sejak abad ke-18 dideskripsikan oleh Raffles tidak pernah memotong rambutnya, begitu pula para perempuan Jawa. Mereka membiarkan rambutnya panjang alami. Para laki-laki biasanya melingkarkan rambut mereka di sekeliling kepala dan menguncinya dengan sisir sirkam di bagian depan. Akan tetapi, potret ini tidak terjadi ketika mereka menghadap pada atasan dengan status sosial tinggi. Mereka terlihat membiarkan rambut ikalnya terurai (Raffles, 2004: 56).

Di sisi lain, para perempuan Jawa begitu memperhatikan rambut panjang mereka. Mereka biasanya memberikan minyak cendana maupun bunga-bunga atau perhiasan seperti penjepit dari emas dan berlian pada rambut yang sudah dilingkarkan. Rambut panjang yang melingkar ini pada tahun-tahun ini masih relevan digunakan sebagai bagian dari tata rias. Namun, perempuan saat ini cenderung menggunakan rambut imitasi untuk menggantikan rambut panjangnya yang dilingkarkan. Mereka menyebut tata rias rambut ini sebagai sanggul, dan banyak dijumpai sebagai kesatuan utuh dalam penggunaan busana adat.

Industri Kain dan Busana bagi Raden Ayu

Pada bab sebelumnya disebutkan bahwa tradisi busana di Jawa telah ditemukan bahkan semenjak abad ke-8. Catatan Groeneveldt menarasikan bahwa Maharaja di Jawa telah mengenal peradaban berbusana pada tahun 992. Kain sutra berwarna-warni, kain dari kapas, dan beraneka ragam perhiasan merupakan sebagian kecil dari narasi kekayaan dari sang Maharaja. Kain sutra di Jawa memang tidak dipungkiri menjadi komoditi di kalangan bangsawan dan para

pembesar. Kain-kain ini kemudian menjadi penanda tersendiri dari kemajuan industri manufaktur dari suatu masyarakat. Keberadaan produk pakaian yang dihasilkan di Jawa seiring waktu terus berkembang, baik dari segi kenyamanan maupun keindahan. Bahan baku yang semula hanya ulat sutra dan kapas, berkembang entah dari bulu binatang, wol, maupun kulit. Akan tetapi, di Jawa pada awal abad ke-19, domba-domba sudah banyak kehilangan bulu wol mereka sehingga tidak bisa digunakan. Sementara itu, budidaya ulat sutra tidak selalu berhasil. Pilihan utama dan paling tersedia saat itu adalah kapas sebagai bahan utama pakaian masyarakat Jawa. Kapas-kapas di Jawa kemudian dibersihkan dan dipintal menjadi benang. Proses mengubah biji kapas menjadi benang ini bukan perkara mudah. Di sinilah kemahiran masyarakat di Jawa yang menguasai teknik tersebut sehingga mampu membuat produksi pakaian tidak pernah terkendala (Raffles, 2004: 105-106).

Benang-benang yang sudah siap tadi kemudian ditenun dan dikenal dengan nama kain katun. Kain katun ini nantinya berubah lagi menjadi batik sebagai busana yang dikenakan oleh masyarakat dalam berbagai level. Batik merupakan kain katun yang diwarnai setelah ditenun, sementara benang-benang kapas yang diwarnai lebih dulu sebelum ditenun disebut lurik atau lurik ginggang (Raffles, 2004: 106). Motif tenun pada lurik kemudian banyak mengadopsi motif- dari India Barat yang dikenal dengan nama patola. Di Jawa, patola dimanifestasikan sebagai ragam hias geometris pada tenun seperti stilisasi bunga-bunga. Tenun patola inilah yang kemudian berkembang menjadi kain cinde (Maziyah, 2020: 25-27). Motif cinde kemudian berkembang seperti halnya yang terdokumentasi dalam naskah Bab Sinjang (KBG 555) koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Disebutkan di dalam naskah tersebut setidaknya terdapat

9 motif cinde, yaitu cinde sekar, cinde jonggrong, cinde gopok, cinde sarilaya, cinde jlamprang, cinde wilis, cinde gimaran, cinde cakar, cinde sulam, dan cinde mawar (Nugraha, 2016: 149-150). Penggunaan cinde saat ini masih lestari di Yogyakarta, namun motif yang digunakan hanya motif cinde cakar saja.

Perihal cinde sebagai komoditi tenun tidak hanya terjadi belakang ini. Pada periode awal pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I, kain cinde telah digunakan sebagai media diplomasi raden ayu. Tentu saja, para raden ayu ini membeli cinde dalam jumlah besar dan disimpan di kediaman mereka masing-masing. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan keraton ini bukan tanpa alasan. Di samping sebagai perekat hubungan harmonis dengan Pemerintah Kolonial, cinde-cinde tersebut digunakan sendiri sebagai bagian dari tata busana dalam upacara kebesaran. Pemerintah Kolonial rupanya juga melakukan hal yang sama. Dalam menjaga hubungan harmonisnya dengan kerajaan baru di Yogyakarta, para istri gubernur atau residen kerap memberikan hadiah kain kepada raden ayu. Hubungan diplomasi ini, tidak hanya diperankan oleh Sultan dan pangeran, melainkan juga para permaisuri dan kerabat perempuan atau para raden ayu.

Raden Ayu memiliki kedudukan penting dalam diplomasi dua kekuasaan besar di Jawa. Mereka banyak menggunakan busana sebagai media diplomasi, seperti halnya para Kanjeng Ratu dan Raden Ayu pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I. Mereka mendapatkan busana berupa gulungan sutra cindhe, kain sembagi encit atau kain bermotif bunga, serta gulungan renda penghias busana dari Nyonya van den Burgh. Arsip Yogyakarta yang ditulis tahun 1772 menyebutkan nama sekaligus rincian busana apa saja yang diterima.

Serat Mungel gunggung Tuwan Mipro pan der Bureh, kintun³⁹
wawangsulun kunjung Kangjeng Ratu-ratu Raden Ayu sadaya

Ingang kunjuk Kangjeng Ratu Kencana

*inggang awarni cindhe satunggil,
wah pungtas satunggil, corak Toyamas,
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah sembagi satunggil,
wah encit satunggil,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang kunjuk Kangjeng Ratu Kadospaten

*inggang awarni cindhe satunggil,
wah pungtas satunggil, corak Toyamas,
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah sembagi satunggil,
wah encit satunggil,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang katur Kangjeng Raden Ayu Adipati inggang Sepuh

*inggang awarni pungtas satunggil, corak Toyamas,
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah sembagi satunggil,
wah encit satunggil,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang katur Kangjeng Raden Ayu Dipati inggang Anem

*inggang awarni pungtas satunggil, corak Toyamas,
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah sembagi satunggil,
wah encit satunggil,
wah rinda pethak sadasa elo.*

39 Surat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I mengenai pemberian kain sebagai hadiah antara permaisuri dan raden ayu di keraton. Arsip tersebut tersimpan di British Library, berangka tahun 1772 dan masih ditulis dalam aksara Jawa serta berbahasa Jawa.

Ingang katur Kangjeng Ratu Bendera

*inggang awarni encit kakalih
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang katur Raden Ayu Ngabehi

*inggang awarni encit kakalih
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang katur Raden Ayu Jayaningrat

*inggang awarni encit kakalih
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang katur Raden Ayu Demang

*inggang awarni encit kakalih
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang katur Raden Ayu Danukusuma

*inggang awarni encit kakalih
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Ingang katur Raden Ayu Mangundirja

*inggang awarni encit kakalih
wah pipa mas kakalih,
wah pipa salaka kakalih,
wah rinda pethak sadasa elo.*

Begitu pula sebaliknya, para Kanjeng Ratu dalam beberapa arsip tercatat memiliki buah tangan khusus yang disiapkan untuk istri Gubernur Jenderal saat kunjungan ke Yogyakarta. Pada kunjungan kedua Ideler Jan Greeve tahun 1791, Kanjeng Ratu Bendera juga memberikan cinderamata kepada Nyonya Greeve berupa batik besar,

kain mori delapan pasang, sapu tangan batik delapan pasang lengkap dengan minyak wangi. Pada Oktober 1769, ketika kunjungan Ideler Setranten ke Yogyakarta, Kanjeng Ratu Kedhaton dan Kanjeng Ratu Anem juga menyiapkan cinderamata khusus yang diberikan kepada Nyonya Setranten berupa batik berukuran besar dan kain semekan dari mori. Pada periode yang berbeda, Kanjeng Ratu Kencana, permaisuri Sultan Sepuh juga mendapat cinderamata dari Kapitan Kursiya, seorang kapitan pemilik kapal yang ditumpangi sang ratu dalam perjalanannya menuju Saparua. Dituliskan dalam Babad Matawis bahwa Kapitan Kursiya memberi sang ratu satu gulung kain encit dan sapu tangan saat berada di atas kapal⁴⁰. Di samping emas, berlian, atau batu mulia, kain nampaknya memiliki tempat tersendiri sebagai buah tangan antar 2 entitas besar Jawa dan Belanda.

40 *Jěng Ratu Kěncana mulya/ sawěg wontěn baita/ děkěti sura pringgeku/ tuwan Kapitan Kursiya// Nyaosi dhatěng sang dewi/ sagulung ěncit arupa/ sagulung usap tangane* (Babad Matawis, Asmaradana: XX-XXI).

ATURAN BUSANA PARA BANGSAWAN

*Ministĕr kĕdah busana/ angagĕma kang montering/ sangking
Nagri Wĕlandi/ punika pĕparingipun/ Maharaja Nedĕrlan/ dene
warnine montering/ topi cĕmĕng binaludir ing kĕncana// Lan
rasukan kang rinĕngga/ baludir mas pinalisir/ ing jangga dumugi
jaja/ lambung asta kanan kering/ kancing kru mas ciniri/
(Babad Ngayogyakarta, Sinom I: 12-13)*

Minister haruslah berbusana, mengenakan yang diberikan oleh Negara Belanda, ya pemberian dari Maharaja di Nederlan. Begitu pula warnanya senada, topi hitam dibordir emas. Demiki juga busana yang dihias bordiran emas pada tepinya di garis leher hingga dada, bagian lambung, tangan kanan dan kiri (pula).

Pembahasan busana tidak terlepas dari aturan-aturan yang menyertainya. Masyarakat Jawa yang berprofesi petani kebanyakan menggunakan motif tartan. Sementara itu, para bangsawan lebih memilih menggunakan batik yang motifnya diadaptasi dari flora atau fauna sekitar melalui tahap stilisasi. Batik kemudian dipadukan dengan tata busana tertentu yang dipahami sebagai kesatuan busana adat. Busana adat secara definisi merupakan busana yang turun temurun dipakai oleh kelompok masyarakat pada zamannya, dengan ciri-ciri yang menunjukkan budaya lokal. Busana adat senantiasa berkembang selaras dengan perkembangan kebudayaan. Pengembangan busana adat juga dilakukan di Yogyakarta setelah Perjanjian Jatisari, 15 Februari 1755. Yogyakarta memiliki corak tersendiri atas busana yang dikenakan oleh para bangsawan (Condrongoro, 1995: 9-11).

Melihat kecenderungan saat ini, busana adat hanya dipergunakan dalam upacara keraton yang sekaligus menandai suatu simbol identitas pemakainya. Identitas dalam hal ini bukan hanya strata sosial atau tingkat jabatan, tetapi juga perihal hak dan kewajiban pemakainya (Condrongoro, 1995: 21). Aturan busana tersebut nampaknya menjadi perhatian dari Sri Sultan Hamengku Buwono II. Di awal masa pemerintahannya, aturan penggunaan busana di lingkungan keraton cukup ketat. Arsip Yogyakarta tahun 1798 menyebutkan bahwa sultan mengatur tata busana yang meliputi: aturan busana kebesaran, aturan hiasan pada warangka keris, aturan cincin dan kancing pada busana, aturan hiasan pada epek anggar keris, aturan motif pada kain batik dan kampuh, hingga aturan ornamen ebeg atau pelana kuda. Aturan busana ini dikeluarkan secara resmi di bawah pertanggungjawaban Patih Danureja I terkait penggunaan keris dan busana kebangswanan bagi kerabat keraton⁴¹. Mengenai aturan motif pada batik dan kampuh,

41 'punika pemuat amemuti awisan-Dalem ingkang boten kalilan kagem putra sentana, kalih ingkang kalilan kagem, sarta mawi pratondha capipun Kanjeng Rahaden Adipati Danureja, kagadhahaken Rahaden Tumenggung Sumadiningrat'

disebutkan motif sawat, parang-rusak⁴², dan huk merupakan motif larangan.

ing kang awarni sinjang, putra sentona ing kang baten kalilan ngagem, batik sawat, bathik parang rusak, bathik huk, senajan dhawaha ing kampuh dhawaha ing dhestar kasemekan inggih boten kalilan ngagem, [...] kajawi sangking punika putra sentona kalilan ngagem, punapa dening kampuh bango-tulak kampuh lisah teleng putra sentona boten kalilan ngagem, yen dhawaha dhestar utawi kasemekan kalilan putra sentona ngagem (Archive of Yogyakarta 1798, f.206v).

Terjemahan:

Dalam bentuk kain jarik, yang tidak boleh dikenakan oleh kerabat putra (yaitu) motif batik sawat, parang rusak, huk, meski berupa kain kampuh, penutup kepala, atau kain semekan juga tidak diperkenankan. Kecuali motif ini, kerabat putra boleh diperkenankan menggunakan. Begitu juga kain kampuh bango-tulak, kampuh lisah teleng, kerabat putra tidak diperkenankan memakai, meski dalam bentuk penutup kepala atau kain semekan, baru boleh dikenakan.

Berselang 3 tahun dari aturan busana pertama, Sri Sultan Hamengku Buwono II kembali mengeluarkan aturan busana pada 9 Februari 1801. Di dalam aturan kedua ini, secara detil Sultan menambahkan motif batik yang menjadi larangan untuk digunakan kerabat keraton dan abdi dalem, termasuk abdi dalem Kadipaten.

Arsip Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono II di bawah pengawasan dari Patih Danureja I, ditandai dengan cap resmi patih yang ditujukan kepada Raden Tumenggung Sumadiningrat, Arsip tersebut bertarikh hari Senin, tanggal 24, bulan Syam 1724 atau 12 Maret 1798.

- 42 Motif batik parang-rusak dan batik sawat merupakan batik yang biasa digunakan oleh raja. Coraknya berbeda dengan jenis batik lainnya, terutama pada pola hias dan warnanya (Raffles, 2014: 108).

Aturan motif batik yang semula terbatas pada kain dan kampuh, pada aturan kedua ini ditambahkan aturannya dalam bentuk udheng atau penutup kepala bagi laki-laki.

[...] ingkang warni sinjang ingkang awisan, bathik sawat, sawarnine ingkang nama sawat awisan, bathik parang-rusak, bathik semen, bathik kawungsari, bathik udan-riris, bathik cumengkirang, bathik huk, bathik sembagen ombaking toya, udheng ingkang awisan, bathik sawat, samubarang sawat awisan, bathik semen, bathik huk, bathik udan-riris, bathik cumengkirang, samubarang bathik yen tengah mawi pethak awisan,

kampuh ingkang awisan, kampuh udan-riris sidhangan, kampuh cumengkirang, sawarnine bathikan ingkang mungel ing ngajeng wau punika, dhawaha punapa-punapa inggih awisan, kampuh sekaran ingkang awisan, kampuh bangun-tulak, kampuh lisah-teleng, dhawaha punapa-punapa bangun-tulak lisah-teleng awisan, senjata abdi-Dalem ing Kadospaten, yen ngangge iket bangun-tulak lisah-teleng baten kalilan, wondening abdi-Dalem Kaliwon sapenginggil, kalilan angangge udan-riris, semen modhang, kajawi saking udheng baten kalilan [...] (Archive of Yogyakarta 1801, f.106v).

Terjemahan:

Kain jarik yang (bermotif) larangan yaitu sawat, apapun bentuk motif sawat adalah dilarang, batik parang-rusak, batik semen, batik kawungsari, batik udan-riris, batik cumengkirang, batik huk, batik sembagen ombaking toya. Penutup kepala yang motifnya dilarang (adalah) batik sawat, apapun motif sawat, batik semen, batik huk, batik udan-riris, batik cumengkirang, apapun motif batik yang bagian tengahnya berwarna putih termasuk larangan.

Kain kampuh yang dilarang (yaitu) kampuh udan-riris sidhangan, kampuh cumengkirang (dan) berbagai batik yang disebut di

depan tadi, dalam bentuk apapun tetap dilarang. Kain kampuh sekarang dilarang, kampuh bangun-tulak, kampuh lisang-teleng, dalam bentuk apapun kedua motif kampuh tersebut merupakan larangan, meskipun abdi-Dalem di Kadipaten jika menggunakan penutup kepala tersebut juga tidak diperkenankan. Abdi-Dalem Kaliwon ke atas (baru) diperkenankan menggunakan motif udan-riris, semen modhang, kecuali ikat kepala, maka (lainnya) tidak diperkenankan.

Kedua arsip tahun 1798 dan 1801 begitu jelas merekam material kain yang digunakan untuk menjahit busana di Keraton Yogyakarta saat itu. Beludru, lurik, dan tenun cindhe⁴³ yang mulanya kain patola dari India digunakan sebagai material busana dengan berbagai nama. Sementara sejarah beludru sendiri diketahui muncul sejak masa pemerintahan Sunan Amangkurat II (1678-1703) atau Sunan Amangkurat Amral di Kartasura. Istilah amral yang menjadi gelar dari Amangkurat II diadopsi dari kata admiral yang merujuk pada busana laksamana prajurit Belanda⁴⁴.

*Ya ta sang Prabu Mangkurat/ wus angrasuk busana cara Wlandi/
akëkaos asëpatu/ rasukan lapis tiga/ bëlah jaja baludru/ rendanya
murup/ mojah singuji toya mas/ kina timang mas kinitir//*

-
- 43 *Cindhe* di Jawa awal mulanya berasal dari India, seperti halnya yang banyak disebutkan dalam sumber-sumber sejarah. Di dalam Kidung Harsawijaya istilah patola atau patawala menjadi busana yang cukup sering disebut sebagai busana. Sementara istilah Raffles menyebut kain tersebut dengan istilah chindi atau patole, yang deskripsinya merujuk pada motif kain sutra pada sabuk pengikat jarit atau kampuh (Raffles, 2014: 54).
- 44 Kedekatannya dengan VOC hingga kegemaran Sunan Amangkurat II mengenakan busana gaya Eropa membuat Sunan Amangkurat II disebut sebagai Amangkurat Amral. Di sisi lain, penobatannya sebagai banyak dibantu oleh VOC sehingga kerajaan yang dibangunnya disebut-sebut sebagai istana anak penjajah sebab segala kekuasaan dari Amangkurat II merupakan hadiah dari VOC (Saddhono, 2014: 3).

Terjemahan:

Demikianlah sang Prabu Mangkurat telah busana cara Welandi. (Ia) mengenakan kaos dan sepatu, bajunya lapis tiga dengan (model) belahan dada berbahan beludru. Rendanya menyala di kaos kakinya bagi lelehan air emas. (Berhias) timang emas kuna seperti emblem⁴⁵.

Mengenai busana para pembesar Jawa, pada periode 1811-1813, terdapat litografi menarik yang didokumentasikan oleh John Newman dalam bentuk lukisan cat air. Newman mengabadikan busana ini ketika Inggris berkuasa di Jawa (1811-1816) sebelum digantikan lagi oleh Belanda. Kekaguman Raffles dan kedua orang lainnya yaitu Colin Mackenzie dan Thomas Horsfield terhadap Bangsa Jawa membuat mereka banyak melakukan pendalaman terhadap alam dan kebudayaan tanah rempah ini⁴⁶.



Gambar 15. Javanese Officer 'Perwira Jawa' Dilukis oleh John Newman antara tahun 1811-1813, British Library. (repro: Gallop, 1995: 82).

-
- 45 Kutipan tersebut diambil dari Babad Kartasura, pupuh ke-3, tembang Pangkur bait ke-3.
- 46 Mackenzie merupakan seorang ahli ukur kepala India yang pertama. Pengetahuannya tentang sejarah dan peninggalan kuno India tidak perlu diragukan. Sementara Thomas Horsfield merupakan dokter Amerika yang tertarik mengunjungi Jawa sejak pertama kali tiba, pada tahun 1800. Tahun 1801, Horsfield kembali ke Jawa dan bekerja untuk pemerintah Belanda (Gallop, 1995: 10-15).



Gambar 16. Javanese Pike Bearers 'Angkatan Tombak' Dilukis oleh John Newman antara tahun 1811-1813, British Library. (repro: Gallop, 1995: 83).

Dari beragam busana yang tercatat di dalam arsip tulis maupun visual, batik memegang peran penting sebagai kelengkapan busana. Industri batik di Jawa sebagian besar berasal dari desa-desa di Bagelen. Mereka tidak hanya memproduksi batik tetapi juga kain tenun yang dipasok ke penjuru Pulau Jawa maupun pulau-pulau di Indonesia timur melalui pelabuhan pantai utara Semarang. Pertengahan tahun 1815, Bagelen nyaris mencapai kemakmurannya hingga dijumpai kenyataan pada penghujung tahun 1814, Inggris mengimpor tekstil-tekstil yang serupa dengan batik ke pasar-pasar Jawa. Crawford merupakan orang yang berada di balik munculnya industri batik cap pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono III. Residen Yogyakarta ini mulanya mengumpulkan pola-pola parang rusak dan kembang cina serta kain Jawa penutup kepala kepada pabrikan Inggris yang terlebih dahulu diproduksi di firma bernama Deans, Scott & Co. Tekstil produksi ini disebut-sebut merupakan batik kualitas cap yang kemudian dipasarkan melalui perantara pedagang Tionghoa. Meskipun kain produksi firma Inggris sempat menjelajahi pasar di Jawa, namun usia komoditi ini tidak lama.

Hal ini lantaran kain tersebut luntur sehingga industri batik kembali ke batik-batik tulis Jawa⁴⁷.

Hal sebaliknya justru terjadi pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IV (1814-1822). Pasalnya, Sultan yang mendapat sebutan “Sinuwun Jarot” dalam Babad Ngayogyakarta, dikatakan memiliki kedekatan khusus dengan para pejabat Kolonial. Bahkan dari aturan tata busana kebesaran, sultan lebih sering menggunakan busana cara welanda dari pada busana keprabon kecuali saat siniwaka atau saat menggelar upacara besar di Bangsal Manguntur Tangkil, sebuah bangunan yang berada di kompleks Siti Hinggil.

[...] *dereng wonten Narendra, pra sobat trus galhipun, gejaw*
Sultan kaping pat// [...] sangking seneng penggaliye, malah krep
ngagem busana, iya cara Welanda, awis busana keprabon, gejaw
yen siniwaka// (Babad Ngayogyakarta, Asmaradana XXXVII:
21-22)⁴⁸

Terjemahan

Belum ada seorang raja, para sahabat terus memikirkan kecuali Sultan Keempat. Sangat senang perasaannya, justru kerap menggunakan busana cara Welanda, (tetapi) jarang berbusana keprabon, kecuali saat siniwaka.

47 Raffles menyebut bahwa kain yang ditiru dan diwarnai ini tidak hanya batik, tetapi juga kain chintz ‘cindhe’ India, tetapi kualitasnya tidak sebaik kain impor Eropa dan warnanya tidak sekuat warna kain batik, karena bisa luntur dalam dua kali cuci. Pola pada kain-kain ini dibuat dengan mengecapnya dan dalam alat tukar mata uang India, kain tiruan tersebut dihargai sekitar 4 rupee (Raffles, 2014: 108).

48 Di dalam Babad Ngayogyakarta ini disebutkan pula bahwa Sultan Keempat mengagumi busana cara Welandi ‘malah krep ngagem cara Welandi, awis busana keprabon’ (Babad Ngayogyakarta, hal 261)

Sementara itu, busana Eropa yang dimaksud dalam babad sebelumnya diuraikan lebih jelas pada Babad Ngayogyakarta (S109/PBA 280). Penelusuran informasi seperti ini kerap dilakukan dalam menggali data, terlebih terkait intertekstualitas teks. Di dalam babad ini, busana cara welandi merujuk pada busana Marsekal Daendels dengan istilah montering atau setelan yang senada yang dihadiahi oleh Negara.

[...] Ministēr kĕdah busana/ angagĕma kang montering/ sangking Nagri Wĕlandi/ punika pĕparingipun/ Maharaja Nedĕrlan/ dene warnine montering/ topi cĕmĕng binaludir ing kĕncana// Lan rasukan kang rinĕngga/ baludir mas pinalisir/ ing jangga dumugi jaja/ lambung asta kanan kering/ kancing kru mas ciniri/ agĕmanira Jĕng Sang Prabu/ Maharaja Nedĕrlan/ (Babad Ngayogyakarta, Sinom I: 12-13)

Terjemahan:

Minister haruslah berbusana, mengenakan yang diberikan oleh Negara Belanda, ya pemberian dari Maharaja di Nederlan. Begitu pula warnanya senada, topi hitam dibordir emas. Demiki juga busana yang dihias bordiran emas pada tepinya di garis leher hingga dada, bagian lambung, tangan kanan dan kiri (pula). Berkancing emas pekat menjadi ciri busana Jeng Sunan Prabu Maharaja Nederlan.

Kegemaran sultan menggunakan busana bergaya Eropa bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan selama 17 tahun memerintah, Sultan Hamengku Buwono IV banyak mendapat intervensi kepentingan dari Ratu Ibu, Patih Danurejo, dan Pemerintah Kolonial dalam penentuan kebijakan di keraton. Pada saat dinobatkan sebagai sultan, Raden Mas Ibnu Jarot baru berusia 10 tahun, sehingga dalam menjalankan pemerintahan, sultan muda ini harus didampingi oleh wali raja⁴⁹.

49 Di dalam Babad Ngayogyakarta, terdapat perbedaan usia penobatan Sultan Hamengku Buwono IV yang menyebutkan bahwa calon sultan keempat berusia 13 tahun “yuswanira Jeng Pangran sawek tiga welas taun [...] Lajeng

Baru setelah berusia 17 tahun pada 1820, pemerintahan sultan dapat dijalankan secara mandiri. Akan tetapi, pada 6 Desember 1822, sultan yang gemar berpesiar tersebut harus tutup usia setelah kembali dari perjalanan wisatanya⁵⁰.



Gambar 17. Lukisan Sultan Hamengku Buwono IV dengan Busana Pesiyaran (Besiyaran). Busana yang mendapat pengaruh dari corak busana-busana Eropa dengan hiasan bulu kasuari pada bagian topi dan tanda pangkat pada bagian bahu

Repro foto lukisan koleksi Museum Pesanggrahan Ambarrukmo

Tigabelas hari setelah surud-Dalem Sultan Seda ing Pesiyar, pada 19 Desember 1822, Raden Mas Gatot Menol dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono V di bawah pengawasan Pangeran Dipanegara dan para wali. Masa pemerintahan Sultan Menol menjadi periode transisi sekaligus kebangkitan bagi tradisi di keraton. Di dalam Babad Ngayogyakarta yang ditulis oleh Mas Wadana Natadirja, seorang abdi dalem silir menyebutkan bahwa usai peperangan, negara Yogyakarta

ingangkat Nerpati jejuluk Sinuwun Bagus pungkasan seda besiyar” (Babad Ngayogyakarta, Asmaradana XXXII: 15-16).

- 50 Sri Sultan Hamengku Buwono IV meski bertakhta selama 8 tahun, namun praktik kekuasaannya hanya dijalankan selama 2 tahun secara mandiri. Selama 6 tahun pemerintahannya, sultan berada dibawah asuhan dewan perwalian. Berbagai kebijakan sultan saat itu juga banyak dikendalikan oleh Patih Danurejo IV, salah satunya praktik sewa tanah untuk perkebunan kopi dan nila. Rupanya, persewaan tanah dan keuntungan yang diperoleh keraton saat itu yang melatar-belakangi kedekatan sultan dengan Pemerintah Kolonial. Dengan demikian, dalam aturan tata busana pun, sultan memilih mengenakan busana ala Eropa dibanding busana adat yang menjadi kultur dasar dari keraton.

sudah aman dan nyaman. Abdi dalem sudah teratur duduknya dalam sebuah pisowanan⁵¹. Periode transisi ini ditandai dengan kebangkitan tradisi tulis di dalam tembok keraton. Sultan Menol mendorong penulisan kembali sastra-sastra kerajaan dan mengalami puncaknya antara tahun 1846-1855⁵². Di dalam sastra dan babad inilah sultan mendokumentasikan berbagai aturan-aturan di keraton, termasuk pula aturan busana. Catatan mengenai busana prajuritan yang secara berulang muncul pada masa Sultan-sultan sebelumnya, terdapat pula pada babad ini. Tata aturan busana, yang meliputi kelengkapan busana dan waktu penggunaannya pun dituliskan, seperti halnya pada babad ini yang mencatat bahwa Sultan mengenakan busana prajuritan saat melakukan kunjungan ke kantor residen.

Sri nalindra sampun busana kaprabun, prajuritannya respati kang ngagem mojah sepatu, mangagem songkok sang katong// Tuwan residen samana sampun malebu, kalawan para kumpeni, prapteng bangsal cundhuk prabu, sang nata dipunaturi, amiyos ngarak samangko// Sri narendra gya miyos kinanthi wau, risiden munggend ing kering, guna caraning keraton, sadaya sampun denampil, samana wau sang katong// Sampun prapta sitinggil tumedhak laju, anitih rata Kiyai, Jimat lan risidhen mau, (Babad Ngayogyakarta, Megatruh II: 14-17)

Terjemahan:

Sang raja sudah berbusana kebesaran prajuritan (terlihat pantas mengenakan kaos kaki (dan) sepatu. Sultan mengenakan songkok. Tuan residen saat itu telah masuk (ke keraton) bersama para kompeni, tiba di bangsal cundhuk prabu, (lalu) sultan

51 Sakbadanira kang yuda, wus karta ingkang negari, abdi dalem pan saman, sampun tinata kang linggih (Babad Ngayogyakarta, Sinom I: 3).

52 Setidaknya tercatat sebanyak 121 teks sastra (sastra wulang, sastra suluk, dan babad) disalin sebagai bagian dari kekuasaan intelektual yang melegitimasi sultan pada saat itu. Pada masa yang sama, perpustakaan di keraton dibangun meski secara bertahap (Riyadi, 2002: 37).

dipersilkan untuk keluar kemudian. Sang sultan yang ditunggu segera keluar, residen berada di sisi kirinya, demikian caranya di keraton, semua ampilan sudah diambil, demikianlah tadi sang raja. Sudah sampailah di Sitinggil (lalu) turun dengan segera dan menaiki kereta Kiai Jimat bersama residen tadi.

Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V (1828-1855) sesungguhnya menjadi titik kebangkitan bagi keraton dalam arti yang luas. Renaisans yang begitu kentara adalah penulisan kembali arsip-arsip keraton. Namun, dari segi tata kelola birokrasi kerajaan dan pemerintahan di desa, Sultan banyak melakukan tindakan reformasi. Perhatian Sultan rupanya juga tertuju pada hubungan diplomasi dengan Belanda dan urusan kerumah-tangga keraton. Di dalam tata pemerintahan keraton, Sultan menata ulang berbagai perlembagaan abdi dalem dan pegawai. Pada waktu yang bersamaan, Sultan mengatur tata busana bagi kelompok-kelompok pekerja di keraton.

Menurut Babad Ngayogyakarta, terdapat 3 kelompok pekerja di keraton. Kelompok pertama merupakan abdi dalem prajurit, kelompok kedua merupakan abdi dalem keraton, sedangkan kelompok terakhir merupakan golongan pegawai kerajaan. Masing-masing kelompok dijelaskan tata busana dan perlengkapan yang menyertainya. Kelompok pertama yaitu 14 kesatuan prajurit yang dicatat dalam kutipan babad ini. Sementara kelompok abdi dalem keraton terdapat 34 golongan dan 23 kelompok yang lainnya merupakan pegawai keraton. Beberapa prajurit, abdi dalem, maupun pegawai di keraton saat ini banyak yang sudah tidak ditemukan. Hal ini merupakan dampak dari ekspansi politik pemerintahan dari Kolonial Belanda di kemudian hari.

- (1) [...] dene wadya prajurit, ingkang teksih namanipun, **Mantrihero** kathahnya, wolung dasa sikep karbin, baju lurik mujah sepatu sungkakan.
- (2) Panumbakira kang aran, **Langenastra** apan sami, penganggé kaot sunderan, udheng cemeng kirang sumping, kalih **Katang-**

- gung** nenggih, kathahira wolung puluh, ingkang sikep sanjata, sepalih lan sikeb iring, baju lurik bru kecita pijangkangan.
- (3) Dene wau tiyang **Nyutra**, wolung dasa warni-warni, dedameli-ra sanjata, tawok tameng ganjur langit, miwah sikep jemparing, penganggenira akuluk, jamang kampuh rampekan, kotang cemeng lawan abrit, panumbaknya udheng giligan sedaya.
 - (4) Dene **Miji Sumatmaja**, kalih dasa udheng gilig, kotang baludru reta, kampuh rampek angajrihi, sikep suduk lan sampir, **Prawirat-ama** winuwus, kathahnya wolung dasa, kang sikep karbin sepalih, kang sepalih asikep waos blandaran.
 - (5) Apengangge laken kresna, kastiwel saruwal abrit, tudhungira cacenthungan, **Jagakarya** kathahneki, wolung dasa pinilih, sikep sigar lawan ganjur, sikepan lurik mojah, langking panganggenya tapi, songkok tholo dene ta **wong Kawandasa**.
 - (6) Wolung puluh kathahira, sikep sanjata lan biring, pan sami baju luriknya, satiwel sruwalnya abrit, asongkok pan mantesi, wong **Dhaeng** ingkang winuwus, kathahnya wolung dasa, sikep sanjata sepalih, sikep paos sepalih penganggenira.
 - (7) Baju seta lan saruwal, amawi krah senur abrit, tapenira gih jangkangan, bulu-bulu den sekari, **Wirabraja** winardi, wolung dasa kathahipun, sikep karbin lan tombak, pengangge sangkelat abrit, mojah seta kuthup turi tudhungira.
 - (8) Dene **Jager** kawandasa, sikep pedhang lawan biri, abaju lurik kampuhan, kumitir akuluk kesing, **Suranata** winarni, rong puluh kang sikep ganjur, sikepanira seta, kampuh jawi kuluk kesing, **Surakarsa** kathahira wolung dasa.
 - (9) Pan samya asikep tumbak, baju saruwalnya putih, **Bugis** cacah wolung dasa, apan sami sikep biring, mengangge sarwa langking, besting jene dene wau, **wadya Siman** kathahnya, kawandasa sikep gendir, amenggangge baju poleng sruwal seta.
 - (10) Dene ta **wong Priyataka**, topi bajonira kuning, pan angampil pengawinan, songsong kuthamara bedhil, lawan **Singanegari**,

kalawan **wong Martalulut**, poleng penganggenira, **wong Gamel** penganggeneki, asikepan kuning saruwalnya jingga.

- (11) **Wong Ngampil** rasukanira, jene sami kuluk putih, **Gandhik** ijem sikepannya, **Wiyaga** inggih kelambi, ijem wondene jarit, asikepan cemeng wau, **pandhe gemblak** lan **sayang**, teluk penganggene sami, baju langking **Mantrigawe** pelayangan.
- (12) Inggih sami laken kresna, **Pateyan** kalawan **Mantri**, **kreraton** kalawan **taman**, samya asikepan langking, **Kartiyasa** pri tuwin, **Darah sumaputra** wau, inggih sikepan kresna, anaming kampu kumitir, wong **Kemasan Panongsong** sikep jenar.
- (13) **Dhalang Pasindhen Panatah**, **Sungging** sami baju langking, ang-gong inggil inggih sama, lan **Kundhi** sikepan langking, dene wong **Kemitbumi**, kalawan **Panandhon** baju, abrit miwah **Kebayan**, **Galadhak** rasukan abrit, **wong Serati Kenek Kusir** baju abang.
- (14) **Gareji** tukang lan **Jlagra** kumitir sikepan langking, **Mergangsa Gawong** dha ginya, pan sami sikepan abrit, dene **Pulisi** kari, **Ma-jegan** playangan baju, cemeng wondene **Jagsa**, lawan **Pulisi** gih langking, dene **Dhistrick Ronggo demang** baju kresna.
- (15) **Wong Kaji** klambi jubah, kaki musik pan mantring, kalawan **Usar walanda**, kawandasa amiranti, **Ordenas playar Kusir**, **Upsinder** gih sami baju, laken sami rini(h.4)-da, ing jawi **Mantri Bupati**, **maos sewu** kalawan **wong numbak anyar**.
- (16) Sikepanira gih soma, samya laken cemeng nenggih, **Bumija Panumping** sama, arasukan laken langking, **Gedhong Kanan** lan **Kering**, gih sami sikepanipun, cemeng dene **Kaparak**, **kiwa tengen** baju lurik, dene pura kaparak sampun tinata.

Dari kutipan tersebut, teks dengan penanda tebal merupakan golongan abdi dalem, prajurit, maupun pegawai yang terdapat pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V. Masing-masing golongan dibedakan dari busana yang dikenakan setiap hari atau ketika hadir ke keraton pada upacara-upacara khusus.

Di samping aturan busana pada momen-momen penting kerajaan, Sultan mengatur pula payung yang merupakan kesatuan utuh pada busana kebesaran. Aturan mendetil mengenai penggunaan payung akan dibahas pada bab berikutnya. Namun pada bagian ini yang perlu dipahami bahwa aturan busana yang diterbitkan oleh Sultan bersifat mengikat pada siapapun. Margono dalam bukunya *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* menyebutkan bahwa aturan payung ini meliputi dari jenis-jenis payung, warna payung, hingga ukuran payung bagi raja, keluarga raja, dan pejabat kerajaan di Keraton Yogyakarta (Margono, 2010: 106-109).

Berbagai aturan yang diterbitkan Sultan saat itu rasanya begitu mengikat. Akan tetapi, praktik inilah yang merupakan upaya dalam mengatur kembali tata pemerintahan keraton dari dalam. Pada sektor profan, Sultan membuka kemungkinan-kemungkinan akulturasi budaya secara luas. Arus budaya asing di Yogyakarta dibaca oleh Sultan sebagai kesempatan untuk memperluas pengembangan kebudayaan terutama di bidang seni. Kedatangan dua orang pakar musik diatonis Eropa kebangsaan Belanda, yaitu van Gought dan Smith. Keduanya merupakan ahli musik diatonis ini melatih kelompok abdi dalem musik atas izin Sultan. Bahkan van Gought dan Smith diperintahkan secara khusus untuk melatih korps musik serta menyusun aransemen musik diatonik ke dalam komposisi iringan Tari Bedaya dan Serimpi saat memasuki ruang pagelaran (Pramutomo, 2009: 92).

Jika dibandingkan dengan pemerintahan dua Sultan muda sebelumnya, periode Sri Sultan Hamengku Buwono VI jauh lebih mapan secara kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai karya sastra yang rupanya diprakarsasi sendiri oleh permaisuri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Ageng. Permaisuri sultan ini sedikitnya disebut dalam 9 naskah⁵³. Di sisi lain, putri dari Sunan Paku Buwono VII ini juga menjadi

53 Ratu Ageng disebut bekal-kali dalam sedikitnya sembilan naskah sebagai pemrakarsa penulisan maupun penyalinan. *Serat Nitik Sultan Agung* (W.53,

pembaharu dalam tradisi berbusana di keraton⁵⁴. Salah satu aturan mengenai busana yang ditemukan pada masa Sultan Hamengku Buwono VI berupa ketentuan busana kebesaran bagi para pangeran dan pejabat kerajaan saat acara pisowanan. Pada 5 Desember 1855, sultan mengeluarkan aturan busana bagi kerabat keraton dan abdi dalem yang akan hadir 'marak-sowan' pada acara Garebeg Mulud Dal, 1839 J. Aturan ini disalin kembali dan dikeluarkan sebagai pedoman berbusana saat menghadap sultan pada tahun 1861 (1787 Jawa). Di dalam aturan tersebut, terdapat 6 bab yang mengatur busana sekaligus tata cara menghadap sultan, namun 4 bab di awal mengatur busana yang dikenakan⁵⁵.

Ing ngandhap punika pratelanipun

Punika pemut-amemuti Pranata Dalēm yen sami sowan wonten plataran Dalēm ing kadhaton ingkang sampun lumampah adatipun kina, sarta ingkang sampun dados karsa-Dalēm.

Bab, 1, yen para Bëndara Pangeran kenging ngagēm rasukan sēmbagi, utawi lurik sak panunggilipun.

Bab, 2, abdi Dalēm bupati sak pangandhap panganggenipun kampuhan kulukan inggih kados adat ingkang sampun kēlampahan.

W.54, W.55, W.56, W.57) menjadi naskah yang disalin terus menerus atas prakarsa Ratu Ageng. Bahkan pada naskah Serat Nitik Sultan Agung (W.55), disebutkan bahwa sang ratu menulis sendiri permulaan teksnya. Ditemukan pula dalam naskah Serat Panji Musna (L.247), Serat Nitik Sultan Agung (S.59), dan dua naskah Serat Manikmaya (S.7 dan S.9) menjadi naskah-naskah yang diprakarsai penulisannya oleh permaisuri tersebut (Lindsay, 1994: 117; Behrend, 1990: 6-7, 31).

- 54 Carey, Peter dan Houben, Vincent. Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hlm. 66.
- 55 Aturan ini dikutip langsung dari Pranatan Garebeg Mulud Dal 1839; Pranatan Dalem yen sami sowan wonten Plataran Kedhaton, koleksi Perpustakaan Widyabudayam, kode W.247. Sementara aturan yang dikeluarkan pada tahun 1787 Jawa (1861 Masehi) dirujuk dari tulisan Margana (2010: 99) tentang tata cara menghadap raja di halaman kedaton.

Bab, 3, yen abdi Dalēm punakawan panganggenipun rasukan lurik pranakan, yen abdi Dalēm bĕkĕl utawi langĕnastra dumugi bĕkĕl nem kalilan mawi dhuwung, wondening yen wontĕn abdi Dalēm bupati sak panunggilanipun ingkang kalilan sowan lumĕbĕt sabĕn dintĕn, mangangge kados panganggenipun abdi Dalēm punakawan rasukan lurik pranakan sarta kalilan mawi dhuwung, wondene abdi Dalēm ingkang kalilan mangangge rasukan sĕmbagi warni toro abdi Dalēm musikan utawi kusir kĕnek.

Bab, 4, yen abdenipun para Bĕndara Pangeran utawi rincangipun abdi Dalēm bupati sakanteronipun yen tumut Bĕndaranipun lumĕbĕt. Yen tiyang sĕpuh manganggea kampuh kulukan, yen bĕbĕdan nganggea kuluk rasukan sikĕpan, yen lare pacot udhĕng, wontĕn ingkang kenging udhĕng-udhĕngan namung ingkang nama raden mas, yen nama den bagus mangandhap inggih sami pacot udhĕng.

Terjemahan

Di bawah ini merupakan uraian

Inilah tata aturan dari raja jika hendak menghadap ke pelataran kedaton, yang tata aturannya sudah berjalan seperti adat kuno, serta sudah menjadi keinginan raja.

Bab 1. Apabila para Bendara Pangeran, diperkenankan menggunakan baju sembagi atau lurik dan sejenisnya.

Bab 2. Abdi-Dalem bupati ke bawah, berpakaian kampuhan kulukan seperti kebiasaan yang berlaku.

Bab 3. Abdi-Dalem punakawan, memakai baju lurik pranakan, abdi-Dalem bekel atau Langenastran hingga bekel muda, diperbolehkan memakai keris. Abdi-Dalem bupati dan sebagainya yang diizinkan menghadap setiap hari, berpakaian seperti abdi-Dalem punakawan, baju lurik pranakan dan boleh memakai keris. Abdi-Dalem yang diperbolehkan memakai baju sembagi berbentuk toro adalah abdi-Dalem musikan atau kusir-kenek.

Bab 4. Abdi-Dalem para Bendara Pangeran atau abdi-Dalem yang membantu bupati semua, jika ikut tuannya masuk. Jika yang tua, mengenakan kampuh kulukan, jika bebedan makan menggunakan kuluk dan baju sikepan, jika anak-anak tidak mengenakan udheng, yang diperkenankan mengenakan udheng, yaitu yang hanya bergelar raden mas, jika bergelar raden bagus kebawah tidak mengenakan.

Paruh abad ke-19, dokumentasi busana di keraton tidak hanya berupa sumber tertulis, tetapi juga sumber visual di keraton masih berupa lukisan. Pada periode ini, keraton mengenal sosok Raden Saleh sebagai pelukis pribumi yang memperkenalkan lukisan potret secara realis⁵⁶. Di Jawa, Raden Saleh banyak melukis keluarga keraton pada sekitar tahun 1860-an. Baru sekitar tahun 1841 M, fotografi masuk ke Indonesia. Masuknya fotografi ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya teknologi fotografi di Eropa pada masa itu. Keraton mengenal nama Simon Willem Cemerik yang tinggal di Yogyakarta sejak tahun 1861 dan menjadi pelukis sekaligus fotografer kepercayaan Sri Sultan Hamengku Buwono VI. Cemerik meninggalkan Yogyakarta sekitar tahun 1871. Cemerik kemudian digantikan oleh Kassian Chepas yang banyak mendokumentasikan bangsawan Yogyakarta sekaligus berbagai peristiwa upacara yang diselenggarakan oleh keraton⁵⁷. Pada periode ini, dokumentasi visual di keraton mulai bermunculan, termasuk dokumentasi patron busana yang dikenakan oleh sultan,

56 Sebelum Raden Saleh, Jawa tidak mengenal lukisan potret selain lukisan manusia yang distilisasi serupa pakem wayang (Lombard, 2008: 203)

57 Cephass tinggal dan membuka studio foto di Lodji Kecil Wetan, sekarang bernama Jalan Mayor Suryotomo. Semasa hidupnya, Cephass banyak mengabadikan suasana bangunan, jalan, kegiatan budaya keraton, juga potret keluarga Sultan. Beberapa karya Cephass dipakai untuk mendukung buku karya Isaac Groneman, seperti "In den Kedaton" dan "De Garebeg". Foto-foto hasil karya Cephass yang menunjukkan suasana dalam benteng keraton berikutan kegiatan-kegiatan yang ada ada di dalamnya kini menjadi dokumen yang sangat berharga (Hadiyanta, 2013: 4).

permaisuri, para pangeran, hingga abdi dalem. Masa-masa inilah antara arsip busana dengan visual fotografi disejajarkan sebagai acuan aturan busana.



Gambar 18. Busana harian yang dikenakan oleh Sultan.
(Sumber: KITLV).



Gambar 19. Busana yang dikenakan Sultan dalam upacara besar.
(Sumber: KITLV).

Kemunculan teknik fotografi pada paruh abad ke-19 memberi pandangan baru tentang ragam busana yang dikenakan oleh elit-elit keraton di berbagai acara. Di dalam dokumentasi Camerik yang tersip sebagai koleksi digital di Perpustakaan Leiden, digambarkan bahwa setiap Sultan memiliki otoritas atas busana yang dikenakan. Kehendak Sultan dapat dilihat dari pemilihan perhiasan pelengkap busana, hingga pemilihan motif batik sebagai bagian dari busana yang dikenakan atau karsa-Dalem.

Keberadaan Camerik sebagai fotografer keraton tidak bertahan lama. Pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VI, terdapat fotografer Hindia-Belanda bernama Kassian Chepas yang menggantikannya. Chepas ditunjuk sebagai fotografer resmi keraton dan mulai mendokumentasikan Sultan serta anggota keluarga keraton semenjak awal tahun 1871. Kariernya sebagai fotografer bangsawan melejit pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-

1921). Hasil tangkapan kamera yang dilakukan Chepas saat itu rupanya tidak hanya terbaca sebagai dokumentasi para bangsawan, tetapi juga sebagai penanda kelas-kelas sosial. Perihal ini seperti halnya catatan dari Ronald Barthes (1983). Barthes memulai pembicaraan mengenai pendekatan semiotik dalam fenomena busana melalui bukunya *Fashion System*. Buku pertamanya tersebut diterbitkan dalam bahasa Perancis dengan judul *Systeme de la mode* pada tahun 1967. Di dalam buku ini Barthes mencoba membedakan tiga tipe busana, yakni (1) *image clothing*, busana yang ditampilkan sebagai fotografi atau gambar; (2) *written clothing*, busana yang dideskripsikan secara tertulis atau ditransformasikan ke dalam bahasa; dan (3) *real clothing*, busana aktual yang dikenakan pada tubuh manusia, busana sebagai objek (Barthes, 1990: 3 – 5). Dari pendekatan Barthes inilah, pembabagan busana berdasarkan kelas-kelas bangsawan dapat dimaknai secara lebih kompleks.



Gambar 20. Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro, putra mahkota pertama Sri Sultan Hamengku Buwono VII (Sumber: KITLV).



Gambar 21. Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, saudara Sri Sultan Hamengku Buwono VII (Sumber: KITLV).

Melihat foto figur Pangeran Adipati Anom melalui pendekatan semiotik, maka simbol-simbol yang tertera dalam motif batik pada kain kampuh, penggunaan selop, perhiasan penyerta lainnya seperti *sumping*, *kalung karset* pada baju, hingga properti foto seperti *pakinangan* dan *kecohan* menjadi penanda bangsawan kelas satu, setelah Sultan. Sementara itu, foto figur Pangeran Mangkubumi, saudara dari Sri Sultan Hamengku Buwono VII terlihat berbeda dengan foto putra mahkota. Pangeran Mangkubumi tidak mengenakan selop dan perhiasan pelengkap busana. Pemilihan motif batik semen dapat dikatakan motif kelas dua. Di lain itu, tidak adanya pelengkap properti foto seperti halnya putra mahkota. Dari sini terlihat bagaimana busana melalui arsip visual membawa simbol khusus terhadap penggunanya.

Mengenai aturan motif batik, selain aturan yang diterbitkan pada periode Sri Sultan Hamengku Buwono II, tidak ada acuan arsip lagi yang ditemukan. Akan tetapi, dalam konvensi keraton, aturan tersebut dipertahankan melalui dokumentasi oral. Sementara mengenai pemilihan motif batik di luar motif-motif baku yang menunjukkan kelas bangsawan, tidak ada acuan yang bisa dirunut. Motif batik dalam busana sifatnya begitu personal. Potret ini lantas berkembang pada paruh abad ke-19. Mulanya, patron motif batik pada kain dan kampuh yang diproduksi oleh keraton cenderung sederhana tanpa tambahan ornamen hias. Apabila motif tersebut memiliki pola flora atau fauna, maka secara utuh visual tersebut yang digambarkan. Perihal ini seperti halnya nama-nama motif yang disebutkan dalam arsip Yogyakarta tahun 1798 dan 1801. Akan tetapi, di dalam Babad Ngayogyakarta yang ditulis pada masa Sultan Sugih, disebutkan berbagai motif yang justru berkembang dari kediaman para pangeran. Hampir setiap pangeran memiliki juru batiknya masing-masing.



Gambar 22. Penggambaran motif batik parang rusak dengan berbagai corak dan varian, yang dikenakan sebagai kampuh dalam busana para pangeran serta para pembesar di Keraton Yogyakarta saat peristiwa Garebeg. (Sumber: KITLV)

Pada pemerintahan Sultan ke-7 ini, pengaruh corak busana Eropa juga mulai terlihat pada tata busana seni pertunjukan. Tahun-tahun di abad ke-19 ini seolah menjadi pintu gerbang komunikasi antar 2 kebudayaan besar yang saling bersambut, tanpa adanya tumpang tindih⁵⁸. Di dalam ulasan singkat, Soeharto (1997) menyebutkan bahwa pengaruh corak busana Eropa terjadi hingga mengubah tata busana tari sakral bedaya. Semula para penari bedaya menggunakan busana dodot dengan tata rias paes ageng, kemudian beralih menggunakan busana rompen dengan jamang berhias bulu kasuari. Penggunaan bulu ini menyerupai tatanan rambut bangsawan perempuan Eropa pada periode yang sama (Soeharto, 1997: 10).

58 Sultan Hamengku Buwono VII dikenal sebagai Sultan Sugih yang banyak mendirikan bangunan fisik sekaligus melegitimasi kekuasaannya melalui karya seni. Beberapa naskah yang ditulis pada masa pemerintahan beliau secara tegas memberi citra sebagai sosok yang mapan dalam finansial. Sastra dan babad adalah produk kebudayaan yang tidak hanya memberi fungsi sekuler tetapi juga label sosial-ekonomi yang kuat (GKR Hayu, 2020: 5).

TEDHAK LOJI: SEBUAH PARADE BUSANA PARA BANGSAWAN

Peristiwa tedhak loji merupakan drama yang dikonstruksikan melalui panggung negara, nuansa politis yang dihadirkan Keraton Yogyakarta pun sangat kuat. Iring-iringan panjang disusun sedemikian rupa dengan melibatkan sejumlah elit keraton. Kehadiran penonton sepanjang prosesi ini seolah menempatkan Alun-alun sebagai tata panggung yang melayani kekuasaan (Pramutomo, 2009: 120-121).

Pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921), setiap 31 Agustus diadakan pisowanan agustustan. Upacara ini merupakan penghormatan atas kenaikan takhta Kanjeng Sri Maharaja Putri Wilhelmina atau Ratu Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Ratu Wilhelmina bertakhta sebagai Ratu Belanda menggantikan Raja Willem III sejak 31 Agustus 1880. Kabar kenaikan takhta dari Ratu Wilhelmina ini diberitakan oleh seluruh dunia termasuk ditulis dalam surat kabar Hoedyana-wara terbitan dari Dwara-warta Keraton Yogyakarta. Di kala itu, Yogyakarta yang berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Hindia-Belanda memiliki kewajiban untuk merayakan kenaikan takhta sang ratu. Kebijakan tersebut kemudian oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII diwujudkan dengan menggelar pisowanan ageng bagi para pangeran, bangsawan kerabat, serta punggawa-punggawa keraton setiap 31 Agustus. Di dalam upacara tersebut, para pangeran umumnya mengenakan busana terbaik mereka. Momen ini biasanya menjadi ruang untuk menunjukkan kemegahan busana.

Kemegahan pisowanan tedhak loji digambarkan jelas dalam litografi koleksi Museum Sonobudoyo karya Raden Bekel Djajeng Soedirdjo. Di dalam lukisan cat air tersebut, tidak hanya Sultan dan para pangeran yang melakukan anjangsana, tetapi seluruh bagian dari keraton hadir. Secara berurutan masing-masing kelompok abdi dalem akan membelah Alun-alun utara untuk berjalan menuju kantor Residen Yogyakarta. Momen inilah yang menjadi parade busana para bangsawan, dan tidak jarang menjadi tontonan masyarakat di sekitarnya.

Tedhak Loji: Pagelaran Parade Busana

Penghujung abad ke-19 menjadi periode emas dari Keraton Yogyakarta. Pada masa itu, keraton di bawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921) yang merupakan sosok pemikir modern mulai membuka lebar investasi asing di bidang perkebunan.

Tanah-tanah lungguh milik sultan dan para bangsawan disewakan kepada para pengusaha perkebunan Eropa untuk ditanami komoditi tebu, tembakau, dan indigo. Sejak saat itu mulai dibangun pula pabrik-pabrik perkebunan terutama pabrik gula. Hingga 1925, di wilayah Yogyakarta telah ada 31 maskapai perkebunan swasta Eropa. Perkembangan ini menarik minat sultan untuk menanamkan modal membangun pabrik gula. Dampak nyata dari investasi sultan di pabrik-pabrik swasta ini adalah keuntungan ekonomi yang banyak diterima oleh keraton. Dari keuntungan ini, sultan membangun akses bisnis dengan membuat jalur rel kereta api beserta stasiun-stasiun pemberhentiannya di wilayah kerajaan. Para pengusaha Eropa juga membangun societet, gedung pertemuan yang biasa dipakai untuk ajang sosial komunitas Eropa di Yogyakarta⁵⁹.

Interaksi sosial antara elit istana dengan pejabat Eropa di Yogyakarta dibangun atas hubungan ekonomi. Kondisi ini semakin memberi kesempatan Sultan Sugih untuk kerap melakukan kunjungan ke kediaman residen sebagai momen penghormatan setiap tanggal 1 Januari dan 31 Agustus. Pada 1 Januari bertepatan dengan momen tahun baru, sementara tanggal 31 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah tedhak loji. Peristiwa tedhak loji rupanya tradisi baru di tatanan keraton yang diperkirakan sudah berlangsung pada masa Sultan Hamengku Buwono III (1812-1814). Tradisi ini kemudian dilestarikan sebagai seremonial saling kunjung antara pejabat Kolonial Belanda

59 Dampak ekonomi yang diperoleh keraton juga digunakan untuk membangun infrastruktur kerajaan. Pembangunan kembali Pesanggrahan Harja Purna yang terbengkelai sejak masa Sultan Hamengku Buwono V dilakukan sultan sebab kelak menjadi tempat peristirahatannya di usia senjanya. Dahulu pesanggrahan ini digunakan sebagai tempat beristirahat para Gubernur Jendral saat akan berkunjung ke keraton, termasuk Daendels (antara tahun 1810). Usai dibangun kembali oleh Sultan Hamengku Buwono VII, Harja Purna berubah nama menjadi Ambarrukmo hingga saat ini (Margana, dkk, 2020: 140-143).

dengan Sultan Hamengku Buwono IV usai dinobatkan pada tahun 1816. Protokol kenegaraan dalam peristiwa tersebut kemudian disusun antar kedua belah pihak, yang di dalamnya termasuk tata busana. Di dalam catatan Pramutomo, peristiwa tedhak loji merupakan drama yang dikonstruksi melalui panggung negara, namun nuansa politis yang dihadirkan sangat kuat. Iring-iringan yang panjang disusun sedemikian rupa dengan melibatkan sejumlah elit istana seperti halnya para pangeran, patih, dan pejabat-pejabat di bawahnya. Tidak hanya para elit istana, tetapi seperangkat gamelan hingga para penari Bedaya turut dalam rombongan ini. Potret menarik dari iring-iringan ini yaitu adanya kelompok palawija atau abdi dalem khusus yang menjadi simbol kemurahan hati sultan. Biasanya kelompok palawija terdiri dari orang-orang cacat, cebol, bule, dan berbagai kekurangan fisik lainnya. Sosok sultan sendiri kemudian bertindak sebagai sutradara dalam peristiwa tersebut.

Tedhak loji sebagai drama pertunjukkan selalu menghadirkan penonton sepanjang prosesinya. Peristiwa yang ditunggu sebab dianalogikan sebagai sebuah tata panggung yang melayani kekuasaan. Jika dilihat dari panjangnya iring-iringan, masyarakat justru memperoleh area luas Alun-alun utara hingga ke arah sepanjang Pangurakan dan di seputar gerbang rumah dinas residen Yogyakarta untuk menyaksikan peristiwa ini. Tidak hanya keindahan busana dari para pembesar negara yang nampak dengan para pengawalinya, namun berbagai ragam busana yang dikenakan oleh prajurit hingga abdi dalem lainnya nampaknya menjadi tontonan tersendiri. Ruang busana inilah yang akhirnya memberi jarak antara masyarakat luar benteng dan para elit-elit keraton di dalam benteng.



Gambar 23. Iring-iringan abdi dalem dan kereta Putra Mahkota Pangeran Adipati Anom Amengkunegoro dalam prosesi tedhak loji tahun 1895.
(Sumber: KITLV).



Gambar 24. Kereta Kyai Garudayeksa yang ditarik dengan 8 kuda melewati tengah Alun-alun. Di sisi kanan-kirinya terlihat masyarakat yang menyaksikan lajunya kereta pusaka tersebut, tahun 1925.
(Sumber: KITLV)

Tidak banyak fotografi jalannya prosesi tedhak loji yang ditemukan, namun terdapat lukisan gulung karya Raden Bekel Djajeng Soedirdjo yang memvisualkan kelompok pertama hingga kelompok terakhir di dalam prosesi tedhak loji tersebut. Pada bagian depan terdapat keterangan berbunyi Gambar djikaloe Kandjeng Sultan tedhak

di Resideennan, tanggal 1 Januari en 31 Agustus, Digambar oleh abdi dalem bekel punakawan midji Raden Bekel Djajeng Soedirdjo⁶⁰. Dari gambar ini terdapat urutan prajurit, abdi dalem, hingga pegawai keraton dengan berbagai busana yang berbeda. Agaknya pembeda dari setiap kelompok tidak hanya cara mengenakan, tetapi juga warna busana yang dikenakan.



Gambar 25. Kelompok abdi dalem Priyantaka, Mertalulut, serta Mantri Keperak Kiwa serta Dampar Sultan yang dibawa oleh kelompok Narakarya.
Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo.



Gambar 26. Kereta Kanjeng Kyai Garudayeksa yang dikendarai oleh Sultan Hamengku Buwono VII, dikawal oleh para bupati.
Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo.

60 Gambar gulung ini merupakan koleksi dari Museum Sonobudoyo. Terdapat 4 gambar gulung yang masing-masing memiliki panjang 2 meter, bahkan lebih. Pada awal gambar terdapat keterangan mengenai prosesi yang divisualkan melalui lukisan ini. Sementara di setiap gulungan terdapat gambar dan keterangan yang menjelaskan kelompok maupun golongan prajurit, abdi dalem, maupun pegawai di keraton pada masa Sultan Hamengku Buwono VII saat peristiwa tedhak loji.



Gambar 27. Kelompok Bupati dan Panji Distrik, Bupati Anom dan Riyo, serta Bupati Politik dan Nayaka. Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo.

Apabila mengacu pada lukisan gulung tersebut, sedikitnya terdapat 11 perbedaan busana yang dibedakan berdasarkan warna dan jenisnya. Ragam busana yang menjadi bagian dari tata busana kebesaran pada umumnya kampuh atau kain penutup tubuh bagian bawah. Sementara busana bagian atas disebut dengan *sikepan* dengan berbagai warna sesuai dengan kelompoknya. Beberapa warna yang dapat diidentifikasi antara lain sikepan cemeng bludir, sikepan cemeng lugas, sikepan pethak, sikepan jene, sikepan abrit. Ragam busana lainnya seperti busana jendralan, busana pranakan lurik warna, pranakan lurik telu-pat, atela cemeng lugas, atela pethak, busana untuk abdi dalem khusus seperti kusir, pembawa tombak, bedaya, serta manggung, serta busana dari setiap kesatuan prajurit di keraton pada masa itu. Terdapat 113 kelompok abdi dalem, prajurit, serta pegawai keraton yang turut dalam iring-iringan tedhak loji. Masing-masing kelompok dibedakan berdasarkan identitas warna dan jenis busana yang dikenakan.

Tradisi tedhak loji masih ditemui pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1940-1988). Pada arsip dan dokumen seni KRT Wiroguno yang disalin secara persis oleh Pramutomo, terdapat catatan mengenai upacara tedhak loji yang berupa tata aturan pelaksanaan. Di dalam arsip pranatan lampah-lampah *Wijos Dalem Doemateng Lodji Goepernoeran* (Openbaar Gehoor), 1 September 1941 dicatat bahwa apabila seorang pangeran belum memiliki busana jendralan atau cara wlandi, maka dapat mengenakan busana

sikepan bludiran dengan kampuh dan berbagai kelengkapan busana kebesaran⁶¹.

[...] Ananging adjudant dalem kalih sowan wonten Tratatag Prabajeksa sisih eler ngadjeng gedah, pengagemanipun tjara wlandi, montering ageng (groot-tenue), ananging Bendera Pangeran Harjo Hadinegara setiwelan, ingkang dereng kagoengan montering tjara wlandi mangagem koeloek kanigara, rasoekan sikepan bloediran, kampoehan tjana tjinde ngagem tjenela, ingkang dereng sikepan bloediran ngagem sikepan loegas (Pranatan Lampah-lampah Wijos Dalem Doemateng Lodji Goepernoeran, angka I).

Terjemahan:

Namun, kedua ajudan raja menghadap di Tratatag Prabayeksa sisi utara, di depan (abdi-Dalem) gelas, berbusana cara welandi, pemberian tuan besar. Akan tetapi, Bendera Pangeran Harya Hadinegara setiwelan, yang belum memiliki pemberian busana cara welandi mengenakan kuluk kanigara, busana sikepan bludiran, kampuhan, bercelana cinde, mengenakan selop. (Sementara) yang belum sikepan bludiran, memakai sikepan lugas.

Pada pranatan lampah-lampah tedhak loji masa Sultan Dorajatun, terdapat 13 poin yang mengatur jalannya prosesi dan urut-urutannya. Prosesi di mulai pukul 10.00 pagi dengan kehadiran para bendara pangeran dan bendara sederek dalem di Tratatag Bangsal Kencana. Di tempat yang sama telah bersiap pula ampilan dalem manggung serta payung kebesaran yang selalu mengiringi di belakang atau di samping sultan. Sementara pada waktu yang sama, pepatih dalem serta abdi dalem sipat bupati menunggu di Bangsal Sri Manganti. Ada pula abdi

61 Arsip tedhak loji yang dikeluarkan pada awal pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah diterbitkan dari dalam Majalah Hoedyana Wara, bulan September 1941 (Pramutomo, 2009: 158).

dalem bupati reh lebet menunggu di tempat yang sama dengan patih. Pada pukul 10.15, dicatat dalam arsip tersebut sultan telah keluar dari keraton yang diikuti oleh bendara pangeran. Bendara Pangeran Harja Djajakosoema berada di sisi kanan sultan, sementara commandant Wedana Ageng Prajurit berada di sisi kiri sultan. Berdasarkan poin kesepuluh dari tata aturan peristiwa tedhak lodji pada masa Sultan Dorojatun, urutan pawai kenegaraan tersebut didahului oleh para abdi dalem bupati serta prajurit Wirabreja dan Prawiratama sebelum rombongan sultan dan beberapa rombongan yang lainnya⁶².

Oeroet-oeroetannipoen lampah wiyos dalem:

1. *Ingang wonten ngadjeng pijambak kreta ingkang dipoen toempaki abdi dalem Boepati ingkang enem pijambak, saben setoenggal kreta isi sekawan sapitoeroetipoen, ingkang wonten wingking pijambak kreta ingkang dipoen toempaki Papatih dalem.*
2. *Abdi dalem Pradjoerit wiwit Wirabradja doemoegi Prawiratama.*
3. *Titihan Dalem Kreta Kjahi Garoedajaksa ngangem escorte ageng. Commandant escorte wonten satengen kreta leres roda wingking. Adjudant dalem Bendara Pangeran Harja Hadinegara sarta abdi dalem Commandant Wedana Ageng Pradjoerit wonten sakiwa kreta leres roda wingking, dene Adjudant dalem Bendara Pangeran Harja Djajakoesoema anderek wonten titihan dalem kreta.*
4. *Kreta Manggoeng.*
5. *Abdi dalem Pradjoerit Mantridjero sarta Ketangoeng.*
6. *Kreta titihanipoen Para Bendara, saben setoenggal kreta isi sekawan, ingkang sepoeh-sepoeh wonten bak wingking, ingkang nem-nem wonten bak ngadjeng.*

62 Pada arsip tersebut juga dijelaskan mengenai gamelan Monggang dan gamelan slendro-pelog yang ditata di Gedhong Gangsa sisi kiri dan kanan untuk manguyu-yuyu mengiringi sultan saat menuju Patjikeran, tempat menunggu kereta Kyai Garudayeksa. Setibanya di Lodji Gubernuran, sultan dan rombongan elit keraton diterima dengan musik lagu Wilhelmus (Pranutomo, 2009: 160-161).

Antara pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII dengan Sultan Hamengku Buwono IX nampak terjadi reduksi kelompok abdi dalem yang turut dalam prosesi tedhak lodji. Hal ini tentu berpengaruh pada berbagai macam tata busana yang muncul pada dua masa pemerintahan tersebut. Di kemudian hari, reduksi tata busana di keraton semakin terlihat seiring dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak paling kentara dari pendudukan Jepang adalah pembubaran kesatuan prajurit keraton pada 1 Agustus 1942.

Mulai saat itu, keraton benar-benar mulai berbenah, baik secara militer maupun tata aturan upacara yang di dalamnya termasuk pula tata busana. Barulah pada tahun 1970, prajurit keraton dihidupkan kembali atas prakarsa dari BRM. Herjuna Darpita, yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono X⁶³. Akan tetapi, kelompok-kelompok abdi dalem dan pegawai keraton lainnya tidak dihidupkan kembali seiring dengan bergabungnya Yogyakarta dalam satu wilayah negara berdaulat bernama Indonesia, tahun 1945.

63 Ada pendapat lain bahwa pembubaran ini sebenarnya taktik dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sultan tidak mau prajurit keraton dipergunakan Jepang untuk kepentingannya (Tim, 2009: 8).

PAYUNG SEBAGAI KELENGKAPAN BUSANA KEBESARAN

*Kanjeng Sultan tan pęgat kękanthen asta// lan Tuwan Ministęrn
Garnam/ songsong lir andaru keksi/ upacara myang pusaka/
asri agęrbęg ing wuri/ pra antęnar upęsir/ Pangran Paku Alam
pungkur/ pra niyaka bupatiya/ anjajari aneng ngarsi/ (Babad
Ngayogyakarta/ (Sinom III: 25-26).*

Kanjeng Sultan tidak lepas gandengan tangannya dengan
Tuan Mister Garnam. Payung (emas)nya seperti cahaya
(bersinar). (Kanjeng) upacara dan pusaka terlihat mengikuti di
belakang. Para Antenar (dan) upesir, serta Pangeran Paku Alam
berada di belakang. Para bupati mendampingi di depan.

Payung atau songsong dalam Bahasa Jawa, kerap disebut dalam dokumen babad sebagai kelengkapan busana kebesaran. Pada seremonial tertentu, payung bertindak sebagai penanda kelas sosial. Maka tidak mengherankan apabila bangsawan di Jawa membedakan payung yang digunakan oleh elit keraton dengan bupati atau punggawa-punggawa lainnya. Payung sebagai lambing kekuasaan dan otoritas pertama kali muncul pada relief-relief Asirya dan patung-patung Persepolis, zaman Mesir Kuna. Sementara itu, di Asia sendiri, payung dianggap suci sebab berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius (Longhurst, 1979: 1). Di India, payung yang dikenal dengan istilah chattrra merupakan salah satu simbol dari lima simbol kekuasaan dari raja atau rajakuda (Liebert, 1976: 60). Pola kebudayaan seperti ini yang banyak diadopsi di Jawa, terutama di Keraton Yogyakarta.

Budaya menggunakan payung di kalangan bangsawan Yogyakarta dicatat jelas oleh Raffles. Di dalam periode kekuasaan Inggris (1811-1816) di Jawa, Raffles melihat kebiasaan menggunakan payung diikuti dengan kelas-kelas sosial. Tidak semua orang menggunakan payung dan tidak semua payung memiliki warna cerah. Lagi-lagi dalam bukunya *History of Java*, Raffles menyebut Sultan menggunakan payung kemas atau seluruh bagian payung berwarna emas. Payung model seperti itu hanya digunakan oleh Sultan saja, tidak ada yang menyamai kecuali dengan ukuran yang lebih kecil. Sementara permaisuri, anggota keluarga kerajaan, keluarga permaisuri, dan selir dari kerabat kerajaan menggunakan payung berwarna putih. Para pejabat setingkat bupati dan tumenggung menggunakan payung berwarna hijau dengan diberi pinggiran warna emas. Sedangkan pejabat bergelar anggabei, ranga, mantri, dan setingkatnya menggunakan payung berwarna merah. Bagi pejabat setingkat kepala desa dan pemimpin golongan rendah, payung mereka berwarna gelap (Raffles, 2014: 212).

Payung selalu dibawa di belakang pemiliknya kemanapun mereka pergi, sebab payung menjadi penanda martabat pemiliknya.

Meski demikian, di dalam tembok keraton terdapat aturan khusus terhadap penggunaan, baik warna pada plak payung maupun lokasi dimana plak payung terbuka. Payung keberasan Sultan akan selalu terbuka dan berada di belakang Sultan baik di dalam maupun di luar keraton. Berbeda halnya untuk pejabat setingkat bupati atau dengan kelas lebih rendah lagi, payung-payung mereka hanya diperbolehkan dibuka setelah keluar dari halaman Kemandungan. Halaman ini menjadi ruang terbuka yang menjadi pembatas antara ruang seremoni keraton dengan ruang publik. Bagi seorang pangeran, aturan payung yang tertutup tidak berlaku. Para pangeran terutama putra mahkota mendapat kesempatan untuk membuka payungnya hingga di halaman Kemandungan dan gerbang Danapratapa (Poerbaja, 2003: 217-218). Aturan mengenai penggunaan payung ini benar-benar menunjukkan status pemiliknya dalam kelas sosial.



Gambar 28. Payung Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan diameter plak paling besar tetap terbuka meski di dalam keraton. (Sumber: KITLV).



Gambar 29. Payung-payung yang terbuka di Alun-alun Utara saat peristiwa Garebeg 1910 (Sumber: KITLV).

Aturan penggunaan payung kemudian ditulis rinci pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V (1822-1858). Berdasarkan arsip naskah no. 72 yang ditulis dalam bentuk percakapan atau *antawacana*, disebutkan aturan warna plak serta nama-nama kerabat keraton yang dapat mengenakan payung. Arsip ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Margana (2010: 106-109), yang berbunyi sebagai berikut:

1. Payung gilap rata semua, digunakan raja.
2. Payung gilap Jawa, digunakan Kanjeng Tuan Residen atau permaisuri raja.
3. Payung putih atas diprada separuh, bawah dengan seret besar, digunakan Kanjeng Tuan Residen.
4. Payung bermotif sayap kepodang tlacap atas-bawah, sekarang yang menggunakan:

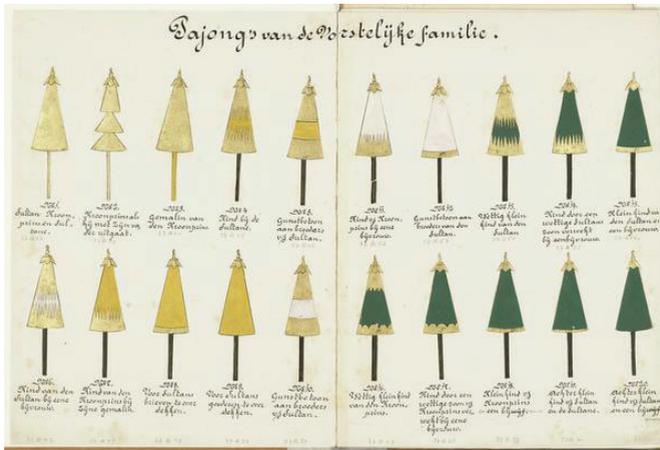
- a. Kanjeng Bendera Raden Ayu Sepuh
 - b. Gusti Pangeran Hangabehi
 - c. Raden Ajeng Gusti Sekar Kedhaton
 - d. Raden Mas Gusti Mukhamad
 - e. Raden Ayu Gusti Hangabehi
 - f. Raden Ayu Gusti Angger
5. Payung hadiah bermotif padhang rembulan, sayap kepodang, seret sepertiga atas-bawah, sekarang yang menggunakan:
 - a. Bendera Pangeran Harya Puger
 - b. Bendera Pangeran Harya Suryaningalaga
 - c. Bendera Pangeran Harya Purwadiningrat
 - d. Bendera Pangeran Harya Suryadiningrat
 - e. Bendera Pangeran Harya Suryanegara
 - f. Bendera Pangeran Harya Yudanegara
 6. Payung bermotif sayap kepodang dengan seret, memang dianggap payung untuk surat dari Betawi atau dari Surakarta, sekarang yang menggunakan:
 - a. Bendera Pangeran Harya Suryawijaya
 - b. Bendera Pangeran Harya Pujakusuma
 - c. Bendera Pangeran Harya Juminah
 7. Payung bermotif sayap kepodang rata semua, memang merupakan ampilan atau sangkrawen milik raja, sekarang yang menggunakan:
 - a. Pangeran Harya Pakuningrat
 - b. Pangeran Harya Natapraja
 8. Payung bermotif sayap angsa telacap atas-bawah, digunakan putra raja baik laki-laki maupun perempuan.
 9. Payung bermotif sayap angsa telacap atas-bawah, yang menggunakan para pangeran kerabat raja atau selir raja yang bergelar Raden Ayu.

10. Payung bermotif sayap angsa seret digunakan selir raja tanpa gelar Raden Ayu.
11. Payung bermotif sayap manyura telacap atas-bawah digunakan cucu raja yang dari Kanjeng Ratu, yang berasal dari permaisuri raja.
12. Payung bermotif sayap manyura telacap bawah digunakan cucu raja yang berasal dari Kanjeng Ratu, yang dari selir.
13. Payung padhang rembulan sayap manyura, digunakan Raden Adipati dan Bupati Wedana Lebet satu.
14. Payung antanu seret atas-bawah digunakan Bupati Wedana Jawi-Lebet.
15. Payung tigan satugel dengan motif sayap betet, digunakan Bupati Anom.
16. Payung hijau seret digunakan cucu raja.
17. Payung bermotif kendhit papasan, tengah merah, atas-bawah diprada sepanjang 2 nyari, digunakan bupati, kepala desa.
18. Payung hijau rata semua, digunakan cicit raja.
19. Payung bermotif sayap gelatik seret, digunakan Wedana Punakawan.
20. Payung bermotif sayap gelatik kendhit, digunakan distrik.
21. Payung bermotif sayap bangau rata semua, digunakan Bekel Prajurit.
22. Payung bermotif sayap dhandhang seret digunakan mantri.
23. Payung hitam rata semua, digunakan penajungan.
24. Payung merah seret digunakan Lurah Pangrembe.
25. Payung merah muda rata semua, digunakan pinisepuh atau orang tua.
26. Payung merah rata semua, digunakan Demang.
27. Payung merah rata semua, digunakan Pangindung Bakul.

Pada periode Sri Sultan Hamengku Buwono VII, aturan mengenai payung tidak hanya dituliskan, tetapi juga digamba sebagai acuan. Di dalam naskah berjudul Gambar Songsong (kode koleksi W352 dan W353) disebutkan bahwa setiap kedudukan atau jabatan berhak menggunakan payung, sejak dari Sultan hingga pegawai keamanan pabrik atau rangka pulisi pabrik (Lindsay, 1994: 220-221). Di dalam naskah tersebut divisualkan aturan mengenai warna plak yang dapat digunakan sesuai dengan hirarki kepangkatan yang disandang (Isnurwindyadari, 2004: 105-107). Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Warna emas pada plak dan tangkai payung merupakan penanda payung raja, permaisuri raja, dan putra mahkota beserta permaisuri dari putra mahkota. Payung yang dimaksud adalah Payung Gilap Terus dengan ukuran yang berbeda.
2. Warna emas pada seluruh plaknya, merupakan penanda payung putra raja yang bergelar Kanjeng Panembahan, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati, dan putra paling sulung.
3. Unsur warna emas yang mendominasi warna kuning maupun putih merupakan payung putra raja dari permaisuri dan selir, serta istri dari putra raja tersebut.
4. Unsur warna emas yang mendominasi warna hijau merupakan payung cucu Sultan dari permaisuri dan selir, patih (tidak bernama pangeran), pengulu kakim, wedana gedhe prajurit, bupati nayaka luar dan bupati nayaka dalam, dan bupati patih.
5. Warna kuning yang mendominasi plak merupakan payung pangeran sentana
6. Warna putih yang mendominasi plak merupakan payung pangeran sentana, selir dari putra raja bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati (KGPA), patih (dengan nama pangeran).

7. Plak dengan unsur warna hijau yang mendominasi merupakan payung bupati polisi, selir dari Putra Sultan, Buyut Sultan, Canggih Sultan, Wareng Sultan, pengulu landrad, wedana keparak para Gusti bergelar nyai riya, bupati enom, riya bupati enom.
8. Warna biru yang mendominasi plak merupakan payung wedana punakawan, riya penewu, penewu tuwa, dan jabatan lain yang setara, serta kepala distrik
9. Warna biru muda yang mendominasi plak merupakan ciri payung lurah punakawan, penewu, dan jabatan lain yang setara, kliwon keparak para gusti, dan penewu kabupaten.
10. Warna merah yang mendominasi plak merupakan payung mantri reh nayaka luar, reh prajurit jajar langenastro, reh kepatih, jaksa, gladag, kriya pangkat penajungan, reh nayaka luar, prajurit kepatih, jaksa, gladag, kriya, paneket dan pangrembe, pangkat banjaran, reh nayaka luar, kepatihan, jaksa,, gladag, dan kriya.
11. Unsur warna merah jambu yang mendominasi plak merupakan payung lurah pangrembe, sersan mantrijero, opperwachtmeester, wachtmeester, panjombret langenastra.
12. Unsur warna hitam yang mendominasi plak merupakan payung asisten panji, mantri reh nayoko luar, bekel tuwa punakawan, lurah keparak para gusti, mantri reh kori, taman, mantri kabupaten dan jabatan lain yang setara, pangkat pananjungan reh nayaka dalam, kori, taman, pamajengan, punakawan, pangulon, kasentanan dan kadipaten serta jabatan lain yang setara. Selain itu songsong dengan plak warna hitam juga digunakan oleh pangkat banjaran, reh nayaka dalam, kori, taman, pamajengan, pangulon, pamicis, kadipaten, punggawa polisi yang pankatnya sama dengan jajar.



Gambar 30. Litografi aturan payung bagi Sultan dan kerabat keraton yang diterbitkan kira-kira tahun 1900. (Sumber: KITLV).

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono X, tidak ada yang diperkenankan menggunakan payung kecuali sultan. Payung juga digunakan untuk memayungi benda milik atau diperuntukkan bagi sultan, seperti halnya pusaka dan makan-minum bagi sultan. Sementara itu, payung difungsikan pula sebagai pusaka untuk memayungi sultan dan beberapa pusaka lain saat prosesi jamasan pusaka. Payung digunakan pula untuk memayungi benda-benda yang akan dilabuh pada prosesi upacara Labuhan (Isnurwindyadari, 2004: 107-108). Di sisi lain, secara ideoteknis payung digunakan pula sebagai sarana upacara ritus kehidupan, seperti pernikahan dan kematian. Pada upacara pernikahan, penggunaan payung dapat dilihat pada Abdi Dalem Edan-edanan, para penari bedhaya ataupun putri Sultan yang sedang melakukan kirab pengantin. Pada upacara Garebeg Mulud, payung berfungsi sebagai pusaka pendukung seremonial, yang dipasang di pelataran Bangsal Pagelaran. Kedua payung tersebut merupakan Payung Ageng dan Payung Bawat (Isnurwindyadari, 2004: 112-114).

MENULIS KEMBALI PATRON BUSANA ABAD KE-20

Melestarikan busana tidak sebatas menjaga budaya material untuk tetap digunakan secara turun-temurun. Definisi praktisnya lebih dari sekedar mewariskan, tetapi menempatkannya sebagai dokumen penanda. Dalam hal ini, busana dapat berfungsi sebagai penanda kelas-kelas sosial, legitimasi kekuasaan, sampai pada periode pemerintahan. Tidak jarang pula terdapat kekuatan magis yang diselipkan pada materialnya, sebagai daya untuk penggunaanya.

Periode terdekat dari berbagai arsip busana yang dapat direkonstruksi secara visual berasal dari pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Di dalam dokumen arsip Pranatan Djendralan Hingkang Saking Nagari, 1937 yang mengatur protokoler kunjungan Gubernur Jenderal Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkeborgh Stachouwer bersama Kandjeng Njonjah ke Keraton Yogyakarta, tercatat aturan busana yang harus dikenakan oleh para pangeran dan pejabat di keraton. Beberapa istilah busana yang kerap kali keluar untuk menyambut gubernur maupun residen adalah cara welandi atau dalam litografi keraton dikenal dengan istilah busana Jendralan. Di sisi lain, busana beskap, kampuh dan penutup kepala yang disebut kuluk digunakan oleh patih maupun abdi dalem berpangkat wedana⁶⁴.

[...] 1. Goesti Pangeran Harjo Tedjokoesoemo 2. Goesti Pangeran Harjo Hadikoesoemo, sami ngagem tjoro welandi montering pethak ngangem sabet 3. Papatih Dalem, sarta abdi dalem Boepati Pangreh Prodjo Ngajogjakarta, mangangge koeloek kanigoro, rasoekan beskap pethak, bebedan ngangge toempal (doewoeng branggah), ananging Papatih Dalem ngangge rante [...] 4. Abdi Dalem Wedono Kalasan, sarto Assistant Wedono Prambanan mangangge koeloek soep oetawi tjemeng rasoekan beskap pethak bebedan (doewoeng branggah) [...]

Terjemahan:

1. Gusti Pangeran Haryo Tedjokusumo, 2. Gusti Pangeran Haryo Hadikusuma, keduanya mengenakan (busana) cara welandi yang diberikan berwarna putih menggunakan sabet.
3. Patih dan abdi-Dalem Bupati Pangreh Praja Ngayogyakarta

64 Dirujuk langsung dari Pranatan Lampah-lampah Badhe Rawoehipoen Kangdjeng Toewan Inkgang Witjaksono Goepoernoer Generaal Ing Nederlandsche-Indie, Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkeborgh Stachouwer sarta Kandjeng Njonjah wonten ing Nagari Dalem Ngajogjakarta (Pramutomo, 2009: 145).

menggunakan kuluk kanikaga, busana berkap putih, berkain jarik dengan tumpal (kering branggah), tetapi Patih menggunakan rantai ... 4. Abdi-Dalem Wedana kalasan, serta asisten Wedana Prambanan menggunakan kuluk warna sup atau hitam, berbusana beskap putih dengan kain jarik (keris branggah).

Istilah *montering* (*montereng*) mengacu pada busana yang diberikan oleh sultan maupun Pemerintah Kolonial berkaitan dengan kenaikan pangkat. Dari busana montering tersebut, terdapat perbedaan warna yang berfungsi sebagai penanda kepangkatan. Misal saja, Gusti Pangeran Haryo Hadikusumo mengenakan busana cara welandi montering pethak 'putih' lengkap dengan sabet, sementara Gusti Pangeran Haryo Cakraningrat menggunakan busana cara welandi montering idjem 'hijau' tanpa mengenakan sabet⁶⁵. Sultan sebagai kepala negara pun mengenakan busana khusus, yang disebut dalam arsip sebagai Agem Dalem Djendral Major petak atau busana Jendralan berwarna putih yang dilengkapi dengan ampilan dalem manggoeng⁶⁶.



Gambar 31. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dengan Gubernur J. Bijleveld (dan Gubernur Jenderal A.W.L. van Starkenborgh Stachouwer di rumah dinas gubernur Yogyakarta, tahun 1937. (Sumber: KITLV).

65 [...] Wedono Ageng Pradjoerit Pangeran Harjo Tjakraningrat mangangge tjoro welandi, montering idjem

66 [...] Wijos dalem metoek doemateng setatsijoen Toegoe, mangagem Agem Dalem Djendral Major petak, ampilan dalem manggoeng [...].



Gambar 32. Busana Mayor Jendral putih yang dikenakan oleh Sultan Hamengku Buwono VIII saat menjemput asisten residen Christiaan Abbenhuis di Stasiun Tugu tahun 1938. Terdapat perbedaan penggunaan slempang pada busana Sultan. (Sumber: KITLV).

Mengenai protokoler busana yang dikenakan oleh sultan dalam peristiwa kunjungan Gubernur Jendral Hindia Belanda nampaknya tidak hanya busana Mayor Jendral berwarna putih saja. Namun dalam satu rangkaian kunjungan balasan, sultan mengenakan agem-Dalem Prajurit beserta para pangeran, patih, dan abdi dalem golongan bupati nayaka⁶⁷. Aturan busana ini apabila diperhatikan nyatanya sudah diterapkan sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I. Pada peristiwa yang sama, sultan pertama hendak menjemput Ideler Jan Greeve menuju Pesanggrahan Reksanegaran. Rentang waktu antara tahun 1788 dan 1937 akhirnya tidak benar-benar memberi sekat yang mereduksi protokoler busana di keraton meski terpaut 149 tahun setelahnya. Di sisi lain terdapat pada arsip kunjungan gubernur tersebut, terdapat aturan busana pengageman Dalem Garebegan yang dikenakan sultan saat menerima istri gubernur jendral beserta putra-putrinya⁶⁸.

67 [...] wijos dalem visite doemateng Goepernoeran mangagem Agem dalem pradjoeritan ... kaderekaken poro Bendoro Pangeran, Papatih dalem, sarto abdi dalem Boepati Najoko, poenopo dene abdi dalem Boepati Prodjo, mangagem utawi mangangge Pradjoeritan.

68 Kangdjeng Njonjah sarto poetro-poetronipoen poetry Kangdjeng Toewan Ingkang Witjaksono Goepernoer Generaal ... katampi para Bendoro Pangeran kados adat, Pengageman Dalem Garebegan.



Gambar 33. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII bersama Gubernur Yogyakarta P.R.W. van Gessler Verschuur pada upacara Garebeg, tahun 1930. (Sumber: KITLV)

Beberapa aturan mengenai busana juga disebutkan di dalam protokoler tersebut, seperti wangkidan kanigoro, rasukan sutro ngagem karsed, rante sarta peniti, nyampingan. Adapula istilah busana garebegan⁶⁹ bagi abdi dalem kelompok wiyaga atau penabuh gamelan, busana warna biru dan hijau⁷⁰ bagi abdi dalem kelompok musikan, serta catatan busana bagi para elit perempuan keraton pada saat itu. Wakil garwo-Dalem Kanjeng Ratu Pembayun tercatat mengenakan busana berbahan sutra yang dijahit panjang lengkap dengan perhiasan pendukungnya, seperti bros berbentuk peniti susun 3 atau hanya 1 buah. Agaknya penggunaan perhiasan menandai kepangkatan bagi elit perempuan di keraton.

69 [...] abdi dalem Nijogo ingkang naboeh waoe sami mangangge garebegen, [...]

70 Abdi dalem Moesikan (strijk-orkest) mangangge idjem, wantji djam 8 endjing sasampoeno sami sowan wonten Kagoengan Dalem Bangsal Mandolosono, [...] mangangge biroe, wantji djam 4.30 sonten sasampoeno sami sowan wonten Kagoengan Dalem Bangsal Mandolosono.

Garwo Dalem Kangdjeng Ratoe Pembajoen mangagem rasoekan soetro pandjang peniti soengsoen tigo, ngagem tjenelo. [...] Poro Bendoro Poetri Poetro ingkang taksih kagoengan garwo sarto poro Poetri garwanipoen poro Bendoro Pangeran poenopo dene Raden Ajoe Tjakraningrat ... mangagem rasoekan soetro pandjang, peniti soengsoen tigo, ngagem tjenelo, ananging poro Poetri garwanipoen poro Bendoro Pangeran ngagem peniti satoenggal.

Terjemahan

Permaisuri sultan Kanjeng Ratu Pembayun mengenakan baju panjang sutra (berhiaskan) bros peniti susun tiga, mengenakan selop. Para Bendara Putri putra sultan yang masih memiliki suami serta istri dari Bendara Pangeran termasuk pula Raden Ayu Cakraningrat menggunakan busana panjang sutra, (berhias) bros peniti susun tiga, menggunakan selop, tetapi para istri dari Bendara Pangeran hanya mengenakan bros peniti satu.

Penggunaan sutra sebagai material busana elit istana sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Jika menilik kembali sejarah wastra di Nusantara, masyarakat Jawa telah mengenal sutra berabad-abad silam. Sementara di keraton, penggunaan sutra di samping digunakan sebagai busana landung 'kebaya panjang', digunakan pula sebagai material pembuat sabuk pengikat berpola patola atau cindhe. Lain halnya dengan beludru yang kemudian juga ditemui sebagai material busana yang dihiasi payet maupun sulaman benang emas dan kancing-kancing logam⁷¹. Di keraton penggunaan sutra kemudian

71 Raffles cukup detil dalam mendeskripsikan busana para elit-elit keraton Jawa, sekaligus material yang digunakan. Bahkan istilah payet dan benang-benang emas (sulam gim) juga menjadi perhatiannya. Pada umumnya payet dan sulaman benang emas ini ditemukan pada busana berbahan beludru (Raffles, 2014: 55).

diatur, seperti halnya busana sutra diperuntukkan khusus bagi anak-anak usia 10-11 tahun yang berbentuk kamus, disulam dari kain strimin dan benang wool⁷².



Gambar 34. Potret rasukan sutra panjang dengan peniti susun tiga serta selop bagi perempuan. Foto tersebut merupakan putri-putri dari Sri Sultan Hamengku Buwono VI yang didokumentasikan tahun 1865. Raden Ajeng Moetokina (kiri), Raden Ajeng Soepiah (tengah), dan Raden Ajeng Saripa. (Sumber: KITLV).



Gambar 35. Potret Raden Ajeng Soepiah dengan busana sutra panjang, perhiasan pada busana serta cincin yang melingkar di beberapa jari ditambah dengan rantai kipas serta selop. Raden Ajeng Soepiah merupakan putri pertama dari Sri Sultan Hamengku Buwono VI. (Sumber: KITLV).

Periode pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII agaknya menjadi masa-masa terdekat dengan pemerintahan sultan saat ini yang dalam sudut pandang arsip masih dapat ditelusuri. Periode arsitokasi yang masih kental pada awal abad ke-20 tersebut melahirkan pula tatanan

72 Sutra biasanya digunakan pada busana-busana pengantin Jawa, seperti celana, hiasan tepi kain kampuh yang berupa rumbai-rumbai benang sutra, dan sabuk (Wibowo, dkk. 1990: 2-78).

busana yang dikenakan berdasarkan upacara kerajaan. Platenalbum te Jogjakarta voor het Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap yang disusun oleh Ir. J.L. Moens tahun 1934 menuliskan 8 aturan busana yang digunakan dalam acara berbeda seperti 1. Ngabekten, 2. Jumenengan Pangeran Pati, 3. Jumenengan Pangeran, 4. Jumenengan Ratu, 5. Ketik (pasah), 6. Tetesan, 7. Supitan, dan 8. Tingalan Dalem. Sultan bertakhta selalu mengenakan busana keprabon Grebegan dalam setiap upacara kebesaran di keraton. Sementara terdapat satu aturan busana khusus bagi ‘pemeran utama’ dalam upacara tersebut. Katakanlah pada upacara Jumenengan Pangeran Pati, para pangeran mengenakan busana kebesaran, berkampung dengan berbagai perhiasan yang emas.

Bendara Pangeran sampun sami sowan pepak wonten kagungan Dalem Bangsal Sripenganti, mangagem wangkidan biru, pethat-mentul, rasukan sikepan balenggen, kampung mawi clana cindhe, sangsangan karset rante, sarta ngagem wangkingan (Platenalbum Jumenengan Pangeran Pati, 1934: 143).

Terjemahan:

Bendara Pangeran sudah lengkap berada di kagungan Dalem Bangsal Sripenganti, menggunakan penutup kepala (kuluk) biru, pethat-mentul, busana sikepan balenggen, kain kampung dengan celana cinde, berkalung rantai karset, serta menggunakan keris.

Pada momen peringatan kelahiran sultan, terdapat satu perayaan yang menghadirkan sultan bertakhta di Bangsal Kencana. Sultan Hamengku Buwono VIII dalam arsip tingalan Dalem tahun 1934 menggelar upacara megah dengan mengundang residen dan seluruh kerabat keraton, termasuk para abdi-Dalem. Dituliskan dalam arsip tersebut tata busana yang dikenakan oleh sultan secara rinci, termasuk pula berbagai perhiasannya.

Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kangjeng Sultan punika menawi badhe tedhak miyos siniwaka kaleres tingalan-Dalem mangagem kadosta: wangkidan kanigara, ukel keling, pethat mentul rinonyok ing inten barleyan, sikepan lugas saking baludru wungu utawi cemeng, miturut punapa ingkang dados kersa Dalem, mangagem kalung rante ronyokan inten barleyan, ngagem bintang ugi karonyok inten barleyan, nyamping seratanipun parang-rusak barong, ngagem paningset serta kamus binludir, sarta ngagem wangkingan rinengga oncen, ngagem selop bludiran (Platenalbum Tingalan Dalem, 1934: 220).

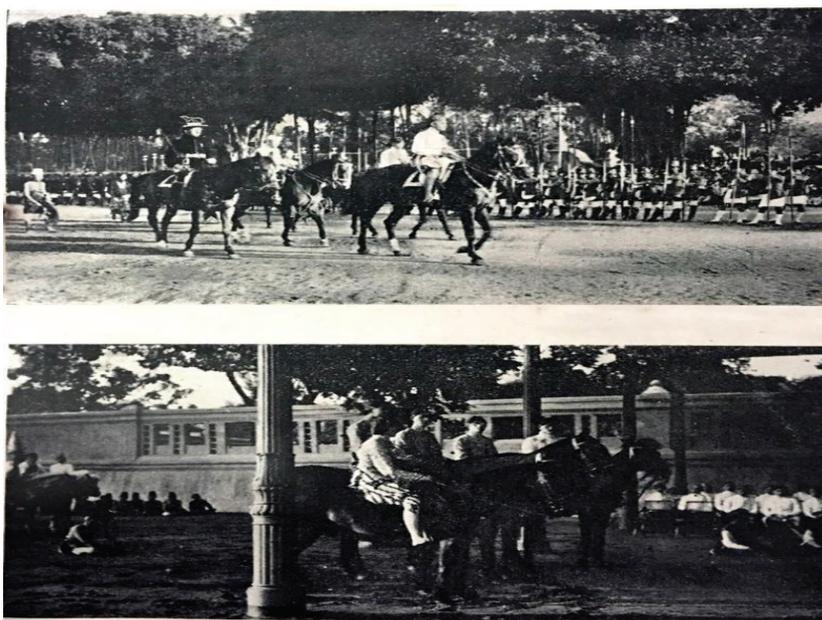
Terjemahan:

Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kangjeng Sultan apabila keluar siniwaka pada upacara tingalan-Dalem menggunakan busana antara lain: penutup kepala (kuluk) kanigara, ukel keling, pethat mentul berhias intan berlian, busana sikepan polos beludru warna ungu atau hitam, sesuai dengan keinginan sultan, mengenakan kalung rantai (karset) berhiaskan intan berlian, juga bros bintang (komandur) yang berhias berlian, kain jarik tulis parang rusak barong, serta sabuk pengencang dan kamus yang dibludir, tidak lupa keris yang dihias untaian melati, dan selop disulam.



Gambar 36. Busana yang dikenakan dalam upacara peringatan Tingalan-Dalem di Bangsal Kencana oleh Sultan Hamengku Buwono VIII. (Sumber: Majalah Hoedyana-wara, 1941).

Berdasarkan pembacaan arsip upacara pada masa Sultan Kedelapan, tata aturan busana yang diberlakukan cukup kompleks. Kondisi inilah yang tetap diberlakukan pada awal pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX. Sultan Kesembilan secara detil mewarisi tradisi berbusana dari Sultan Kedelapan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa aturan busana pada upacara Tuguran, Malam Selikuran, dan Ngabekten yang masih dipertahankan. Di dalam Majalah Hoedyana-wara yang dikeluarkan oleh Dwara-warta Keraton Yogyakarta, Desember 1941, terdapat berbagai ulasan mengenai upacara besar yang dihadiri oleh berbagai kelas pejabat keraton. Pada majalah tersebut dokumen visual busana yang dikenakan oleh para pangeran, prajurit hingga abdi-Dalem begitu beragam.



Gambar 37. Sultan Hamengku Buwono IX sedang memantau jalannya gladi resik upacara Garebeg Siyam 1872 Jawa didampingi oleh KPA Cakraningrat. (Sumber: Majalah Hoedyana-wara, 1941).



Gambar 38. Busana Pasowanan Ngabekten yang dikenakan oleh Bendara Pangeran (paman, kakak, dan adik sultan) di Bangsal Kencana. Terlihat pada gambar para pangeran berkain kampung tetapi luka busana atau tidak mengenakan busana di bagian atas. (Sumber: Majalah Hoedyana-wara, 1941).

Pada periode awal pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tata negara di Yogyakarta masih bersifat monarki. Sultan ke-9 naik takhta tahun 1941, sementara Indonesia proklamasi sebagai negara baru tahun 1945. Dengan kata lain, tata aturan keraton masih bersifat mutlak sebagai aturan negara selama kurun waktu 1941-1945. Peran Sultan dalam mengelola tata busana ditunjukkan dengan diterbitkannya 2 aturan busana bagi abdi dalem. Aturan busana ini memuat tentang tata busana harian saat hadir ke keraton dan ke kantor di Kepatihan.

Aturan Busana harian saat ke Keraton.

Dhawoeh bab pangangge sowan padintenan ing Kadhaton

Angka: 24/XIX/P.A.K.

Serat saking Parentah Ageng Karaton

Katoer Kawedanan

Wijose dhawoeh timbalan-dalem Ngarsadalem Sapejandalem
Inggeng Sinoewoen, idjeman:

Menira kakarsakake andhawoehake, wiwit ing dinten Senen
Legi tanggal kaping 23 Soera Wawoe 1873, oetawi 19 Febroeari
1942 peniki:

1. Abdi-dalem Boepati sapangandap sadaja, manasi sowan loemebet ing Kadhaton, kakarsakake ngangge rasoekan pranakan, mboja ngangge dhoewoeng.
2. Abdi-dalem kaseboet nginggil ingkang padintenane sowan loemebet ing Kadhaton mangangge rasoekan beskap pethak kakarsakake ngangge rasoekan pranakan, boja ngangge dhoewoeng.
3. Abdi-dalem Boepati ingkang anglampahi ajahan-dalem tjaos wenten kagoengan-dalem Bangsal Srimanganti sarta abdi-dalem Panewoe, Mantri sapanoenggilane, manawi nglampahi ajahan-dalem tjaos, sami kakarsakake mangangge sindjang, rasoekan pranakan, oedheng-oedhengan, mboja ngangge dhoewoeng.
4. Manawi kaleres Tingalan-dalem ing dinten Satoe Paing, sowane abdi-dalem Boepati sadaja, kakarsakake ngangge rasoekan pranakan, boja ngangge dhoewoeng.
5. Abdi-dalem sadaja ingkang sowan padintenan njamboet damel wenten kagoengan-dalem Kantor Kapatihan sapanoenggilane, ingkang mangangge rasoekan beskap pethak, badhe sowan loembet ing Kadhaton namoeng sekedhap, teksih kapareng mangangge kados adat.

Ingkang penikoe ladjeng dhomawahe penapi ing saperloene,
menira soemangga.

Sinerat tanggal kaping 23 Soera Wawoe 1873

Oetawi kaping 9 Februari 1942

Pangageng Parentah Ageng Karaton.

Pangeran.

(wg.) HANGABEHI

Aturan Busana harian saat ke Kepatihan

Dhawoeh bab pangangge sowan padintenan ing kantor Negari
Angka 74.

Tapak-asma-dalem

Pangeran Aria Adipati Danoeredja.

Wijose sira andhawoehna, saiki kang dadi karsaningsoen,
gegandhengan karo ing wektoe perang iki, abdi-abdiningsoen
kang padha seba njamboet gawe padinan ana ing kantor,
kanga date menganggo beskap poetih, pada Ingsoen kersakake
nganggo kaja ing ngisor iki:

1. kang sebane ana sadjerone tjepoeri Kedhaton, pada
Ingsoen kersakake menganggo klambi pranakan, ora
nganggo keris;
2. kang sebane ana sadjabane tjepoeri Kethayon padha
Ingsoen kersakake menganggo klambi belah-banten, kang
ora warna poetih, oega ora nganggo keris;

3. kang kaseboet adeg-adeg 2, jen loemeboe Kedhaton,
mitoeroet kang kaseboet adeg-adeg 1.

Kang ikoe, sira bandjoer andhawoehna apa ing saperloene,
adja nganti kekoerangan, Ingsoen pitaja marang sira.

Slasa ping : 24 : Soera Wawoe 1873

Oetawa ping : 10 : Februari 1942

Setelah memasuki tahun 1945, memori busana di Keraton Yogyakarta justru terhenti pada periode ini. Reduksi busana yang masif, penyederhanaan tata busana, hingga produsen busana untuk keraton mulai menipis. Kondisi ini merupakan dampak dari Penjajahan Belanda sekaligus Pendudukan Jepang di Indonesia⁷³. Sementara itu, periode pemerintahan Sultan Hamengku Buwono X (1989-sekarang) cenderung mewarisi memori busana yang telah tereduksi sebelumnya. Busana-busana inilah yang menjadi ingatan bersama dan dilestarikan sebagai busana adat pada saat ini. Pada sumber-sumber terbatas terbitan keraton, disebutkan bahwa dalam upacara ngabekten, jenis busana yang menjadi bagian dari pranatan antara lain busana atela atau pranakan bagi abdi dalem laki-laki. Sementara, sultan dalam pesowanan ngabekten mengenakan baju takwa atau surjan.

*Para Abdi-Dalem Pangeran Sentono Punokawan/ Kaprajan, para
Abdi-Dalem Bupati Nayoko Punokawan/ Keprajan, Kepala Daerah,
Mantu-Dalem, sasampuno sami sowan wenten ing kuncung
tratag Kagungan-Dalem Bangsal Kencono, mangange rasukan*

73 Di dalam kutipan buku Takhta untuk Rakyat, dituliskan bahwa 'rakyat mulai sadar bahwa yang mereka hadapi sekarang adalah musuh beneran dan bukan sekedar latihan. Keadaan politik pemerintahan di Yogyakarta sungguh tidak seimbang. Disebutkan bahwa pihak Belanda memiliki persenjataan cukup lengkap, sementara pihak Yogyakarta hanya bersenjata mini serta kondisi yang tidak siap. Para peristiwa penyerbuan Yogyakarta, pasukan Belanda dengans sangat cepat menguasai lapangan terbang, dan terus menyebar ke arah Yogyakarta, dan mengepung kota (Roem, dkk, 2011:67).

atela, wiron engkol, tanpa cenela. [...] Miyos Dalem jujuk lenggah wenten ing Kagungan-Dalem Bangsal Kencono, mangagem rasukan takwa sarto cenela, kaderekake Ampilan-Dalem sarto Agem-Dalem Songsong (Lampah-lampah Pesowanan/ Parakan Ngabekten Syawal Jimakir 1930/ Januari 1998: 2-3).

Terjemahan:

Para abdi-Dalem kerabat pangeran golongan punakawan/ kaprajan, para abdi-Dalem berpangkat bupati nayoko punakawan/ kaprajan, kepala daerah, menantu sultan, setelah hadir di kuncung tratag Bangsal Kencono menggunakan busana atela, kain jarik dilipat wiru engkol, tanpa selop. Sultan keluar duduk di tengah Bangsal Kencono, menggunakan busana takwa serta selop, diikuti oleh ampilan-Dalem serta agem-Dalem payung.

Tata aturan busana yang saat ini dibakukan oleh Keraton Yogyakarta berupa busana lurik pranakan bagi para abdi-Dalem laki-laki. Adapula busana atela berwarna hitam maupun putih yang digunakan oleh abdi-Dalem berpangkat khusus atau dari golongan kanca kaji. Pada abdi-Dalem perempuan, busana yang dikenakan cenderung lebih beragam. Bagi para kelompok sinden, mereka menggunakan busana yang disebut janggan atau kebaya hitam tertutup dengan jahitan sampai menutupi leher. Adapula kelompok keparak yang mengenakan semekan setiap harinya. Pada upacara khusus, abdi-Dalem ini mengenakan busana kampuh atau dikenal dengan istilah dodotan⁷⁴. Pada upacara-upacara khusus, seperti kenaikan takhta, ngabekten, atau jamasan pusaka,

74 Keempat orang *Abdi Dalem Keparak* yang mengenakan busana *kampuhan* tersebut melaksanakan *dhawuh* (tugas) untuk membawa empat buah *Ampilan Dalem* yang merupakan kelengkapan yang mengiringi kehadiran raja dalam upacara. *Ampilan* tersebut terdiri atas *Kanjeng Kyai Sabet* (pedang), *Kecohan* (tempat meludah), *Cepuri* (tempat untuk keperluan makan sirih), dan *Wadhah Ses* (tempat rokok) (Condrongoro, dkk. 2014: 9).

hanya 4 keparak yang mendapat tugas untuk membawa ampilan sultan. Keempat keparak tersebut setidaknya berpangkat lurah.

Pada satu sumber lisan yang diutarakan oleh Nyi Kanjeng Raden Tumenggung Hamong Tejonegoro, kain kampuh yang dikenakan oleh keparak panjangnya hingga ke bawah lutut, kemudian ditambahkan kain jarik di luar. Terdapat kelengkapan lain berupa wedung, sejenis senjata tajam mirip golok. Abdi-Dalem Keparak hanya mengenakan busana kampuh saat menjalankan tugas pada upacara kerajaan. Sebagai penanda saat bertugas, keparak akan memakai samir yang berupa kain berbentuk pita yang dikalungkan di leher hingga dada⁷⁵.

Menyoal penggunaan kain kampuh, aturan baku busana yang diterapkan saat ini masih mengacu dari masa Sultan Hamengku Buwono VIII. Kain kampuh dapat dibagi menjadi Kampuh Blenggen dan Kampuh Lugas. Kampuh Blenggen adalah kampuh yang salah satu sisinya dibalengi atau dipilin menjadi rumbai-rumbai dan mempunyai tengahan. Tengahan adalah bagian polos tidak bermotif pada sentral kain. Tengahan pada kain kampuh untuk putra-Dalem memiliki pilihan warna-warna seperti hijau, merah muda, atau biru muda. Dari keterangan Nyi Raden Wedana Retno Adiningtyas, kampuh dengan tengahan hanya boleh dikenakan oleh perempuan yang sudah menikah. Kampuh Blenggen ini dikenakan oleh raja, permaisuri, putra raja, garwa ampeyan (selir), cucu raja, patih, dan punggawa kerajaan berpangkat bupati anom ke atas. Kampuh Lugas adalah kampuh tanpa rumbai-rumbai maupun tengahan. Kampuh Lugas dipakai oleh Abdi Dalem Penewu dan golongan mantri ke bawah.

Sebagai busana khusus yang dikenakan pada acara-acara besar, ada ketetapan dalam penggunaan kain kampuh berkaitan dengan

75 Nyi Kanjeng Raden Tumenggung Hamong Tejonegoro sebagai *pengirit* (kepala kelompok) *abdi-Dalem keparak* menjelaskan bahwa para pembawa *ampilan-Dalem* harusnya putri. Para *abdi-Dalem* ini juga dilengkapi dengan *samir* atau kain cindhe seukuran panjang 80 cm dengan lebar 5 cm. *Samir* ini merupakan penanda ketugasan bagi *abdi-Dalem* yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta.

pengguna dan motif kain. Ketentuan ini dibakukan secara tertulis pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) pada tahun 1927. Aturan tersebut dimuat dalam “Rijksblad van Djokjakarta” tentang Pranatan Dalem Bab Jenenge Panganggo Keprabon Ing Kraton Nagari Ngayogyakarta⁷⁶, yaitu sebagai berikut:

1. Sultan, permaisuri atau garwa padmi, putra mahkota, putra pembarep (sulung) sultan dan istri utama, putri sulung sultan, Kanjeng Panembahan, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati memakai kampuh bermotif Parang Rusak Barong.
2. Putra-putri dari permaisuri, putra-putri dari garwa ampeyan (selir), garwa ampeyan, putra-putri dari putra mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, para pangeran sentana beserta istri utama masing-masing, dan patih, memakai kampuh bermotif parang rusak gendreh.
3. Garwa padmi dan garwa ampeyan dari putra mahkota memakai kampuh bermotif parang rusak klithik.
4. Cucu raja, selir dari para pangeran sentana, penghulu, wedana ageng prajurit, bupati nayaka lebet, bupati nayaka njawi, bupati patih ing kadipaten, bupati polisi, pengulu landraad, wedana keparak para gusti (nyai riya), bupati anom atau riya bupati anom, memakai kampuh bermotif semen gedhe sawat gurdha.
5. Buyut, cicit, dan canggah sultan memakai kampuh bermotif semen gedhe sawat lar.
6. Wareng dari sultan, serta abdi-Dalem di bawah riya bupati anom, serta yang bukan pangkat bupati anom, memakai kampuh sembarang kain, tetapi tidak boleh bermotif Parang Rusak Barong, Parang Rusak Gendreh, Parang Rusak Klithik, Semen Gedhe sawat gurdha, semen gedhe sawat lar, udan liris, rujak sente, dan motif

76 Di dalam *Pranatan Dalem Bab Namanipun Panganggo Keprabon ing Nagari Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat (SDISKS HB VIII)* aturan tata busana tidak hanya sebatas motif batik, *kuluk*, ataupun *payung*, tetapi juga garis *plisir* pada celana maupun perhiasan pelengkap busana bagi seluruh kerabat dan *abdi-Dalem*.

parang lainnya. Ketentuan tambahan untuk wareng yaitu tidak diperkenankan memakai kampuh berlatar putih, sedangkan bagi abdi-Dalem di bawah riya bupati anom harus memakai kampuh berlatar hitam.

7. Prajurit berpangkat t lurah hingga sersan, dalang, pesinden tua, memakai kampuh bermotif kumitir.
8. Jajar prajurit Ketanggung memakai kampuh bermotif tlacap.
9. Jajar prajurit Nyutra atau Jager memakai kampuh bermotif kumitir slarak kandang.
10. Abdi-Dalem Gladag memakai kampuh bermotif Slobogan. 77

Aturan mengenai motif pada masa Sultan Kedelapan rupanya diamini oleh Raden Wedana Retno Adiningtyas. Bahkan dalam keterangan lisan beliau, penggunaan kampuh di keraton saat ini dalam upacara besar sudah tidak mengikat. Namun demikian, penggunaan busana kampuhan masih bisa dilihat pada beberapa upacara ageng di Keraton Yogyakarta, yaitu dikenakan oleh sultan dan permaisuri pada saat Jumenengan atau penobatan takhta, para Putra Dalem Kakung saat Upacara Garebeg, pengantin pernikahan, dan beberapa abdi-Dalem Keparak saat bertugas membawa ampilan-Dalem. Selain itu, pemakaian kampuhan juga dapat ditemukan di masyarakat dalam tata rias pengantin corak paes ageng dengan kampuhan sebagai busana utama.

Aturan Busana: Sebuah Konklusi Sederhana

Setelah lebih dari 200 tahun usai Pangeran Mangkubumi membangun peradaban Mataram di Yogyakarta, terjadi berbagai dinamika politik besar-besar. Kebudayaan Mataram terus berkembang

77 Hasil Wawancara Nyi Raden Wedono Retno Adiningtyas pada Desember 2018 & Mari Condronogoro. 2010. Memahami Busana Adat Kraton Yogyakarta, Hal 53-58

seiring dengan perkembangan pola pemerintahannya. Kondisi ini dialami pula pada patron busana yang tercatat dalam arsip-arsip Yogyakarta tahun 1700an akhir hingga 1800an awal. Ditemukannya catatan busana sejak masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I bahwa terdapat aturan berbusana yang kompleks berdasarkan strata kebangsawanan hingga seremonial kerajaan. Hal ini menepis asumsi sejarah tentang perabadian kebudayaan di Yogyakarta yang belum terbentuk pasca Perjanjian Giyanti dan Kesepakatan Jatisari. Setiap pemerintahan sultan dengan sadar menuliskan aturan busana dalam arsip kerajaan atau menarasikannya melalui tembang pada serat dan babad. Kecenderungan penulisan dalam serat dan babad muncul pada periode pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V (1823-1855) hingga Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921). Sementara itu, pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VI (1855-1877), fotografi sudah muncul sehingga terdapat dokumentasi ganda terhadap busana di keraton yaitu dalam bentuk tulisan dan visual.

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX menjadi penanda reduksi busana secara besar-besaran di keraton. Turbulensi politik dan tekanan Kolonial Belanda yang beralih ke Jepang membuat tekanan atas pemerintahan keraton semakin melemah. Pelbagai upacara di keraton pada paruh abad ke-20 pun banyak yang disederhanakan, yang tentu saja berbanding lurus dengan hilangnya memori tata busana pada upacara tersebut. Keraton yang telah terkondisi sesuai dengan pemerintahan Sultan Kesembilan inilah yang diwarisi oleh Sultan Hamengku Buwono X. Pola-pola busana yang dikenakan cenderung berulang dalam berbagai upacara yang berbeda. Memori pada sultan-sultan sebelumnya cenderung tersimpan sebagai arsip dan ingatan jamak dari abdi dalem yang telah hidup melintasi dua masa pemerintahan sultan yang berbeda.

Saat ini, masyarakat dapat menyaksikan beragam busana adat di Keraton Yogyakarta pada saat peristiwa Garebeg Sawal. Momentum

saat Keraton Yogyakarta menggelar upacara besar dengan melibatkan seluruh elemen abdi dalem. Upacara Garebeg diawali dengan keberangkatan para prajurit menuju ke dalam kompleks kedaton dan akan mengawal *gunungan* ke pelataran Masjid Gedhe untuk diperebutkan oleh masyarakat.



Gambar 39. Momentum saat *gunungan* keluar dari Bangsal Pagelaran. Terlihat abdi dalem berbusana merah dengan kain biru tua sedang menggotong *gunungan* bersama-sama. (Sumber: kratonjogja.id).



Gambar 40. Momentum *gunungan* saat berada di pelataran Masjid Gedhe. Di sinilah *gunungan* akan diperebutkan oleh masyarakat. (Sumber: kratonjogja.id).

Kelompok prajurit yang mengawal *gunungan* sampai ke pelataran Masjid Gedhe pun menjadi perhatian tersendiri. Keragaman busana masing-masing kesatuan beserta perlengkapan senjata dan bendera yang dibawa selalu menjadi daya tarik masyarakat untuk melihatnya.



Gambar 41. Busana yang dikenakan masing-masing kelompok kesatuan prajurit di Keraton Yogyakarta

Pada kesempatan yang bersamaan, Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta kerabat dan kelompok abdi dalem yang lain menggelar upacara sungkem di dalam kedaton. Berbagai tata cara diterapkan, begitu pula aturan mengenai busana. Pada upacara sungkem di keraton, sultan akan mengenakan busana bernama *ksatriyan*, sementara untuk permaisuri, putri sultan, dan kerabat lainnya menggunakan kebaya. Di sisi lain, pada suatu upacara Garebeg Mulud Dal yang hanya digelar 8 tahun sekali, sultan akan mengenakan busana bernama *ksatriyan ageng*. Perbedaan antara busana *ksatriyan* dan *ksatriyan ageng* berada pada penutup kepala yang dikenakan.



Gambar 42. Sultan mengenakan busana bernama *ksatriyan* saat upacara sungkem atau ngabekten putri di keraton. Penutup kepala yang dikenakan disebut blangkon. (Sumber: kratonjogja.id)



Gambar 43. Sultan mengenakan busana bernama ksatriyan ageng saat upacara Garebeg Mulud Dal. Terlihat perbedaan penutup kepala yang dikenakan sultan. Penutup kepala seperti ini disebut kuluk. (Sumber: kratonjogja.id)

Keberadaan busana adat saat ini yang dilestarikan oleh keraton merupakan hasil dari penyesuaian situasi dan kondisi pada pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, pada upacara-upacara tertentu, penggunaan busana ada dengan menerapkan tata aturan seperti halnya aturan pada pemerintahan sultan-sultan sebelumnya tetap dilakukan.

Busana pada periode ini disamping sebagai penanda identitas, berfungsi pula sebagai perayaan seremonial. Di sinilah terjadinya proses pelestarian dan pengembangan secara sekaligus. Pada akhirnya, busana kebesaran di Keraton Yogyakarta mampu menjadi penanda zaman sekaligus penentu peristiwa sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryono. 1981. Serat Rerenggan Kraton. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Barthes, R. 1990. The Fashion System. Berkeley - Los Angeles: University of California Press
- Behrend. T.E. 1990. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 1: Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Jakarta: Djambatan.
- Crawfurd, John. 2017. Sejarah Kepulauan Nusantara: Kajian Budaya, Agama, Politik, Hukum, dan Ekonomi (terjemahan). Yogyakarta: Ombak.
- Carey, Peter. 1980. The Archieve of Yogyakarta, Vol. 1 Document Relating to Politics and Internal Court Affairs. London: Oxford University Press.
- _____. 2012. Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta.
- Carey, Peter dan Houben, Vincent. 2016. Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- _____. tanpa tahun. Koleksi Naskah-naskah Jawa John Crawfurd di British Library: Sebuah Pengantar: Diunggah dalam laman academia.edu.
- Condrongoro, Mary. 2010. Memahami Busana Adat Kraton Yogyakarta. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Condrongoro, Mary. dkk. 2014. Busana Adat dan Tata Rias Tradisional Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Kabanaran.
- Gallop, Annabel Teh. 1995. Pemandangan Indonesia di Masa Lampau: Seri Gambar dari British Library. Jakarta: Yayasan Lontar.

- Green, Gillian. 2007. "Angkor Vogue Sculpted Evidence of Imported Luxury Textiles in the Courts of Kings and Temples". *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. Vol. 50. No. 4. pp. 424-451.
- Groeneveldt, W.P. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malay Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhatara.
- Hadiyanta, Eka. 2013. *Lensa Budaya, Menguak Fakta Mengenali Zaman*. Yogyakarta: BPCB Yogyakarta.
- Hall, Kenneth R. 2011. *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500*. USA: Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Indrawati, Dyah.2020. "Mode, Kostum, dan Kultur Orang Jawa dalam Arsip Litografi" dalam Simposium Internasional Busana dan Peradaban di Keraton Yogyakarta. Yogyakarta: Keraton Yogyakarta, p. 114-128.
- Isnurwindyaswari, Retno. 2004. *Payung Kasultanan Yogyakarta Masa Hemngku Buwana VIII sampai Hamengku Buwana X: Kajian Atas Variasi Bentuk, Fungsi, dan Kedudukannya*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Arkeologi UGM.
- Houben, Vincent. 1994. *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Liebert, Gosta. 1976. *Iconographic Dictionary of Indian Religion: Hiduism-Budism-Jainism*. Leiden: E.J. Brill.
- Lindsay, Jenifer., dkk. 1994. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 2, Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu, Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris, Ecole francaise d'Extreme-Orient.
- Longhurst. 1979. *The Story of The Stupa*. New Delhi. Asian Educational Services.

- Mandoyokusumo. 1988. Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat. Yogyakarta; Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Mardiwarsito, L., dkk. 1992. Kamus Indonesia – Jawa Kuno. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Margana, Sri. 2010. Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Margana, Sri dan Utama, Galih Adi. 2018. "Pandangan Jawa tentang Geger Sepehi Tahun 1812 dalam Historiografi Jawa" dalam Bunga Rampai Peristiwa Geger Sepehi dalam Kajian Historiografi. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY, p. 41-70.
- Marihandono, Djoko dan Juwono, Harto. 2008. Sultan Hamengku Buwono II Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa. Yogyakarta: Banjar Aji Production.
- Marihandono, Djoko. 2008. "Sultan Hamengku Buwono II Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa" dalam Makara, Sosial Humaniora. Vol. 12. No.1, p. 27-38.
- Maziyah, Siti. 2020. "Dari Motif "Koin" dan Patola Menjadi Kawung dan Nitik: Akulturasi Kain Impor Menjadi Kain Tradisional di Keraton Yogyakarta" dalam Simposium Internasional Busana dan Peradaban di Keraton Yogyakarta. Yogyakarta: Keraton Yogyakarta, p. 24-41.
- Mudjanattistomo, Raden Mas. 1971. Katalogus Manuskrip Kraton Jogjakarta. Jogjakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
- Noorduyn, Jacobus. 2015. "Etimologi Nama Yogyakarta" dalam Asal Usul Nama Yogyakarta-Malioboro (ed. Carey). Depok: Komunitas Bambu.
- Nugraha, Muhammad R. 2020. "Proses Membatik Jrik dalam Naskah Bab Sinjang" dalam Simposium Internasional Busana dan Peradaban di Keraton Yogyakarta. Yogyakarta: Keraton Yogyakarta, p. 89-113.

- Poeroebaja, B.P.H. 2003. "Marriages in the Yogyakarta Kraton" dalam *The Kraton Selected Essays on Javanese Court*. Leiden: KITLV Press., pp. 169-230.
- Poerwadarminta. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J.B. Wolters Uitgebers Maatschappij.
- Pramutomo. 2009. *Tari, Seremoni, dan Politik Kolonial (I)*. Solo: ISI Press Solo.
- Raffles, Thomas Stamford. 2014. *The History of Java* (terjemahan). Yogyakarta: Narasi.
- Reid, Anthony. 2014. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs. 2002. *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Ricklefs, Voorhoeve, dan Annabel T. Gallop. 2014. *Indonesian Manuscript in Great Britain: A Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collection*. Jakarta: Ecole française de l'Extreme-Orient, PNRI, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saddhono, Kundharu dan Supeni, Siti. 2014. "The Role of Dutch Colonialism in the Political Life of Mataram Dynasty: A Case of the Manuscript of Babad Tanah Jawi" dalam *Asian Social Science*. Vol. 10, No. 15. Canadian Center of Science and Education.
- Sardjono, Sandra. 2020. "Depiction of Textiles in Ancient Java (8th – 15th century)" dalam *Proceeding Simposium Internasional Busana dan Peradaban di Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Keraton Yogyakarta, p. 10-23.
- Sthapati, V Ganapati. 2002. *Indian Sculpture and Iconography, Form and Measurements*. Pondicherry: Sri Aurobindo Society.
- Soeharto, Ben, dkk. 1997. *Paes Ageng dan Beksa Bedhaya, Sebuah Kajian Estetika dalam Makna yang Berlapis Ganda*. Laporan Penelitian Jurusan Seni Tari ISI Yogyakarta. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

Soekmono. 1973. Sejarah Kebudayaan Indonesia II. Yogyakarta: Kanisius.

Tim. 2009. Prajurit Kraton Yogyakarta: Filosofi dan Nilai Budaya yang Terkandung di dalamnya. Yogyakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Wurjantoro, Edie dan Haris, T. 1995. Kain dalam Masyarakat Jawa Kuna. Depok: Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Arsip

Hoedyana-wara, Dwara-warta, Keraton Yogyakarta, Tahun 1, Angka 6, Desember 1941.

Platenalbum te Jogjakarta voor het Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap – Platenalbum Yogyakarta, 20-23, F30/PBB. 34, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Pranatan Lampah-lampah Pesowanan/ Parakan Ngabekten Syawal Jimakir 1930/ Januari 1998, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pranatan Dalem Bab Namanipun Panganggo Keprabon ing Nagari Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat (SDISKS HB VIII), Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Manuskrip

Archive of Yogyakarta vol. 1, Add MS 12303, Koleksi British Library, London.

Archive of Yogyakarta vol. 2, Add MS 12341, Koleksi British Library, London.

Babad Giyanti, S90/PBA.83, Koleksi Museum Sonobudoyo, Yogyakarta.

Babad Giyanti, S93a/ SB.81, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Babad Kartasura: Amangkurat II, S76/ SK.107, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Babad Matawis, XP.10, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Babad Ngayogyakarta: HB II – HB V, S109/ PBA.280, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Babad Ngayogyakarta: HB III, S110/ SK.113, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Babad Ngayogyakarta HBV dumugi VII, S116/ SB.141a, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Prajanjianipun Para Nata Kartasura Tuwin Surakarta Kaliyan Kumpeni, H12/PBC.38, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Laman

digitalcollections.universiteitleiden.nl/ KITLV

heritage.asean.org

www.kratonjogja.id

www.rijkmuseum.nl

www.wikimedia.org

Narasumber

Nyi KRT Hamong Tejonogoro

Nyi RW Retno Adiningtyas

INDEKS

- A
abdi dalem, 8, 9, 66, 80, 89, 91, 92, 95, 97, 100,
109, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120,
121, 122, 135, 138, 139, 140, 147, 151,
158
Amangkurat, 82, 165
Amangkurat Amral, 82
atela, 118, 151
B
Babad Ngayogyakarta, 60, 61, 77, 86, 87, 88,
89, 90, 92, 105, 123, 165
Bagelen, 33, 85
batik, 4, 8, 14, 20, 22, 67, 71, 76, 78, 79, 80, 81,
84, 86, 101, 103, 104, 105, 154
bebasahan, 66, 67
Bedaya, 95
Belanda, 7, 18, 19, 20, 23, 30, 31, 35, 38, 59,
64, 65, 67, 76, 77, 82, 83, 87, 91, 92, 95,
101, 108, 111, 138, 150, 157
beludru, 54, 60, 61, 82, 83, 141, 144
beskap, 135, 136, 148, 149
busana, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 26, 28, 47, 49, 50, 54, 55, 56,
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,
71, 73, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 102, 104,
105, 108, 109, 111, 112, 115, 118, 119,
122, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150,
151, 152, 153, 154, 156, 157
busana kebesaran, 4, 20, 54, 64, 67, 79, 86, 94,
96, 118, 119, 124, 143
C
Cakraningrat, 10, 136, 140, 146
Cemerik, 62, 99
Chepas, 99, 101
Cina, 12, 13, 15, 17, 18, 171
D
Daendels, 38, 40, 87, 110
Danurejo, 88
Deans, Scott & Co, 85
E
encit, 73, 74, 75, 76
Eropa, 8, 12, 18, 19, 20, 24, 39, 54, 68, 82, 86,
87, 88, 89, 95, 99, 105, 109, 110
G
Garebeg, 8, 9, 10, 97, 100, 105, 127, 133, 139,
146, 156
Geger Sepahi, 3, 6, 38, 39, 41, 46, 47, 50, 58,
161
Greeve, 58, 75, 138
H
Hadikusumo, 136
Hamengku Buwono, 3, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 37,
39, 40, 41, 42, 47, 50, 52, 58, 59, 60, 62,
63, 65, 72, 73, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 91,
96, 99, 101, 103, 104, 106, 108, 109,
110, 111, 115, 117, 118, 119, 121, 122,
127, 129, 132, 135, 137, 138, 139, 142,
144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 157,
161, 162, 170
Hindu, 17, 47
I
Ideler Setranten, 76
India, 12, 15, 16, 18, 19, 41, 53, 71, 82, 83, 86,
124
Inggris, 19, 20, 27, 38, 41, 43, 45, 47, 58, 83,
85, 124, 170
J
Jawa, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 76, 78, 82, 83, 84, 96, 97, 99, 124,
128, 141, 146, 159, 160, 161, 162, 164,
170, 171
Jendralan, 135, 137
K
kain, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 53,
55, 56, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 80,
82, 85, 86, 103, 104, 118, 136, 141, 144,
145, 151, 152, 153, 154, 155
kampuh,, 14, 79, 80, 103, 153
Kapitan Kursiya, 76
kawung, 7, 14, 15
kembang cina, 85
Keparak, 9, 116, 152, 153, 156
Keraton, 4, 7, 8, 24, 25, 26, 30, 31, 36, 37, 38,

40, 47, 54, 58, 66, 68, 82, 95, 99, 105,
107, 108, 109, 124, 135, 146, 148, 150,
151, 153, 156, 158, 160, 161, 162, 163,
164, 170, 171

komoditi, 16, 19, 23, 70, 72, 85, 109

L

Loji, 6, 109

lurik, 71, 82, 92, 93, 94, 97, 98, 118, 151

M

Mangkubumi, 7, 8, 28, 30, 31, 32, 34, 39, 42,
66, 103, 156, 163

Mataram, 7, 12, 21, 32, 35, 60, 66, 156, 163

Moens, 63, 64, 65, 143

N

Natadirja, 89

Ngayogyakarta, 29, 37, 38, 86, 88, 136, 154,
161, 164

Nusantara, 12, 16, 18, 19, 22, 141, 159, 161

P

Pagelaran, 6, 109, 133

palawija, 111

parang rusak, 8, 80, 85, 105, 145, 155

patola, 19, 71, 82

Payung, 9, 26, 123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 132, 160

perhiasan, 4, 10, 14, 16, 26, 41, 52, 56, 69, 70,
101, 103, 140, 142, 143, 154

Pesiyar, 89

prajuritan, 7, 51, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 90,
91

pranakan, 97, 98, 118, 148, 149, 151

R

Raffles, 7, 18, 19, 27, 40, 41, 43, 45, 47, 52, 53,
54, 56, 57, 58, 66, 69, 71, 79, 82, 83, 86,
124, 141, 163

Ratu Ageng, 96

Ratu Anem, 76

Ratu Bendara, 4, 74, 76

Ratu Ibu, 88

Ratu Kencana, 74, 76

Ratu Wilhelmina, 108, 111

Reksanegaran, 138

residen, 8, 9, 41, 42, 46, 50, 64, 65, 73, 90, 91,
110, 112, 135, 137, 144

S

sastra, 2, 14, 30, 37, 42, 90, 96

Semarang, 31, 33, 43, 58, 85

Sepehi, 41, 50, 161

Serimpi, 96

Setranten, 76

sikepan, 55, 64, 67, 93, 94, 98, 118, 119, 143,
144

sinjang, 14, 80

Sonobudoyo, 9, 60, 61, 64, 109, 115, 116, 117,
159, 164, 165, 170, 171

Stachouwer, 9, 135, 137

Sultan, 3, 7, 8, 9, 10, 24, 26, 27, 31, 32, 37, 39,
40, 41, 42, 47, 50, 52, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 65, 72, 73, 76, 79, 80, 85, 86, 87, 88,
89, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103,
104, 105, 106, 108, 109, 110, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125,
127, 129, 130, 132, 135, 137, 138, 139,
142, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 153,
154, 155, 157, 161, 162, 163, 170

Sultan Sepuh, 76

Sundoro, 37, 42, 59

Surojo, 40, 41

sutra, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 55, 56, 66, 67, 70,
73, 82, 140, 141, 142

T

tedhak loji, 107, 109, 111, 113, 115, 118, 119,
120

tekstil, 19, 20, 22, 85

tenun, 12, 71, 72, 82, 85

Tingalan Dalem, 143, 144

V

VOC, 7, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 38, 39, 82

W

wastra, 4, 14, 26, 141

Y

Yogyakarta, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27,
28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45,
47, 50, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 72,
73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 95, 99,
104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 122,
124, 135, 137, 139, 146, 147, 150, 151,
153, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 170, 171

TENTANG PENULIS



Fajar Wijanarko adalah kurator manuskrip di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Sejak 2017 menekuni kajian manuskrip Jawa dan telah banyak menerbitkan artikel di jurnal nasional maupun internasional. Sejak tahun 2017 hingga sekarang banyak mengembangkan kajian manuskrip di Museum Sonobudoyo dalam bentuk pameran tematik. Pada tahun 2019, diminta untuk menjadi kurator dalam pameran manuskrip di Keraton Yogyakarta dalam rangka kembalinya 75 manuskrip dari Perpustakaan Nasional Inggris (British Library). Kesempatan menjadi kurator di Keraton Yogyakarta terus diembannya hingga sekarang. Beberapa pameran yang telah dikurasi sejak 2019 hingga sekarang antara lain (1) Pameran Sekaten Sri Sultan Hamengku Buwono I: Menghadang Gelombang Menantang Zaman, (2) Pameran Busana Abalokuswa Hadibusana Keraton Yogyakarta, (3) Pameran Sekaten Sang Adiwira Sri Sultan Hamengku Buwono II, (4) Pameran Jayengtilam: Sastra Lisan dan Pembentukan Identitas Lokal, dan (5) Pameran Jamuan, Bojakrama: Jamuan Kenegaraan Keraton Yogyakarta. Saat ini menjadi junior kurator di Museum Keraton Yogyakarta dan turut mengembangkan berbagai program-program kreatif berkaitan dengan pelestarian budaya di keraton.

Berbagai kajiannya saat ini terus dikembangkan, tidak hanya manuskrip tetapi juga sejarah dan permuseuman. Tulisannya tentang topik-topik tersebut antara lain: Serat Dahor Palak, Sastra Islam Abad XVII (2017), Sekar Cina Gambuh: Anomali Metrum Gambuh pada Teks Swara Sestra (2018), Perempuan dalam Serat Swara Sestra dan Fakta Perkawinan Endogami Aristokrat Jawa (2018), Genesis Yogyakarta dalam Tradisi Tulis di Sonobudoyo (2018), Yogyakarta dalam Sastra

Sejarah (2019), Jayengtilam: Sastra Roman dalam Peraduan (2020), Abalokuswa, Hadibusana Keraton Yogyakarta (2020), Lir-ilir 3 Stanza: Ulasan Sederhana dalam Teks Dlanan Lare (2021) Abdi Dalem Encik: Catatan Juru Masak di Keraton Yogyakarta (2021), dan berbagai tulisan-tulisan lain yang dipublikasikan melalui majalah maupun tabloid lokal dan nasional.



WASTRA-LANGKARA

Literasi Busana Bangsawan Yogyakarta

*Ministër kědah busana/ angagěma kang montering/
sanging Nagri Wělandi/ punika pěparingipun/ Maharaja
Neděrlan/ dene warnine montering/ topi cěměng binaludir
ing kěncana// Lan rasukan kang riněngga/ baludir mas
pinalisir/ ing jangga dumugi jaja/ lambung asta kanan
kering/ kancing kru mas ciniri/
(Babad Ngayogyakarta, Sinom I: 12-13)*

Minister haruslah berbusana, mengenakan yang diberikan oleh Negara Belanda, ya pemberian dari Maharaja di Nederlan. Begitu pula warnanya senada, topi hitam dibordir emas. Demikian juga busana yang dihias bordiran emas pada tepinya di garis leher hingga dada, bagian lambung, tangan kanan dan kiri (pula).



Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta 10110
Jl. Salemba Raya No.28A, Jakarta 10430
Whatsapp/SMS: 086717147303
[Https://www.perpusnas.go.id/](https://www.perpusnas.go.id/)

ISBN 978-623-313-354-8 (PDF)



9 786233 133548